BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu dari orientasi substansinya penyusunan RKPD Tahun 2023 menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan factor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Penguatan pendekatan Holistik-Tematik ini dilakukan melalui penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa

kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya
pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Penguatan pendekatan integrative dilakukan melalui keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional. Penguatan pendekatan spasial dilakukan melalui perencanaan kegiatan prioritas yang berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2023 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJM Nasional, RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Kaltara, RPJMD Kabupaten Malinau, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Kabupaten Malinau tahun 2023 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2023 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor …. Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ……);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Dalam amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejalan dengan dokumen perencanaan di tingkat

pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau khususnya bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(RKPD) Merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dan dokumen perencanaan Kabupaten Malinau.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah atas.dan hierarki perencanaan pembangunan daerah dengan kewenangannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antar dokumen sebagai berikut :

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

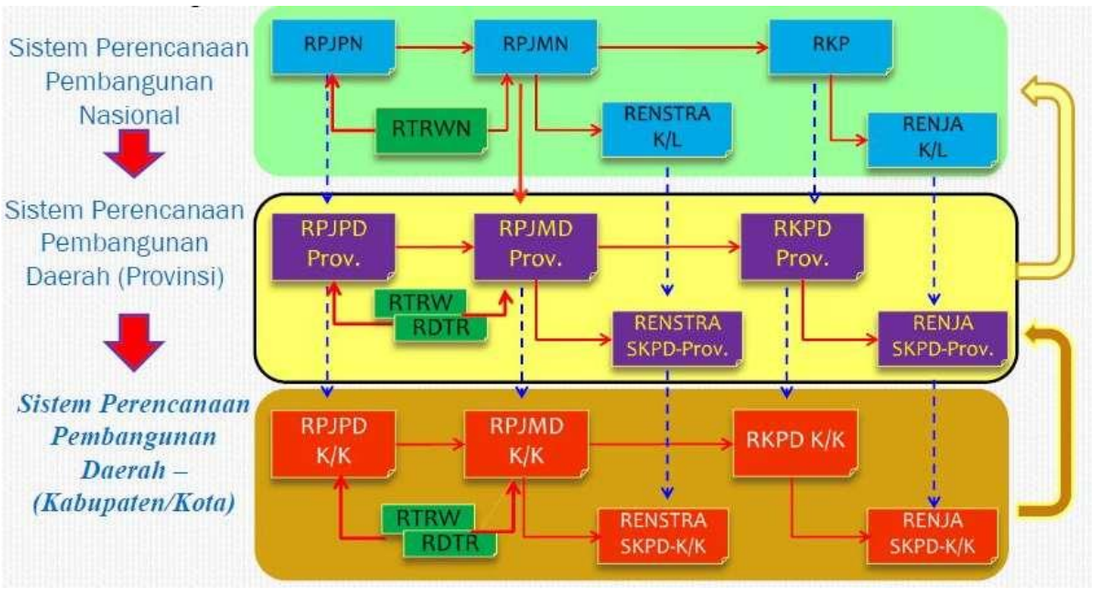

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 disusun dengan maksud agar tercipta sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah :

1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023;
3. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,

Berisikan tentang Kondisi Umum Kondisi Daerah, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah berisikan tentang permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH,

Berisikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,

Berisikan tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,

Berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, yang dalam rencana program dan kegiatan tersebut mewakil aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Berisikan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan sebagai panduan dalam pencapaian Kinerja Tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) ataupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara. Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tangal 16 November 2012 diundangkan maka Kabupaten Malinau secara resmi menjadi bagian dari lima Kabupaten pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan Ibu Kota Kabupten yakni Kecamatan Malinau Kota. Kabupaten Malinau juga merupakan daratan dengan luas mencapai 38.973,56 Km^2, sehingga menjadikan Malinau sebagai kabupaten terluas di provinsi Kalimantan Utara.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Secara administrasi, Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 2 Kecamatan Perwakilan yakni Kantor Kecamatan Perwakilan Long Sule dan Kecamatan Perwakilan Malinau Utara Timur dengan 109 desa yang juga berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dengan

panjang garis perbatasan ±504 Km di wilayah Kabupaten Malinau. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten malinau memiliki batas-batas wilayah yakni sebelah utara Kabupaten Nunukan, sebelah selatan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara, Sebelah Barat Negara Bagian Serawak-Malaysia Timur dan sebelah timur Kabupaten Tana Tidung, Bulungan, Berau dan Kutai Timur.

Dari lima belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang menyumbang hampir 30% dari keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Malinau yaitu mencapai 11.863,19 km2. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malinau Kota, yaitu sebesar 142,07 km2 atau kurang dari 1% dari keseluruhan luas wailayah Kabupaten Malinau. Sementara itu Kecamatan Sungai Boh merupakan Kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari ibukota Kabupaten.

Article I. Tabel 2.1
Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau
Tahun 2021

Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km^2)	Persentase Terhadap Luas Kab/Kec (%)
1	Sungai Boh	Mahak Baru	6	2.801,51	7,19
2	Kayan Selatan	Long Ampung	5	2.471,50	6,34
3	Kayan Hulu	Long Nawang	5	735,40	1,89
4	Kayan Hilir	Data Dian	5	11.863,19	30,44
5	Pujungan	Long Pujungan	9	6.515,39	16,72
6	Bahau Hulu	Long Alango	6	3.103,38	7,96
7	Sungai Tubu	Long Pada	5	2.243,78	5,76
8	Malinau Selatan Hulu	Metut	8	2.171,21	5,57
9	Malinau Selatan	Long loreh	9	1.154,79	2,96
10	Malinau Selatan Hilir	Setarap	8	572,20	1,47
11	Mentarang	Pulau Sapi	9	535,15	1,37

Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km²)	Persentase Terhadap Luas Kab/Kec (%)
12	Mentarang Hulu	Long Berang	7	2.807,20	7,20
13	Malinau Utara	Malinau Seberang	12	1.091,18	2,80
14	Malinau Barat	Tanjung Lapang	9	765,41	1,96
15	Malinau Kota	Malinau kota	6	142,07	0,36
JUMLAH			109 Desa	38.973,56	100,00

Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka 2022, Data diolah

Tabel 2.2
Tinggi wilayah dan jarak ke Ibu kota menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021

Kecamatan		Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke ibukota (km)
1	Sungai Boh	566,20	277,87
2	Kayan Selatan	744,40	274,26
3	Kayan Hulu	611,10	273,25
4	Kayan Hilir	604,20	238,69
5	Pujungan	267,90	140,78
6	Bahau Hulu	416,00	111,43
7	Sungai Tubu	na	76,75
8	Malinau Selatan Hulu	na	69,27
9	Malinau Selatan	83,30	45,69
10	Malinau Selatan Hilir	na	21,80
11	Mentarang	63,00	12,20
12	Mentarang Hulu	423,70	56,64
13	Malinau Utara	59,70	4,94
14	Malianu Barat	63,20	4,42
15	Malinau Kota	62,00	na
Malinau		**62,00**	

Sumber : Malinau dalam Angka Tahun 2022

2.1.1.1 Topografi

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu Gunung Naga Paratu (5.910 m) di Kecamatan Mentarang. Kawasan perbukitan juga terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan ketinggian 500-1.500 meter di atas permukaan laut.

Sementara itu dataran rendah terdapat pada sekitar Daerah aliran sungai di bagian timur dari wilayah utara yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak, dan Sungai Salap.

2.1.1.2 Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air baku, transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya menghasilkan potensi air sangat besar memalui aliran sungai dan anak-anak sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air baku dan penyediaan air minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah (transportasi regional).

2.1.1.3 Klimatologi

Pada tahun 2021 sudah terbangun stasiun amatan cuaca abri diwilyaha Kabupaten Malinau. Stasiun tersebut telah beroperasi selama tahun 2021 dan diperoleh Rata-rata suhu di wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya berkisar 26 hinggah 28 °C dengan Suhu maksimum yang tercatata pada bulan juni 2021 sebesar 36,9°C. Rata-rata kelembabpan udara berkisar antara 86 hingga 91 persen. Kecepatan angin paling

kencang tercatat pada bulan Agustus 2021, yakni mencapai 18 meter per detik.

Curah hujan di Kabupaten Malinau cukup tinggi, dengan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari 2021 yang mencapai 744.7 mm dan terendah tercatat pada bulan oktober sebesar 239.1 mm. sepanjang tahun 2021, jumlah hari hujan di Kabupaten Malinau cukup bervariasi, paling sedikit dalam satu bulan terjadi 13 hari hujan dan terbanyak mencapai 25 hari hujan dengan total hari hujan dalam setahun 246 hari.

Article II. Tabel 2.3
Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan di Stasiun BMKG Malinau Tahun 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
Januari	744.70	23	-
Februari	282.90	16	-
Maret	379.40	21	-
April	341.30	23	-
Mei	296.90	22	-
Juni	288.70	13	-
Juli	494.60	24	-
Agustus	362.20	20	-
September	374.70	23	-
Oktober	239.10	16	-
November	326.30	22	-
Desember	336.30	23	-

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

2.1.1.4 Demografi

Perkembangan kondisi kependudukan mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang diukur dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Pemahaman tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur penduduk, serta penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau akan sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah yang terbaik. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Interim BPS 2021-2023, jumlah

penduduk di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah sebanyak 83.80 Ribu jiwa. Bila dilihat dari tempat tinggalnya, penduduk Malinau mayoritas berasal dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat dan Malinau Utara.

Article III. Tabel 2.4
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per 2020-2021 (%)
1	Sungai Boh	2,35	-0.40
2	Kayan Selatan	1,99	0,27
3	Kayan Hulu	2,40	-1,59
4	Kayan Hilir	1,48	-0,45
5	Pujungan	1,73	-1,60
6	Bahau Hulu	1,39	-1,61
7	Sungai Tubu	0,89	1,68
8	Malinau Selatan Hulu	2,49	2,29
9	Malinau Selatan	5,57	2,29
10	Malianu Selatan Hilir	2,92	2,28
11	Mentarang	5,98	1,61
12	Mentarang Hulu	0,98	1,65
13	Malinau Utara	15,02	3,21
14	Malianu Barat	11,46	2,56
15	Malinau Kota	27,14	2,59
Malinau		**83,80**	**2,08**

Article IV. Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

Article V.

Article VI. Lanjutan

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Sungai Boh	2,80	0,84	117
2	Kayan Selatan	2,37	0,80	108
3	Kayan Hulu	2,87	3,27	109

4	Kayan Hilir	1,77	0,12	125
5	Pujungan	2,06	0,56	113
6	Bahau Hulu	1,66	0,21	119
7	Sungai Tubu	1,06	0,39	112
8	Malinau Selatan Hulu	2,98	1,15	120
9	Malinau Selatan	6,65	4,83	161
10	Malianu Selatan Hilir	3,49	5,10	112
11	Mentarang	7,14	11,17	105
12	Mentarang Hulu	1,17	0,35	110
13	Malinau Utara	17,93	13,77	115
14	Malianu Barat	13,68	14,97	110
15	Malinau Kota	32,39	191,03	110
Malinau		**100,00**	**2,15**	**114**

Article VII. Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

Article VIII.

Article IX.

Article X.

Article XI. Tabel 2.5

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dikabupaten malinau tahun 2020 - 2021

Article XII.

Article XIII.

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	3.621	3.374	6.995
5 – 9	3.467	3.297	6.764
10 – 14	3.994	3.682	7.676
15 – 19	4.177	3.962	8.139
20 – 24	4.257	3.720	7.977
25 – 29	4.168	3.676	7.844
30 – 34	4.099	3.493	7.592
35 – 39	3.630	3.123	6.753
40 – 44	3.337	2.749	6.086
45 – 49	2.905	2.244	5.149
50 – 54	2.132	1.729	3.861
55 – 59	1.733	1.340	3.073
60 – 64	1.145	986	2.131
65 – 69	859	736	1.595
70-74	571	505	1.076
75+	587	498	1.085

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak Tahu/TT			
Malinau	**44.682**	**38.114**	**83.796**

Article XIV. Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

Article XV.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

(1) Pertumbuhan PDRB

Perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Malinau selama kurun waktu 2017-2021 cenderung terus meningkat. Pada tahun 2017, nilai PDRB Kabupaten Malinau sebesar Rp.8.497,62 milyar meningkat menjadi Rp.12.323,48 milyar pada tahun 2021. Kenaikan yang cukup besar ini dipicu oleh peningkatan nilai tambah dari kegiatan primer, yaitu pertambangan dan penggalian terutama pertambangan batu bara, konstruksi, dan pertanian. Peningkatan nilai PDRB menunjukkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau.

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha diKabupaten Malinau tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.033,60	1.076,08	1.168,90	1.278,36	1.420,13
B	Pertambangan dan Penggalian	4.151,55	4.618,15	5.294,14	5.358,41	6.021,15
C	Industri Pengolahan	243,40	259,02	275,86	288,05	312,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	3,26	3,86	4,47	4,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	6,33	7,17	8,54	9,75
F	Konstruksi	1.317,27	1.462,40	1.715,32	1.919,64	2.002,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	342,06	386,47	444.,15	491,93	575,97
H	Transportasi dan Pergudangan	260,62	300,68	337,51	346,15	366,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,04	171,92	195,04	204,40	246,62
J	Informasi dan Komunikasi	26,91	30,49	34,98	40,46	48,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,21	21,07	22,55	24,53	29,13

Lapangan Usaha		2017	2018	2019r	2020*	2021**
L	Real Estat	19,86	22,19	26,67	26,19	29,47
M, N	Jasa Perusahaan	13,38	14,31	15,94	17,35	19,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	606,31	649,10	696,92	713,20	760,18
P	Jasa Pendidikan	196,43	216,00	238,13	257,41	282,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,40	120,63	135,65	159,24	184,01
R,S ,T, U	Jasa lainnya	5,90	6,70	7,55	8,98	10,73
PDRB		**8.497,62**	**9.364,80**	**10.618,38**	**11.147,29**	**12.323,48**

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau 2022

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

Sementara nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan 2010 juga terus meningkat dari Rp. 6.971,53 pada tahun 2017 menjadi Rp.8.190.17 milyar pada tahun 2021. Pertumbuhan ini didukung oleh perkembangan sektor perdagangan dan sektor pengangkutan yang memberi andil cukup besar dalam memacu pertumbuhan.

Tabel 2.7
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	794,19	806,60	814,93	839,63	868,83
B	Pertambangan dan Penggalian	3.721,62	3.945,12	4.208,66	4.082,79	4.364,66
C	Industri Pengolahan	179,28	183,26	189,19	188,60	193,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,36	2,36	2,85	3,22	3,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	4,97	5,82	6,35	6,52
F	Konstruksi	955,81	1.016,98	1.124,07	1.171,76	1.164,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	257,32	276,05	299,67	305,23	328,40

Lapangan Usaha		2017	2018	2019[r]	2020*	2021**
	dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	211,24	230,32	246,10	241,98	246,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107,09	121,07	132,88	132,73	137,96
J	Informasi dan Komunikasi	25,30	27,60	30,16	31,80	34,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,67	12,99	13,73	14,42	16,18
L	Real Estat	14,71	15,65	16,42	16,78	17,17
M,N	Jasa Perusahaan	10,15	10,44	10,87	10,86	11,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	468,65	499,28	520,75	523,23	526,89
P	Jasa Pendidikan	126,86	133,02	142,12	152,33	160,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,17	80,71	86,41	95,73	103,31
R,S, T,U	Jasa lainnya	4,13	4,50	4,86	5,30	5,68
PDRB		**6.971,53**	**7.374,49**	**7.849,49**	**7.822,76**	**8.190,17**

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau 2022

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian, pertambangan dan penggalian dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata lebih dari 50%. Sumbangan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan, sementara sumbangan sub sektor pertambangan batu bara dalam tiga tahun terakhir ini meningkat. Ketergantungan pada pertambangan dan penggalian sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batu bara di pasar internasional. Tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Dikabupaten Malinau 2017-2021 (%)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,16	11,49	11,01	11,47	11,52
B	Pertambangan dan Penggalian	48,86	49,31	49,86	48,07	48,86
C	Industri Pengolahan	2,86	2,77	2,60	2,58	2,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
F	Konstruksi	15,5	15,62	16,15	17,22	16,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,13	4,18	4,41	4,67
H	Transportasi dan Pergudangan	3,07	3,21	3,18	3,11	2,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,71	1,84	1,84	1,83	2,00
J	Informasi dan Komunikasi	0,32	0,33	0,33	0,36	0,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,22	0,21	0,22	0,24
L	Real Estat	0,23	0,24	0,23	0,23	0,24
M, N	Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,14	6,93	6,56	6,40	6,17
P	Jasa Pendidikan	2,31	2,31	2,24	2,31	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,29	1,28	1,43	1,49

Lapangan Usaha		2017	2018	2019r	2020*	2021**
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau 2020

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,99 % kemudian meningkat selama kurun waktu 2017-2019 mengalami fluktuatif, namun pada Tahun 2020 megnalami penurunan drastis menjadi -0,34% hal ini dampak Pandemi Covid19 yang terus bergejolak yang berdampak pada Perekonomian Global dan Nasional. Di kabupaten malinau pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,70 %. penurunan permintaan komoditas pertambangan, Permintaan Jasa Perusahan, Industri Pengolahan dan jasa mengakibatkan minus laju pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang harus diatasi adalah percepatan dan pemulihan ekonomi daerah dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan melalui optimalisasi pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, mengoptimalkan program dan kegiatan dari seluruh SKPD, dan mengembangkan kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021 (%)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	1,94	0,66	3,03	3,48
B	Pertambangan dan Penggalian	7,79	6,01	6,68	-2,99	6,90
C	Industri Pengolahan	2,95	2,22	3,23	-0,31	2,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,24	8,4	11,57	13,15	3,55
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,54	7,8	8,81	9,09	2,59

Lapangan Usaha		2017	2018	2019[r]	2020*	2021**
F	Konstruksi	4,28	6,4	10,53	4,24	-0,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	7,28	8,55	1,86	7,59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,88	9,03	6,85	-1,67	2,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,76	13,05	9,75	-0,11	3,94
J	Informasi dan Komunikasi	7,54	9,07	9,30	5,42	8,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,37	11,27	5,74	5,03	12,20
L	Real Estat	3,46	6,41	4,95	2,19	2,32
M, N	Jasa Perusahaan	3,29	2,81	4,19	-0,12	2,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,4	6,54	4,30	0,48	0,70
P	Jasa Pendidikan	5,49	4,85	6,84	7,18	5,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,59	5,95	7,07	10,79	7,92
R,S, T,U	Jasa lainnya	9,85	8,94	8,11	9,04	7,15
PDRB		**5,99**	**5,78**	**6,44**	**-0,34**	**4,70**

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau 2022

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

(2) Inflasi

Inflasi di Kabupaten Malinau merujuk pada inflasi kota Tarakan, Tarakan merupakan titik distribusi barang di provinsi Kaltara yang mewakili pergerakan harga barang di level provinsi. Sehingga dari kota Tarakan indikator pergerakan harga sudah bisa dilihat , bila harga barang naik di tarakan atau ada pergerakan harga, maka hampir dapat dipastikan daerah sekitar yang mendapat distribusi barang dari tarakan dipastikan juga naik.

Merujuk pada data statistik Kota Tarakan terkait perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi pada Bulan Mei 2019, kota tarakan terjadi inflasi sebesar 0,77 persen sementara inflasi tahun kalender sebesar 1,67 persen dan inflasi tahun ke tahun atau YoY (Years on Years

sebesar 5,33 persen. Inflasi kota tarakan dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 2,11 persen, kelompok bahan makanan yaitu sebesar 1,27 persen. Selanjutnya yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,73 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,24 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,20 persen. Sementara itu untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga serta kelompok sandang tetap stabil sebesar -0,02 persen.

Tabel 2.10
Laju Infalsi Tahun 2018 - 2020

Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2018-2019									
Bulan	Tahun								
	2018			2019			2020		
	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun
Januari	0,49	0,49	2,57	0,96	0,96	5,49	na	na	Na
Februari	0,09	0,58	2,62	-0,03	0,94	5,38	Na	Na	Na
Maret	-0,03	0,55	2,18	-0,63	0,30	4,74	Na	Na	Na
April	0,29	0,84	2,20	0,60	0,90	5,06	Na	Na	Na
Mei	0,50	1,35	2,20	0,77	1,67	5,33	Na	Na	Na
Juni	2,71	4,10	3,02	0,53	2,21	3,10	Na	Na	Na
Juli	-1,40	2,64	1,87	-0,64	1,56	3,89	Na	Na	Na
Agustus	0,62	3,28	3,33	-0,92	0,62	2,30	Na	Na	Na
September	-0,73	2,53	2,82	-0,57	0,05	2,46	Na	Na	Na
Oktober	0,03	2,56	3,27	-0,30	-0,25	2,12	Na	Na	Na
November	0,76	3,35	4,25	0,63	0,37	1,98	Na	Na	Na
Desember	1,60	5,00	5,00	1,09	1,47	1,47	Na	Na	na

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan

Catatan :

Salah satu bahan dasar dalam penghitungan IHK/inflasi adalah Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan di daerah perkotaan. Oleh karena itu, BPS Kab. Malinau tidak melakukan perhitungan inflasi, dan untuk kepentingan data inflasi BPS Kab. Malinau masih merujuk pada perhitungan inflasi kota Tarakan.

(3) Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejahu mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi acuan utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nilai indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan indeks gini dibagi menajdi 3 kelompok/kategori, indeks gini lebih dari 0,5 termasuk kedalam kategori "ketimpangan tinggi". Indeks gini antara 0,30-0,49 termasuk kategori "ketimpangan sedang" dan indeks gini kurang dari 0,30 termasuk dalam kategori "ketimpangan rendah".

Indeks gini Kabupaten Malinau pada tahun 2018 Sebesar 0,295 jika dibandingkan Provinsi dan Nasional Kabupaten Malinau Masih Lebih Rendah. Tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Malinau Berada pada nilai indeks lebih dari 0,3 yang berarti termasuk dalam kategori "ketimpangan sedang" yang masih berada dibawah Nasional.

Tabel. 2.11
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2021

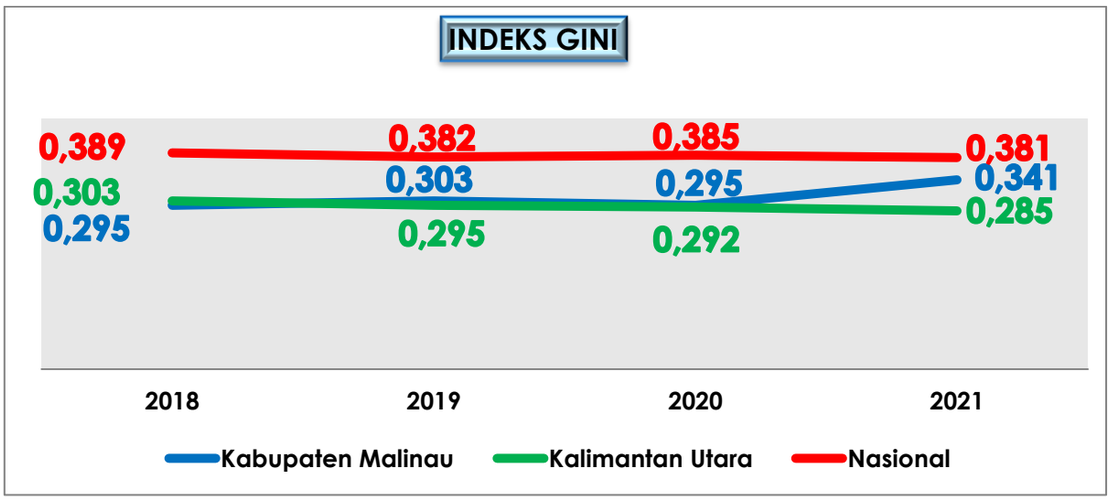

Sumber : Paparan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2022, Data Diolah

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia terutama dalam

pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Perkembangan IPM Kabupaten Malinau tercatat terus membaik dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yakni berkisar 71,74 -72,06. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 72,32. Pemerintah Kabupaten Malinau harus tetap meningkatkan program-program yang secara langsung berdampak bagi perekonomian masyarakat dengan terus meningkatkan Program Gerakan Desa Membangun dan Program RT Bersih untuk menekan dampak buruk dari penyebaran COVID-19 yang melumpuhkan aktifitas perekonomian dan menghambat pembangunan. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Tabel.2.12
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Malinau Tahun 2018 – 2021

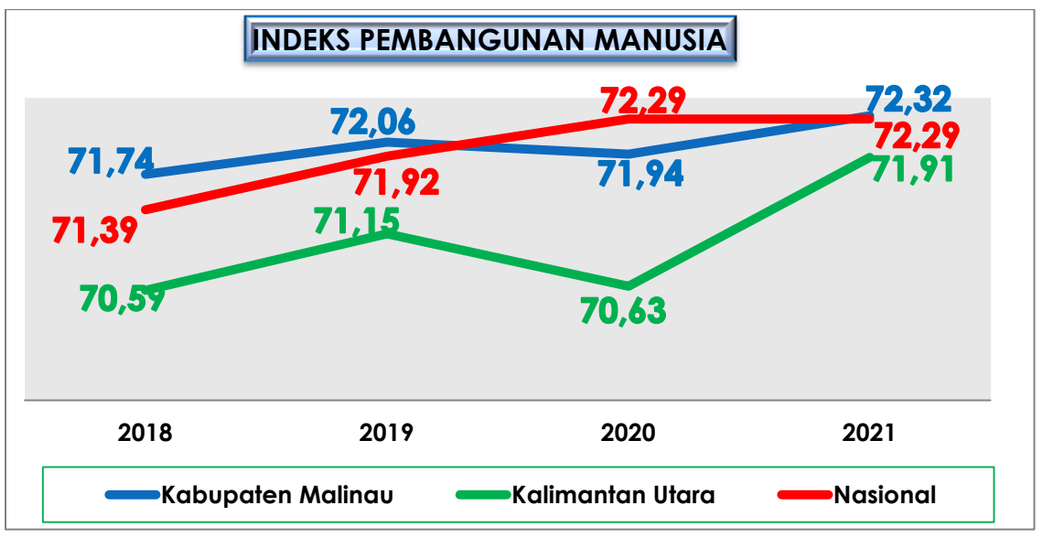

Sumber : Paparan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2022, Data Diolah

2. Kemiskinan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa

Membangun telah dapat menurunkan Kemiskinan. Jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2018 sebesar 7,68 ribu jiwa dan terus menurun sampai Tahun 2020 sebesar 6,63 Ribu Jiwa Meskipun Pada tahun 2021 Kembali naik menjadi 7,30 Ribu Jiwa namun hal ini masih lebih baik dari Persentase nasional.

Kemiskinan bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi; mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat; melakukan revitalisasi pertanian; serta mengembangkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tabel.2.13
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021

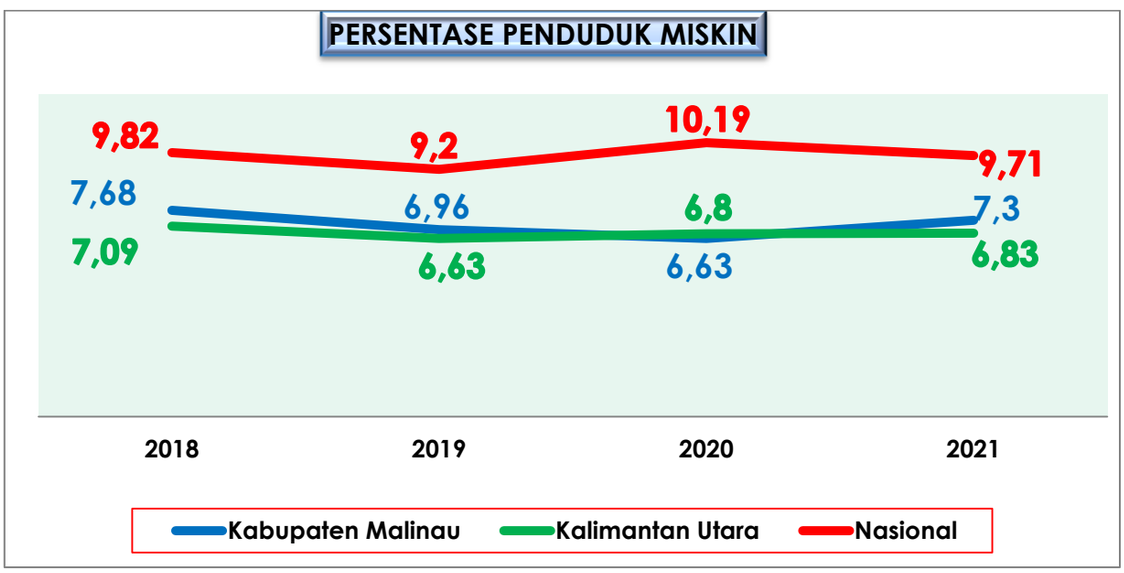

Sumber : Paparan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2022, Data Diolah

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yang mnecerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Malinau. Dengan demikian, semakin tinggi TPAK Kabupaten Malinau, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tesedia untuk memproduksi barang dan jasa. Dari tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa TPAK Kabupaten Malinau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, yakni 75,29% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Malinau terdapat 75 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja. Namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 menjadi hanya 66,44 persen dan kembali meningkat pada tahun 2021 71,49. TPAK Kabupaten Malinau masih cenderung fluktuatif.

Tabel.2.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,88	75.29	68,86	66,44	71,49

Sumber : Malinau dalam Angka 2020, 2021, BPS Malinau

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malinau memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran

terbuka di Kabupaten Malinau. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malinau cenderung mengalami penurunan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 5.08 persen dan pada tahun 2021 kembali turun mencapai angka 4,14 Persen. Kenaikan pengangguran terbuka pada tahun 2020 tidak terlepas dari mewabahnya penyebaran Virus Corona yang mengakibatkan menurunnya penyerapan lapangan pekerjaan. Banyaknya perusahaan swasta yang memberhentikan pekerja di tambah lagi dengan jumlah penduduk yang terus meningkat berdampak negatif pada aspek pengangguran terbuka. Tantangan kabupaten malinau kedepan adalah menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha melalui program-program yang bersentuhan langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel.2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau
Tahun 2016-2020

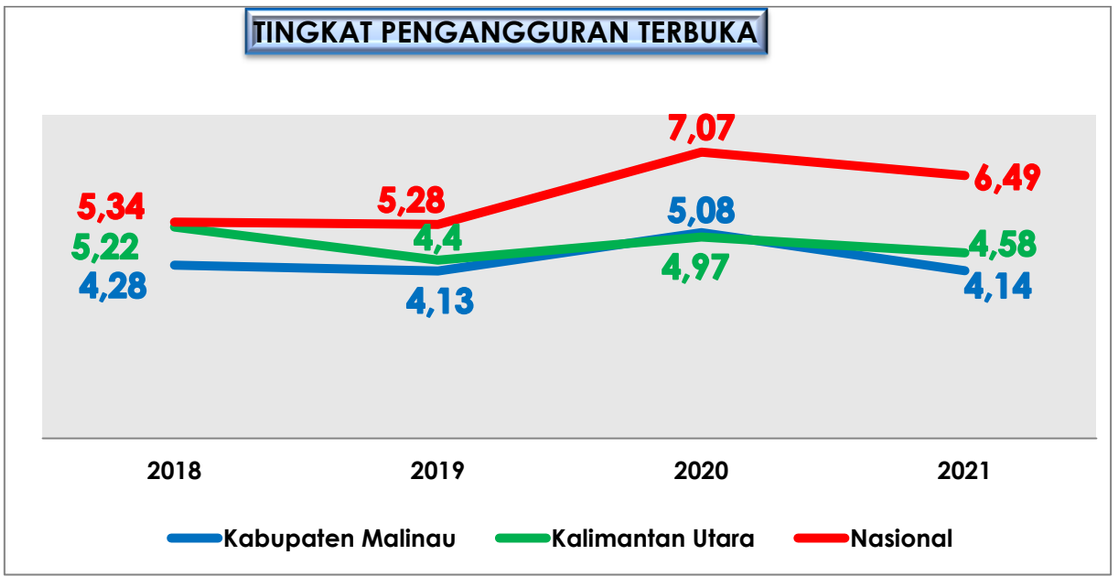

Sumber : Paparan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2022, Data Diolah

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

1. Pariwisata

Peningkatan kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan lokal ke suatu daerah wisata tidak terlepas dari keaslian dan keunikan daerah wisata tersebut yang berbeda dari daerah lain sehingga menjadi daya tarik tersendiri yang mempesona. Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malinau, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau dari sektor pariwisata. di Kabupaten Malinau sebanyak 58% merupakan jenis wisata alam. Hal ini merupakan peluang kabupaten malinau untuk mendapatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Tantangan kabupaten Malinau kedepan perlu melakukan prioritas pembangunan daerah wisata alam. Penyediaan sarana dan prasarana, infrastrukur jalan menuju wisata harus ditingkatkan agar potensi dari sektor wisata akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.16
Jumlah Obyek Wisata menurut jenis di Kabupaten Malinau
Tahun 2021

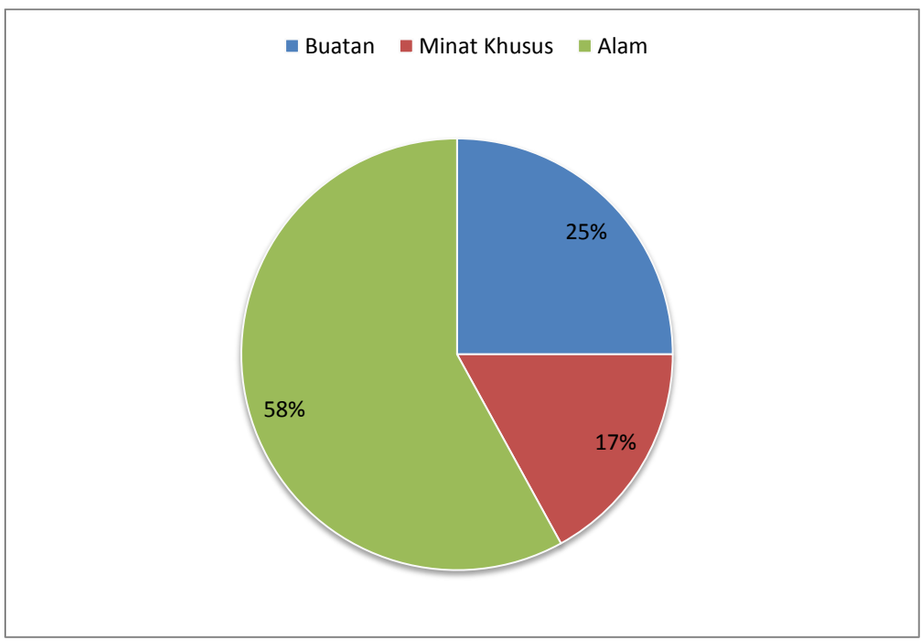

Sumber : Malinau Dalam Angka tahun 2022

2. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil negara semata, organisasi kepemudaan yang pengurus dan anggota terdiri atas pemuda dan pemudi juga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Oleh karenanya, pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khusunya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuh kembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Sejalan dengan fakta menunjukan jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda : Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	60	65	75	80	Na
2	Jumlah Organisasi Olahraga : Persentase organisasi olah raga yang aktif	n.a	60	65	70	Na

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pengembangan pendidikan yang merata, terjangkau dan bermutu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan produktivitas daerah. Peningkatan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh penyediaan gedung sekolah, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, pembinaan tenaga pengajar, dan penyediaan buku dan peralatan sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk menurut kelompok umur jenjang pendidikan dikalikan 100, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) jumlah siswa setiap jenjang pendidikan menurut kelompok umur usia sekolah dibagi jumlah penduduk menurut kelompok umur jenjang pendidikan dikalikan 100.

diukur dengan APK, APM maupun APS termasuk tinggi atau lebih dari 96 persen. Sementara APM untuk jenjang pendikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA tercatat rendah atau kurang dari 77 persen. Kondisi ini menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Tantangan yang harus diatasi pada lima tahun mendatang adalah perluasan jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau.

Tabel 2.18
Angka APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
- SD/MI	105,11	104,17	99,28	106,08	104,91
- SMP/MTs	103,74	102,82	94,44	101,80	100,26
- SMA/SMK/MA	78,79	91,68	83,77	92,82	92,39
Angka Partisipasi Murni					

(APM)					
- SD/MI	92,62	91,05	93,00	93,28	94,17
- SMP/MTs	80,33	81,13	81,74	82,34	82,10
- SMA/SMK/MA	65,46	67,24	68,46	68,46	68,53

Sumber: BPS Malinau, 2019,2020, Malinau Dalam angka tahun 2022

Tabel 2.19
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	-	-	-	-
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	1	35	5	7,00
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	1	44	5	8,80
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11. Mentarang	1	47	8	5,88
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-
13. Malinau Utara	1	42	6	7,00
14. Malinau Barat	1	59	9	6,56
15. Malinau Kota	1	109	12	9,08
Jumlah	6	336	45	7,47

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.20
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	1	29	4	7,25
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	2	43	10	4,30
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	-	-	-	-
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	1	5	1	5,00
9. Malinau Selatan	2	70	11	6,36
10. Malinau Selatan Hilir	1	30	3	10,00
11. Mentarang	1	23	4	5,75
12. Mentarang Hulu	1	32	3	10,67
13. Malinau Utara	6	224	27	8,30
14. Malinau Barat	2	47	6	7,83
15. Malinau Kota	11	450	67	6,72
Jumlah	28	953	136	7,01

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.21
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	-	-	-	-
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	-	-	-	-
6. Bahau Hulu	-	-	-	-

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	-	-	-	-
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11. Mentarang	-	-	-	-
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-
13. Malinau Utara	1	14	112	0,13
14. Malinau Barat	-	-	-	-
15. Malinau Kota	-	-	-	-
Jumlah	1	14	112	0,13

Sumber: Malinau Dalam Angka 2020

Tabel 2.22
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	6	302	66	4,58
2. Kayan Selatan	4	256	49	5,22
3. Kayan Hulu	5	234	53	4,42
4. Kayan Hilir	3	162	40	4,05
5. Pujungan	8	324	75	4,32
6. Bahau Hulu	6	178	51	3,49
7. Sungai Tubu	5	127	42	3,02
8. Malinau Selatan Hulu	6	386	60	6,48
9. Malinau Selatan	6	701	64	10,95
10. Malinau Selatan Hilir	7	318	78	4,08

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
11. Mentarang	6	722	80	9,03
12. Mentarang Hulu	8	127	59	2,15
13. Malinau Utara	13	1.537	184	8,35
14. Malinau Barat	10	1.366	137	9,97
15. Malinau Kota	11	2.771	189	14,66
Jumlah	104	9.514	1.227	7,75

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.23
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Swasta dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	-	-	-	-
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	-	-	-	-
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	-	-	-	-
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11. Mentarang	-	-	-	-
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-
13. Malinau Utara	2	279	13	21,46
14. Malinau Barat	-	-	-	-
15. Malinau Kota	2	257	15	17,13
Jumlah	4	536	28	19,14

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.24
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
16. Sungai Boh	-	-	-	-
17. Kayan Selatan	-	-	-	-
18. Kayan Hulu	-	-	-	-
19. Kayan Hilir	-	-	-	-
20. Pujungan	-	-	-	-
21. Bahau Hulu	-	-	-	-
22. Sungai Tubu	-	-	-	-
23. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
24. Malinau Selatan	-	-	-	-
25. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
26. Mentarang	-	-	-	-
27. Mentarang Hulu	-	-	-	-
28. Malinau Utara	1	309	19	16,26
29. Malinau Barat	-	-	-	-
30. Malinau Kota	-	-	-	-
Jumlah	1	309	19	16,26

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.25
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	2	116	33	3,52
2. Kayan Selatan	3	104	35	2,97
3. Kayan Hulu	2	155	21	7,38
4. Kayan Hilir	2	74	20	3,70

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
5. Pujungan	2	98	28	3,50
6. Bahau Hulu	1	65	16	4,06
7. Sungai Tubu	1	92	11	8,36
8. Malinau Selatan Hulu	2	156	32	4,88
9. Malinau Selatan	1	239	20	11,95
10. Malinau Selatan Hilir	4	163	47	3,47
11. Mentarang	3	399	54	7,39
12. Mentarang Hulu	1	54	12	4,50
13. Malinau Utara	4	708	76	9,32
14. Malinau Barat	4	661	73	9,05
15. Malinau Kota	3	1.277	80	15,96
Jumlah	35	4.361	558	7,82

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.26
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	-	-	-	-
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	-	-	-	-
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	-	-	-	-
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
11. Mentarang	-	-	-	-
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-
13. Malinau Utara	1	81	6	13,50
14. Malinau Barat	-	-	-	-
15. Malinau Kota	2	128	16	8,00
Jumlah	3	209	22	9,50

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.27
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	-	-	-	-
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	-	-	-	-
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	-	-	-	-
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11. Mentarang	-	-	-	-
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-
13. Malinau Utara	1	206	29	7,10
14. Malinau Barat	-	-	-	-
15. Malinau Kota	-	-	-	-
Jumlah	1	206	29	7,10

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.28
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
16. Sungai Boh	-	-	-	-
17. Kayan Selatan	-	-	-	-
18. Kayan Hulu	-	-	-	-
19. Kayan Hilir	-	-	-	-
20. Pujungan	-	-	-	-
21. Bahau Hulu	-	-	-	-
22. Sungai Tubu	-	-	-	-
23. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
24. Malinau Selatan	-	-	-	-
25. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
26. Mentarang	-	-	-	-
27. Mentarang Hulu	-	-	-	-
28. Malinau Utara	-	-	-	-
29. Malinau Barat	-	-	-	-
30. Malinau Kota	1	73	47	1,55
Jumlah	1	73	47	1,55

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.29
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2021

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	1	83	14	5,93
2. Kayan Selatan	1	83	17	4,88

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
3. Kayan Hulu	1	143	22	6,50
4. Kayan Hilir	2	62	28	2,21
5. Pujungan	1	43	13	3,31
6. Bahau Hulu	1	50	18	2,78
7. Sungai Tubu	1	49	15	3,27
8. Malinau Selatan Hulu	1	59	15	3,93
9. Malinau Selatan	1	168	17	9,88
10. Malinau Selatan Hilir	1	42	15	2,80
11. Mentarang	1	309	25	12,36
12. Mentarang Hulu	1	47	14	3,36
13. Malinau Utara	1	544	39	13,95
14. Malinau Barat	1	427	23	18,57
15. Malinau Kota	1	847	45	18,82
Jumlah	16	2.956	320	9,24

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.30
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	-	-	-	-
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	-	-	-	-
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	-	-	-	-
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11. Mentarang	-	-	-	-
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
13. Malinau Utara	-	-	-	-
14. Malinau Barat	-	-	-	-
15. Malinau Kota	3	101	17	5,94
Jumlah	3	101	17	5,94

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.31
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	-	-	-	-
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	-	-	-	-
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	-	-	-	-
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11. Mentarang	-	-	-	-
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-
13. Malinau Utara	1	144	25	5,76
14. Malinau Barat	1	211	25	8,44
15. Malinau Kota	1	616	37	16,65
Jumlah	3	971	87	11,16

Sumber: Malinau Dalam Angka 2021

Tabel 2.32

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Guru
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	-	-	-	-
4. Kayan Hilir	-	-	-	-
5. Pujungan	-	-	-	-
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	-	-	-	-
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11. Mentarang	-	-	-	-
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-
13. Malinau Utara	-	-	-	-
14. Malinau Barat	1	4	2	2,00
15. Malinau Kota	-	-	-	-
Jumlah	1	4	2	2,00

Sumber: Malinau Dalam Angka 2022

Tantangan Pemerintah kabupaten malinau kedepan adalah peningkatan jumlah sarana dan prasaran sekolah serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Guru pengajar melalui pelatihan serta kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian guru untuk menghasilkan Lulusan Peserta didik yang berkompeten dan dapat bersaing dalam dunia usaha maupun dunia kerja.

Selain perkembangan pendidikan dasar, menengah dan atas. perkembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Malinau juga menjadi prioritas pembangunan. Pada saat ini di Kabupaten Malinau telah dibangun Politeknik Malinau dengan berbagai jurusan akademik yang dibuka dan tentu masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana, SDM

Dosen serta penunjang Pembelajaran diataranya lab tempat praktik. Tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik serta membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, gedung, Lab, serta penyediaan buku-buku pustaka merupakan prioritas.

Tabel 2.33
Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Politeknik di Kabupaten Malinau
Tahun 2017-2021

Tahun	Mahasiswa			Lulusan/Wisudawan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	90	69	159	3	na	na
2018	57	63	120	na	na	na
2019	27	31	58	na	na	na
2020	31	32	63	na	na	na
2021	163	174	337	na	na	na

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2022

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan yang baik, merata dan bermutu merupakan hak dasar rakyat dan sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.Status kesehatan masyarakat dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan suatu daerah dalam usaha pemenuhan hak dasar rakyat. Manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan modal utama dalam pembangunan.

Pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah; serta mendorong kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, derajat kesehatan

masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Prasarana dan sarana kesehatan yang tersedia pada tahun 2017 di Kabupaten Malinau adalah Rumah Sakit sebanyak 3 unit, Puskesmas sebanyak 18 unit, Puskesmas Pembantu 79 unit, Apotek 9 unit dan klinik/balai kesehatan sebanyak 1 unit. Jumlah prasarana dan sarana kesehatan masih terbatas di banding luas wilayah kecamatan. Tantangan yang harus diatasi adalah pembangunan prasarana dan sarana kesehatan, revitalisasi Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; serta peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2017 tercatat sebanyak 326 orang terdiri dari dokter 17 orang, perawat 154 orang, bidang 129 orang, tenaga farmasi 8 orang dan ahli gizi 18 orang. Selain itu jumlah dokter spesialis sebanyak 18 orang, dokter umum 29 orang dan dokter gigi sebanyak 3 orang. Jumlah tenaga kesehatan tersebut masih jauh dari memadai untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi adalah penambahhan dokter khususnya dokter umum dan dokter spesialis, tenaga farmasi dan ahli gizi.

Tabel 2.34
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskemas Pembantu	Apotek	Poli Klinik/ Balai Kesehatan
1. Sungai Boh	0	1	3	0	0
2. Kayan Selatan	1	1	3	0	0
3. Kayan Hulu	0	1	4	0	0
4. Kayan Hilir	0	2	1	0	0

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskemas Pembantu	Apotek	Poli Klinik/ Balai Kesehatan
5. Pujungan	0	1	7	0	0
6. Bahau Hulu	0	1	5	0	0
7. Sungai Tubu	0	1	4	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	1	8	0	0
9. Malinau Selatan	1	1	5	2	0
10. Malinau Selatan Hilir	0	2	5	0	0
11. Mentarang	0	1	8	1	0
12. Mentarang Hulu	0	1	7	0	0
13. Malinau Utara	1	1	11	2	0
14. Malinau Barat	0	2	7	1	0
15. Malinau Kota	0	1	3	3	1
Jumlah	3	18	81	9	1

Sumber: BPS Malinau 2022

Tabel 2.35
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021

Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian
1. Sungai Boh	2	0	14	8	1
2. Kayan Selatan	5	0	24	17	4
3. Kayan Hulu	2	0	9	7	0
4. Kayan Hilir	2	0	16	8	1
5. Pujungan	1	0	18	12	1
6. Bahau Hulu	1	0	11	6	1
7. Sungai Tubu	0	0	0	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	1	0	10	7	1
9. Malinau Selatan	6	2	33	24	7
10. Malinau Selatan Hilir	2	2	29	16	4
11. Mentarang	2	1	33	19	3

Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian
12. Mentarang Hulu	0	1	14	8	1
13. Malinau Utara	35	3	227	74	38
14. Malinau Barat	5	2	42	18	5
15. Malinau Kota	4	0	22	14	3
Jumlah	68	11	502	238	70

Sumber: BPS Malinau 2022

Tabel 2.36
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021

Kecamatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
1. Sungai Boh	2	3	0	0
2. Kayan Selatan	2	2	0	0
3. Kayan Hulu	1	1	0	0
4. Kayan Hilir	1	2	2	0
5. Pujungan	1	3	0	0
6. Bahau Hulu	1	1	2	0
7. Sungai Tubu	0	0	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	0	1	0
9. Malinau Selatan	5	1	3	0
10. Malinau Selatan Hilir	0	2	2	0
11. Mentarang	1	1	1	0
12. Mentarang Hulu	2	1	1	0
13. Malinau Utara	28	2	6	0
14. Malinau Barat	2	2	2	0
15. Malinau Kota	2	1	3	0
Jumlah	48	22	23	0

Sumber: BPS Malinau 2022

Tabel 2.37

Jumlah Rumah Sakit umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas/Rawat Inap	Puskesmas/Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
1. Sungai Boh	0	1	0	0	6
2. Kayan Selatan	1	0	1	0	5
3. Kayan Hulu	0	1	0	0	9
4. Kayan Hilir	0	1	1	0	6
5. Pujungan	0	1	0	0	7
6. Bahau Hulu	0	1	0	0	6
7. Sungai Tubu	0	0	0	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	0	1	0	6
9. Malinau Selatan	1	0	1	0	13
). Malinau Selatan Hilir	0	0	2	0	12
11. Mentarang	0	0	0	0	12
12. Mentarang Hulu	0	0	1	0	4
13. Malinau Utara	1	0	1	1	16
14. Malinau Barat	0	0	2	0	7
15. Malinau Kota	0	0	1	5	14
Jumlah	3	5	12	6	123

Sumber: BPS Malinau 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Prasarana dan Sarana Daerah

1. Transportasi

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan modal utama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah akan meningkat apabila didukung prasarana dan sarana transportasi yang memadai. mobilitas penduduk dan barang baik antardesa, antarkecamatan antarkabupaten dan antarnegara apabila tidak didukung pada akes jalan yang baik maka akan menjadi persoalan dan hambatan bagi kemajuan suatu daerah dan apabila akses Transportasi baik, lancar,

mudah dan murah akan mendukung penghematan pengeluaran rumahtangga, pemanfaatan keunggulan komparatif desa dan daerah, serta peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Transportasi yang baik juga akan mendukung berkembangnya kegiatan sosial budaya masyarakat dalam kemajuan suatu daerah.

Pada tahun 2021 Panjang jalan yang dikelolah oleh kabupaten malinau mencapai 1.043,20 Km. Dari panjang jalan Kabupaten tersebut, 165,61 Jm kondisinya telah diaspal, 440,67 Km masih krikil dan 436,92 Km masih jalan tanah.

Jalan beraspal masih relatif sedikit dibanding keseluruhan panjang jalan. Sebagain besar jenis jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antardesa dan antarkecamatan. Selain itu, jalan negara dan jalan provinsi tidak bertambah selama lima tahun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi adalah percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan khususnya yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Dari kondisi jalan yang ada di Kabupaten Malinau sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan barang, meningkatkan biaya tinggi, menambah beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi potensi pengembangan daerah. Tantangan yang harus diatasi adalah memelihara dan meningkatkan kondisi jalan menjadi baik untuk mendorong percepatan kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Malinau.

Sementara, jumlah kendaraan di Kabupaten Malinau terus meningkat setiap tahun dan jenisnya didominasi oleh Mobil Barang Bukan Umum. Pada tahun 2020 terdapat 81.629 unit Mobil barang Bukan Umum. Tantangan yang harus diatasi adalah pembangunan jalan, penataan lalu lintas dan penyediaan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 2.38
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah

Di Kabupaten Malinau 2019-2021 (km)

Jenis Jalan	2019	2020	2021
1. Jalan Negara	0	0	0
2. Jalan Provinsi	0	0	0
3. Jalan Kabupaten	1.043,20	1.043,20	1.043,20
Jumlah	1.043,20	1.043,20	1.043,20

Sumber: BPS Malinau 2022

Tabel 2.39
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Malinau 2019-2021 (km)

Jenis Permukaan	2019	2020	2021
aspal	168,99	167.42	165,61
Kerikil	224,20	231,77	440,67
Tanah	650,00	644,01	636,92
Lainnya	0	0	0
Jumlah	1.043,20	1.043,20	1.043,20

Sumber: BPS Malinau 2022

Tabel 2.40
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Malinau 2019-2021 (km)

Jenis Permukaan	2019	2020	2021
Baik	68,06	72,02	111,36
Sedang	451,74	446,26	358,61
Rusak	113,84	116,50	222,18
Rusak Berat	409,56	408,43	351,06
Jumlah	1.043,20	1.043,20	1.043,20

Sumber: BPS Malinau 2022

Tabel 2.41
Jumlah Angkutan yang layak jalan menurut jensi Kendaraan di Kabupaten Malinau 2019-2021

Jenis Angkutan	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	97	97	97
Mobl Barang	158	168	161
Mobil Barang Bukan Umum	1.494	1.629	1.640
Mobil barang dinas	55	55	55
Mobil Bus Umum	14	14	14
Mobil Bus Bukan Umum	6	6	6
Mobil Bus Dinas	2	2	2
Kendaraan Khusu Bukan Umum	8	8	8
Kendaraan Khusus Dinas	3	3	3
Jumlah	1.837	1.982	1.986

Smber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.42
Jumlah Kendaraan Bermotor yang teregister menurut jenis kendaraan di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021

Jenis Angkutan	2017	2018	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	1.853	1.993	2.094	2.208	2.311
Bus	172	181	189	197	209
Mobil Beban	1.125	1.330	1.571	1.719	1.868
Sepeda Motor	20.864	22.516	23.813	24.785	25.673
Jumlah	24.014	26.020	27.667	28.909	30.061

Smber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

2. Telekomunikasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Pengembangan telekomunikasi dan informasi ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi; keterpaduan sistem telekomunikasi dan informasi; serta

keterjangkauan jaringan telekomunikasi dan informasi secara merata, murah, mudah dan cepat.

Kemajuan pengembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau menunjukkan peningkatan secara bertahap. di Kabupaten Malinau berdiri 3 operator handphone dan melayani wilayah kota dan kecamatan dan desa. Persentase rumah tangga menurut kepemilikan telepon relatif sedikit atau kurang dari 6 persen, sedangkan persentase rumah tangga yang memilii telpon seluler lebih dari 70 persen. Rumah tangga yang memiliki PC komputer dan lap top masih terbatas. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah perluasan jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

Tabel 2.43
Persentase Anggota Rumah tangga berusia 5 tahun keatas Menurut penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir di Kabupaten Malinau, 2017-2020

Penggunaan Teknologi Informasi	2017	2018	2019	2020
Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau komputer (PC/Dekstop, Laptop/Notebook, Tablet)	0	76,68	74,85	Na
Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	78,53	0	0	Na
Menggunakan Komputer (PC/Dekstop, Laptop/Notebook, Tablet)	31,19	0	0	Na
Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	65,51	70,63	0	Na
Mengakses Internet (termasuk Fecebook, Twitter, BBM, WhatSapp	28,81	43,40	40,53	Na

Sumber: BPS

Selain itu, terdapat 4 kantor pos di Kabupaten Malinau dimana 3 diantaranya adalah Kantor Pos Pasif atau hanya melakukan penerimaan surat dan pembelian matrai. Kantor pos aktif hanya terdapat di Kecamatan Malinau Kota. Disamping itu malinau juga memiliki 88 unit menara pemancar

Tabel 2.44
Jumlah Kantor Pos Pembantu menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018-2021

Kecamatan	2018	*2019*	*2020*	*2021*
1. Sungai Boh	-	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-	-
3. Kayan Hulu	1	1	1	1
4. Kayan Hilir	1	1	1	1
5. Pujungan	1	1	1	1
6. Bahau Hulu	-	-	-	-
7. Sungai Tubu	-	-	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-
9. Malinau Selatan	-	-	-	-
10. Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-
11. Mentarang	-	-	-	-
12. Mentarang Hulu	-	-	-	-
13. Malinau Utara	-	-	-	-
14. Malinau Barat	-	-	-	-
15. Malinau Kota	1	1	1	1
Jumlah	4	4	4	4

Sumber : Malinau Dalam Angka 2022

Tabel 2.45
Jumlah Menara dan Oeprator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondis Sinyal Telepon Seluler menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Menara BTS	Operator			
		Telkomsel	Indosat	Lainnya	Keterangan
Sungai Boh	5	2	2	-	1 (satu) TidakAktif
Kayan Selatan	4	3	1	-	
Kayan Hulu	4	4	-	-	
Kayan Hilir	5	5	-	-	
Pujungan	8	8	-	-	
Bahau Hulu	6	3	3	-	
Sungai Tubu	5	-	5	-	
Malinau Selatan Hulu	5	1	3	-	1 (Satu) tidakaktif
Malinau Selatan	3	1	2	-	
Malinau Selatan Hilir	5	2	3	-	
Mentarang	2	2	-	-	
Mentarang Hulu	7	2	5	-	
Malinau Utara	8	8	1	1	
Malinau Barat	9	8	2	1	
Malinau Kota	12	11	12	5	
Jumlah	88	4	39	7	

Sumber : Malinau Dalam Angka 2022

3. Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Penyediaan air bersih sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber air baku, pemeliharaan dan pembangunan jaringan distribusi air sampai ke desa dan kecamatan.

Terjadi kenaikan pada jumlah pelanggan air distribusi atau ledeng. Dibanding tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 7,5%. Sama halnya tahun 2020 pelanggan air distribusi didominasi oleh kecamatan Malinau Barat sebesar 4.258 orang, Malinau kota sebesar 3.897 orang dan Malinau Utara sebanyak 2.659 orang.

Tabel 2.46
Jumlah Pelanggan Air Menurut Kecamatan Tahun 2020-2021

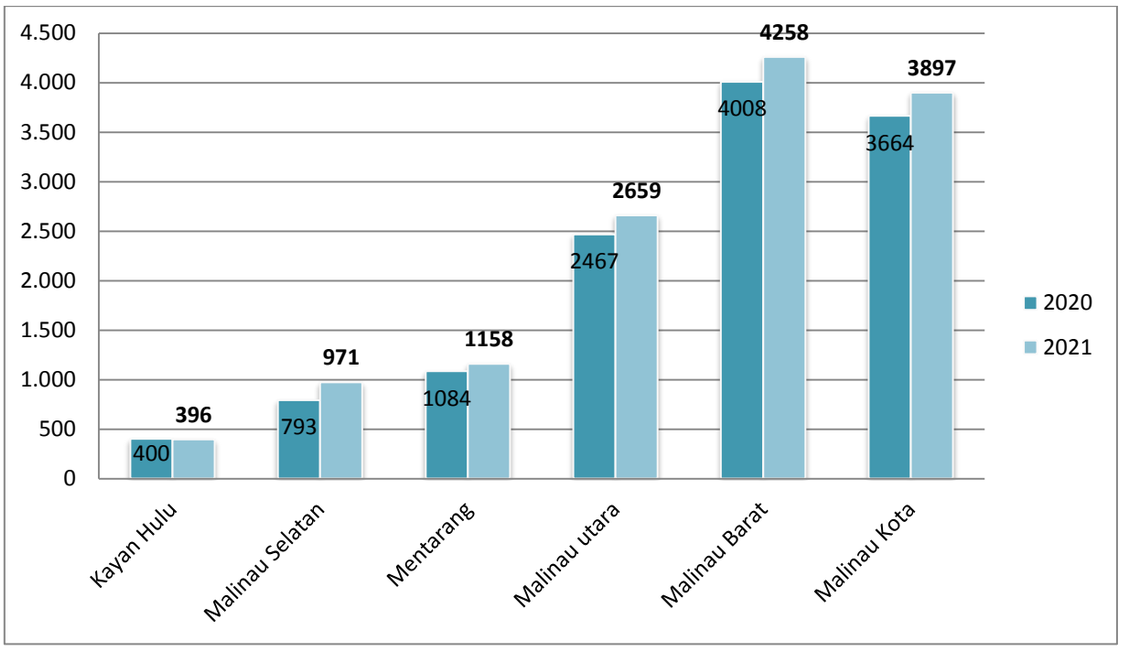

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

Pelanggan air PDAM pada tahun 2020 sebanyak 12.416 dengan Jumlah ari yang disalurkan sebanyak 3.933.769 dan Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pelanggan air minum sebanyak 13.339 dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 4.153.418. Tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, menjaga daya dukung lingkungan sebagai sumber air baku, serta membangun dan memperluas jaringan penyediaan air bersih untuk menjangkau seluruh desa.

Tabel 2.47
Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan Menurut pelanggan di Kabupaten Malinau 2020-2021

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan 2020	Nilai (Juta Rupiah)
1. Sungai Boh	-	-	-
2. Kayan Selatan	-	-	-
3. Kayan Hulu	400	68.276	190.207.463
4. Kayan Hilir	0	0	0
5. Pujungan	0	0	0

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan 2020	Nilai (Juta Rupiah)
6. Bahau Hulu	0	0	0
7. Sungai Tubu	0	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	0	0
9. Malinau Selatan	793	266.890	1.181.421,50
10. Malinau Selatan Hilir	0	0	0
11. Mentarang	1.084	263.053	842.969.578
12. Mentarang Hulu	0	0	0
13. Malinau Utara	2.467	764.697	3.560.304,02
14. Malinau Barat	4.008	1.334,704	7.382.210,73
15. Malinau Kota	3.664	1.126.146	6.616.993,82
Jumlah	12.416	3.933.769	9.774.107,12

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

Lanjutan Tabel

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan 2021	Nilai (Juta Rupiah)
1. Sungai Boh	0	0	0
2. Kayan Selatan	0	0	0
3. Kayan Hulu	396	73.020	193.925
4. Kayan Hilir	0	0	0
5. Pujungan	0	0	0
6. Bahau Hulu	0	0	0
7. Sungai Tubu	0	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	0	0
9. Malinau Selatan	971	312.313	1.201.308,36
10. Malinau Selatan Hilir	0	0	0
11. Mentarang	1.158	305.795	889.982.687
12. Mentarang Hulu	0	0	0
13. Malinau Utara	2.659	845.160	3.710.546,37
14. Malinau Barat	4.258	1.357.909	7.104.563,91
15. Malinau Kota	3.897	1.259.221	6.509.849,23
Jumlah	13.339	4.153.418	9.610.176,50

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2022

4. Listrik

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Pada tahun 2021 jumlah daya terpasang di Kabupaten Malinau mencapai 29.754,52 Mega Watt dengan total produksi sebesar 60.031,04 MWh selain itu jumlah listrik yang disalurkan mencapai 53.791,25 MWh. Penurunan dari Tahun sebelumnya diakibatkan adanya perubahan regulasi terkait penyaluran listrik di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.48
Daya Terpasang, Produksi,Distribusi dan Jumlah pelanggan PT.PLN (Persero) di Kabupaten Malinau 2017-2021

Tahun	Daya Terpasang (WM)	Produksi Listrik (MWh)	Listrik Terjual (MWh)	Dipakai Sendiri (WMh)	Susut/Hilang (MWh)
2017	31.988,49	54.692,61	51.818,19	-	2.874,42
2018	35.636,40	57.387,99	55.105,04	-	2.282,95
2019	39.748,30	63.793,65	61.071,17	-	2.722,48
2020	32.381,70	69.734,40	67.222,86	2.844,00	3.115,91
2021	29.754,52	60.031,04	53.791,25	4.788,00	na

Sumber : BPS, PT. PLN Rayon Malinau

Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah perluasan jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD yang terlampir dalam dokumen ini.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Adapun permasalahan daerah adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Angka Kemiskinan
2) PDRB Kabupaten Malinau bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih
3) Daya Saing kualitas SDM yang relatif masih Kurang
4) Belum optimalnya infrastruktur Daerah
5) Nilai Sakip RB masih Rendah
6) Masih Rendah kesadaran masyarakat untuk mejada kualitas lingkungan hidup

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.3.2.1 Pendidikan

a) Dinas Pendidikan
    1. Terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan
    2. Terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan
    3. Terbatasnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan belum berkembangnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau

2.3.2.2 Kesehatan

a) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    1. Belum optimalnya layanan kesehatan yang komprehensif dan

terintegrasi pada setiap fase siklus kehidupan

2. Capaian indikator bidang P2P masih rendah
3. Masih terdapat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar
4. Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD masih belum optimal
5. Belum optimalnya kualitas SDMK
6. Masih rendahnya ketersediaan alat kesehatan di fasilitas kesehatan
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kantor masih belum maksimal

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kondisi permukaan jalan sebagian besar masih berupa tanah aggregat.
2. Kondisi luas wilayah yang sangat besar dan topografi yang berkultur tinggi.
3. Tingginya pembiayaan untuk pembangunan/ rekonstruksi dan pemeliharaan/ preservasi, dikarenakan jarak yang jauh dan keterbatasan akses yang tersedia.
4. Belum optimalnya sistem pengawasan bangunan
5. Belum optimalnya pembinaan konstruksi.
6. Revisi RTRW yang belum diselesaikan.
7. Belum adanya dokumen sebagai turunan dari RTRW (RDTR)
8. Belum optimalnya pemberian pelayanan terkait dibidang perizinann tata ruang
9. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perpipaan.
10. kondisi sapras sumber air baku yang belum baik
11. Belum optimalnya ketersediaan sistem drainase lingkungan dan kawasan.
12. Masih adajaringan irigasi yang rusak.
13. Panjang jaringan irigasi yang masih kurang
14. Banyak bidang tanah aset pemerintah daerah belum memiliki

alas hak.

15. Inventarisir alas hak dan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah terkendala karena faktor geografis sehingga sulit di jangkau
16. Ketersediaan plang identitas tanah Aset Pemerintah Daerah masih sanggat minim
17. Ketersediaan patok beton masih sangat minim.
18. Belum tersedianya pagar kawat berduri untuk pengamanan tanah aset.

2.3.2.4 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Belum Optimalnya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban dengan pelaksanaan patroli, pengamanan disetiap tempat serta pengawal pejabata dan kasus Covid19
2. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP yang bertugas di lapangan
3. Masih terbatasnya PPNS pada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada
4. Terbatasnya Pakaian Dinas Personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas di masa pandemi covid19 yang harus ganti setiap hari
5. Terbatasnya kendaraan operasional Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Yang ada dalam kondisi rusak dan usianya sudah tua)
6. Masih perlu pembinaan tenaga linmas yang terlatih
7. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran
8. Terbatasnya Mobil Damkar yang tersedia dan WMK yang belum terpenuhi sarana dan prasarananya
9. Masih kurangnya petugas pemadam kebakaran yang memiliki kualifikasi sebagai petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan dasar
10. Masih Kurangnya Kendaraan Pemadam Kebakaran

11. Masih Kurangnya Posko Induk Pemadaman Kebakaran

2.3.2.5 Sosial

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   1. Belum maksimalnya partisipasi SKPD Teknis dalam memberi usulan pembangunan di kawasan perbatasan dimana dalam pendataan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di kawasan perbatasan terdapat beberapa SKPD yang tidak memberikan data usulan kegiatan yang diminta oleh BPBD
   2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bencana
   3. Kurangnya peralatan penunjang tanggap darurat
   4. Kurangnya tenaga satgas penanggulangan bencana
   5. Minimnya Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

b) Badan Pengelola Perbatasan daerah
   1. Masih kurangnya partisipasi SKPD Teknis dalam memberi usulan pembangunan di kawasan perbatasan dimana setiap kami meminta usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di perbatasan ada SKPD yang tidak membalas permohonan penyampaian usulan kegiatan

2.3.2.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
   1. Dengan ditebitkannya Permenpa No. 04/2018 tentang Pedoman UPTD pelindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) sehinga perlu penyesuaian kembali kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang telah berjalan

2.3.2.7 Ketahan Pangan

a) Dinas Ketahanan Pangan
   1. Belum adanya Gudang dan Sarana Pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan
   2. Beberapa Distributor pada saat dilakukan pendataan belum memberikan data yang valid sesuai dengan jumlah yang dilihat secara visual dalam peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat
   3. Belum ada Distributor Penyalur Pangan Pokok yang di tunjuk Pemerintah Daerah
   4. Gejolaknya Harga Pangan terjadi akibat kurangnya Stok dan

terganggunya pasokan yang sering kali terjadi sehingga di perlukan informasi sebagai deteksi dini dan masukan dalam pengambilan kebijakan

5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyediaan pangan alternatif sebagai sumber karbohidrat lokal non beras
6. Masih kurangnya data dan informasi tentang cadangan pangan di tingkat masyarakat
7. Masih kurangnya pengawasan pembinaan di tingkat petani dan pedagang
8. Masih minimnya sarana dan prasarana ketahan pangan kabupaten
9. Masih terbatasanya cakupan wilayah pengambilan sempel, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pengawasan keamanan pangan segar.
10. Perlu ditentukan susunan ragam pangan yg didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama yg dilakukan melalui Analisis dan Survery PPH
11. Pengembangan Pangan Lokal sebagai Pangan Pokok yang dapat mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat

2.3.2.8 Lingkungan Hidup

a) Dinas Lingkungan Hidup

1. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL;
2. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
3. Masih belum tersusunnya instrumen lingkungan hidup (DDDTLH, RPPLH, dan KLHS);
4. Belum tersedianya data Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
5. Belum adanya profil Program Kampung Iklim (Proklim).
6. Belum adanya UPTD TPA Sempayang

7. Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.
8. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.
9. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
10. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan
11. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.
12. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL
13. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal
14. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.
15. Meningkatnya volume limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang belum dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3
16. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian
17. Belum adanya peraturan daerah tentang penetapan baku mutu kualitas lingkungan di Kabupaten Malinau
18. Belum tersedianya data pendukung untuk menghitung indeks kualitas lingkungan hidup
19. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah

20. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
21. Belum tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
22. Belum adanya sarana pendukung Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
23. Belum optimalnya sekretariat pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
24. Belum optimalnya pencapaian Program Nasional (Adiwiyata, Adipura dan Kalpataru);
25. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.
26. Belum tersedianya staf analis dilaboratorium sehingga menghambat operasional laboratorium;
27. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi yang dapat memberi pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan;
28. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja laboratorium secara maksimal;
29. Belum maksimalnya kerjasama laboratorium rujukan dengan Kabupaten Malinau.

2.3.2.9 Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
   1. Masih kurangnya tenaga teknis/fungsional aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
   2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen penting antara lain Akta kelahiran, KTP, KIA kependudukan yang menghabat dalam penginputan database kependudukan.
   3. Belum adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan Data kependudukan antar dinas kependudukan dan catatan sipil dengan pemerintah kecamatan untuk pemerintah desa dan Rukun tetangga.
   4. Terbatasnya sarana dan perasarana pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
   5. Kondisi wilayah geografis dan transportasi wilayah pedalaman

dan perbatasan menghambat pengumpulan data-data kependudukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.2.10 Pemberdayaan Masyarakat Desa

a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
    1. Kurangnya sumber daya aparatur
    2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes dan potensi yang ada di desa, sehingga dari 109 desa yang ada baru 33 desa yang sudah terbentuk

2.3.2.11 Perhubungan

a) Dinas Perhubungan
    1. Sarana & Prasarana Yang Tidak Maksimal dalam Mendukung Pelayanan

2.3.2.12 Komunikasi dan Informatika

a) Dinas Komunikasi dan informatika
    1. Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi seluler
    2. Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi seluler sebagai media penyebaran informasi
    3. Masih minimnya sarana pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
    4. Minimnya sarana dan prasarana serta lokasi yang jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten dan biaya yang tinggi
    5. Masih kurangnya peralatan pendukung dan SDM yang profesional

2.3.2.13 Penanaman Modal

a) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
    1. Kurangnya SDM Aparatur
    2. Belum tersedianya sarana pelayanan publik sesuai standar minimal
    3. beberapa peraturan daerah tentang pelayanan perizinan, penanaman modal yang masih dalam proses penyusunan sehingga menghambat pelaksanaan kinerja
    4. beberapa regulasi perizinan yang belum dilimpahkan pada tupoksi perangkat daerah yang terkait.

2.3.2.14 Pemuda dan Olahraga

a) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
    1. Minimnya pemuda yang berwira Usaha dengan usai 16-30 tahun
    2. Kurangnya minat para pemuda untuk bergabung dalam wadah organisasi kepemudaan dan informasi tentang kegiatan organisasi kepemudaan
    3. Minimnya kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Sosial kepemudaan
    4. Belum adanya pembinaan kapasitas dan kapabilitas pelatihan setiap cabor dan wasit
    5. Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan karena terbatasnya anggaran

2.3.2.15 Kebudayaan

a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    1. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
    2. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Destinasi dan Daya Tarik Wisata
    3. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal

2.3.2.16 Kearsipan

a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
    1. Kurangnya minat baca masyarakat
    2. Kurangnya SDM Perpustakaan
    3. Kurang nya jumlah koleksi buku bacaan
    4. Belum terkelolanya Arsip aktif
    5. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan
    6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya arsip
    7. Jumlah SDM kerasipan masih sangat minim dan kurangnya pemahaman akan pentingya arsip
    8. Perlunya jaringan informasi kearsipan pendukung kinerja kearsipan

2.3.2.17 Kelautan dan Perikanan

a) Dinas Perikanan

1. Masih lemahnya koordinasi internal dan eksternal organisasi
2. Proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan belum berjalan sebagaiamana mestinya
3. Ketersediaan perlatan kerja dan perlengkapan pendukung relatif masih kurang
4. Kurangnya sarana dan prasarana pembudidaya ikan
5. Pemenuhan benih ikan belum terpenuhi
6. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan masih kurang
7. Sarana dan prasarana masyarakat Nelayanan belum memadai
8. Belum adanya Tempat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Malinau
9. Sumberd daya manusia masih kurang
10. Belum memahani peran dan fungsi kelompok sebagai wahana

2.3.2.18 Pertanian

a) Dinas Pertanian

1. Masih Rendahnya Keterampilan dan pengetahuan petani dalam berbudaya pertanian secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem pertanian terpadu
2. Masih rendahnya minat petani untuk bergabung dalam kelompok tani
3. Tidak ada Kelembagaan Penyuluhan (BPP dan Psluhdes)
4. Kurangnya komitmen untuk perekrutan PNS/P3K Pada Jabatan Pengawas Benih Tanaman, pengendalian organisasi pengganggu
5. Tumbuhan, pengawas mutu pakan, medik, veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, analisis pasar hasil pertanian
6. Masih Kurangnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan peningkatan kompetensi petugas pengulu lapangan (PPL) untuk setiap desa sebagai inovator penyebaran teknologi pertanian ramah lingkungan kepada petani untuk meningkat produksi dan produktivitas usaha tani dan menaikkan kelas kemampuan tani
7. Kurangnya pembinaan terhadap pemuda tani dalam menggunakan alat dan mesin petanian
8. Kurangnya pengenalan teknologi informasi pertanian kepada petani melalui kelompok tani

2.3.2.19 Perindustrian

a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Kurangnya pengetahuan pengurus koperasi dalam menyusun laporan RAT Koperasi serta banyaknya Koeprasi yang tidak aktif
2. Masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki Ijin Usaha.
3. Kurangnya modal usaha sehingga pelaku usaha mikro sulit untuk mengembangkan usahanya.
4. Pembinaan dan Pendataan UMKM di Kecamatan Perbatasan biasanya hanya sampai di desa ibu kota Kecamatan dikarenakan untuk menjangkau semua Desa di Kecamatan Perbatasan memerlukan biaya yang Besar.
5. Belum terpenuhi alat ukur yang beredar di masyarakat sesuai dengan standart serta Belum adanya UPTD Kemetrologian dan tenaga teknis untuk pelaksanaan Tera Ulang
6. Terjadi lonjakan harga barang tertentu pada saat menjelang hari raya besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal yang masih belum teratasi dengan maksimal.
7. Masih belum maksimal pengawasan barang beredar serta kesadaran pengusaha toko dengan seringnya ditemukan barang yang telah kedaluwarsa/expire date di beberapa toko.
8. Perlunya peningkatan sarana dan prasaranana pasar induk maupun pasar tradisional yang lebih refresentatif.
9. Perlu dibangun pasar di wilayah perbatasan untuk mengakomodir produk hasil bumi masyarakat setempat agar bisa dipasarkan.
10. Keamanan dan Ketertiban para pedagang pengguna fasilitas pasar perlu pembinaan dan pengawasan sehingga terciptanya pasar yang sehat, bersih dan indah.
11. Pembinaan para pedagang pasar di Kecamatan Perbatasan belum memadai dikarenakan untuk menjangkau semua Pasar di Kecamatan Perbatasan memerlukan biaya yang tidak sedikit.
12. Petugas kebersihan DLH yang ditempatkan di pasar induk hanya membersihkan jalan protokol hingga di dalam pasar menjadi kumuh dan kotor, untuk itu dibutuhkan tenaga

kebersihan khusus dalam pasar agar pasar lebih bersih.

13. Pembinaan dan pemutahiran data IKM di 15 Kecamatan tidak bisa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga untuk data IKM yang tidak bisa didata pada tahun berjalan dipakai data tahun sebelumnya.
14. Keterangan yang diberikan pelaku IKM mengenai jumlah investasi dan jumlah produksi kadang tidak benar serta Sebagian besar IKM belum memiliki ijin sehingga menghambat pendataan dan pertambahan jumlah industri kecil dan menengah.
15. Belum adanya pedoman dalam pembangunan Industri di Kabupaten Malinau
16. Adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan industri sehingga kegiatan industri harus dikumpulkan pada suatu daerah sehingga lebih mudah dalam menangani limbah

2.3.2.20 Sekretariat

a) Sekretariat Daerah

1. Uraian Tugas Bagian & Sub Bagian masih sangat umum sehingga mengakibatkan multitafsir dan overlap kegiatan antar bagian (Permendagri No. 56 Tahun 2019)
2. Dokumen Perencanaan baik RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, RKT, IKU dan Perjanjian Kinerja OPD belum selaras/sinkron
3. Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai (Setkab)
4. Laporan Bulanan Belanja Langsung dari OPD selalu terlambat (Bag. Adpem)
5. Terjadinya penumpukan berkas SPP belanja langsung dibulan Desember (Bag. Adpem)
6. Proses penginputan kegiatan ke SIRUP oleh PPK sering terlambat dan terbatasnya pemahaman PPK dan PPTK terhadap tahapan lelang/tender kegiatan (Bagian PBJ)
7. Terbatasnya KPA atau pejabat eselon yang memiliki kualifikasi sebagai PPK
8. Pegawai penerima Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tidak memahami tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019

b) Sekretariat Korpri

1. Belum optimalnya hubungan kerjasama mengenai usaha dan kesejahteraan anggota KORPRI dengan lembaga lain
2. Kurangnya koordinasi, pembinaan serta monitoring pada tingkatan kepengurusan KORPRI guna menyamakan persepsi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana, SDM sehingga pelaksanaan Tupoksi pada Sekretariat Korpri tidak berjalan lancar

2.3.2.21 Kecamatan

a) Kecamatan Malinau Kota

1. SDM Aparatur dengan kemampuan teknis tertentu perlu ditingkatkan sebagai penunjang tugas dalam pembangunan;
2. Belum Optimalnya pemanfaatan asset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi
3. Masih lemahnya koordinasi/konsultasi pembangunan yang dilakukan baik ditingkat Desa, RT, dan Instansi terkait dengan pihak Kecamatan
4. Dukungan anggaran yang belum memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintah Kecamatan

b) Kecamatan Malinau barat

1. Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai;
2. Kurangnya tenaga PNS yang bekerja di kantor Kecamatan Malinau Barat
3. Kurangnya koordinasi dan informasi dari desa terkait permintaan data dari Kecamatan
4. Masih rendahnya SDM aparatur Desa
5. Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan lintas sektoral, OPD terkait tidak berkoordinasi dengan Kecamatan

c) Kecamatan Malinau Utara

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat (Partisipasi) salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan
2. Partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah ditingkat bawah
3. Faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi kecamatan SDM, anggaran, Saranan dan Prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan belum optimal.

4. Keterbatasan anggaran dan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja mengakibatkan masih ada program/kegiatan yang belum jelas indikator capaianya serta dengan angaran yang kurang memadai menjadikan alokasi angggaran per Program/kegiatan tidak didistribusi dengan dengan baik seperti program-program dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

d) Kecamatan Pujungan

1. Kurang maksimalnya akses informasi terkait pembangunan daerah (perlunya jaringan telekomunikasi yang berbasis internet cepat)
2. Informasi melalui media elektronik sangat diperlukan hingga ke desa sehingga perlu perhatian khusus dalam pembangunan
3. Masalah akses transportasi antar desa maupun antar kecamatan dan kabupaten masih minim dan perlu ditingkatkan
4. Potensi unggulan yang ada di wilayah kecamatan pujungan antara lain : potensi wisata alam & budaya, hasil hutan dan pengrajin pandai besi maka perlu pembinaan dan pelatihan
5. Memerlukan tambahan asn baik staf maupun pejabat karena terdapat kekosongan pada jabatan.
6. Perlu perhatian khusus dari opd terkait untuk objek wisata & budaya, hasil hutan dan pengrajin pandai besi yang ada di pujungan

b) Kecamatan Bahau Hulu

1. Kurangnya akses informasi terkait pembangunan daerah(perlunya jaringan telekomunikasi berbasis internet) untuk kantor camat.
2. Akses transportasi antar desa maupun antar kecamatan dan kabupaten yang perlu ditingkatkan

3. Potensi unggulan yang ada di wilayah kecamatan bahau hulu antara lain : potensi wisata alam & budaya, komoditi pertanian / perkebunan dan hasil hutan (bawang merah, lada, kayu manis, kopi, rotan , kayu gaharu dll) terkendala pada pemasarannya.
4. Memerlukan tambahan asn baik staf maupun pejabat karena terdapat kekosongan pada jabatan
5. Perlunya penambahan anggaran untuk kegiatan kantor

c) Kecamatan Kayan Hulu
   1. Sarana dan Prasarana Penunjang kerja kurang memadai;
   2. Kurangnya Kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya
   3. Letak Geografis yang jauh dari Ibu kota Kabupaten sehingga menghambat proses keuangan

d) Kecamatan Malinau Selatan Hulu
   1. Uraian tugas seksi & sub bagian masih sangat rendah umum sehingga mengakibatkan multitafsir dan overlap kegiatan antar bagian.
   2. Sarana dan prasarana kerja kurang memadai
   3. Kurangnya koordinasi dari beberapa desa terkait permintaan data dari kecamatan
   4. Dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektoral, OPD terkait tidak berkoordinasi dengan kecamatan.

d) Kecamatan Malinau Selatan Hilir
   1. Terbatasnya akses jalan menuju kekantor camat malinau selatan hilir
   2. Tidak adanya aliran listrik dikantor camat malinau selatan hilir
   3. Tidakadanya akses komunikasi dikantor camat malinau selatan hilir
   4. Tidak adanya air bersih dikantor camat malinau sekatan hilir
   5. Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai
   6. Kurangnya koordinasi dari beberapa desa terkait permintaan data dari kecamatan

e) Kecamatan Mentarang Hulu

1. Kuantitas SDM Aparatur masih rendah
2. Sarana dan prasarana Transportasi masih terbatas
3. Letak geografis Desa-Desa yang berjauhan menghambat pelayanan pada masyarakat
4. Wilayah Kecamatan Mentarang Hulu Terpencil dan Eksrim Perlu ada Kebijakan Tambahan Tunjangan Khusus/Tunjangan Resiko Daerah Terpencil

f) Kecamatan Sungai Tubu
1. Sarana dan Prasaran Pendidikan mulai dari Gedung dan tenaga pendidik yang masih kurang
2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan penghubung antar desa dan kecamatan belum dapat diakses dengan maksimal
3. Sarana dan prasarana pertanian, Mulai dari Handtractor dan Alsintan di beberapa desa belum terpenuhi

g) Kecamatan Malinau Selatan
1. Kurangnya Personil di Kantor Kecamatan Malinau Selatan, Sehingga banyak Tenaga yang Merangkap Tugas Lain untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Malinau Selatan
3. Kurangnya koordinasi dari beberapa desa terkait pelaksanaan pembangunan di wilayah Kec. Malinau Selatan

h) Kecamatan Kayan Selatan
1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi dan konsultasi dalam wilayah Kecamatan baik antar Kecamatan-Desa, Desa-Desa maupun keluar dengan Kabupaten terkait koordinasi/konsultasi kewilayahaan dan informasi-informasi tentang perencanaan pembangunan. Penyebabnya ialah belum memadainya fasilitas pendukung pelayanan yang ada di kecamatan seperti Akses Transportasi, Sumber Daya Listrik dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi.
2. Tugas pelayanan publik berupa pelayanan administrasi dan data dalam kesekretariatan belum optimal yang disebabkan jumlah Pegawai yang ada masih belum memadai/kurangnya staf.

3. Belum Optimalnya jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
4. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. membutuhkan dana yang besar.
5. Penguasaan tupoksi masih kurang. Penyebabnya selain faktor personal, yaitu karena kurangnya penguatan kualitas SDM Aparatur melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan atau Pelatihan.

i) Kecamatan Kayan Hilir

1. Adanya Pejabat Setruktural yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Administrator
2. Kurang memadai sarana dan prasarana perangkat komputer bagi pegawai Kantor Camat Kayan Hilir
3. Terbatasnya Akses Internet di Wilayah Kecamatan Kayan Hilir.
4. Adanya Desa yang sulit dijangkau dengan Transportasi Data (Desa Long Sule dan Long Pipa)

2.3.2.22 Pengawasan

a) Inspektorat

1. Jumlah SDM masing kurang
2. Saran dan prasarana aparatur belum memadai
3. Belum ada pedoman audit kinerja
4. Belum optimalnya OPD dalam membuat Risk Register dan Laporan Rencana Tindak Pengendalian. Sesuai data hanya 16 OPD dari 53 OPD yang telah melaksanakan pelaporan
5. APIP belum mengikuti diklat terkait
6. Belum terdapat pedoman reviu LKjLP dan reviu RKA
7. Belum terdapat pedoman kegiatan konsultasi

2.3.2.23 Perencanaan

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

1. Mekanisme perencanaan yang belum lancar
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit dipredikasi

5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kotnribusi pada pencapaian sasarand daerah
6. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan
7. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

a) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melapor sendiri dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar (*Self Asessment*) belum maksimal
2. Penarikan pajak kepada Wajib Pajak berdasarkan besaran pajak/berdasarkan jabatan (*Official Asessment*) seperti pemasang Reklame pada beberapa warung belum dilakukan

2.3.2.24 Kepegawaian

a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Formasi penyusunan formasi pegawai yang selalu berubah dalam penyusunan kebutuhan
2. Kurang tersedianya alokasi dana untuk diklat struktural yang menyebabkan masih banyak pejabat yang belum mengikuti dikalt pimpinan
3. Tidak tersedia anggaran untuk diklat teknis fungsional sehingga tenaga kesehatan menggunakan biaya pribadi untuk diklat teknis dibidangnya terutama untuk uji kompetensi
4. Data PNS pada SIMPEG tidak Sinkron dengan DUK OPD
5. Keterlambatan proses pengusulan kenaikan pangkat, dikarenakan keterlambatan penyerahan berkas dari OPD-OPD yang melebihi batas waktu yang telah ditetapakan
6. Kurangnya pemahaman secara menyeluruh tentang penjatuhan disiplin PNS oleh OPD sesuai PP No. 53 tahun 2010
7. Keterlambatan proses kenaikan pangkat dan pensiun dikarenakan ketergantungan kelancaran sistem jaringan online SAPK dan verifikasi berkas di BKN Regional VIII

2.3.3 Isu Strategis Tahun 2023

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan dan analisis lingkungan organisas baik internal maupun eksternal, maka Isu Strategis Kabupaten Malinau 2023 adalah :

1. Meningkatnya Angka Kemiskinan
2. PDRB Kabupaten Malinau bertumpuh Pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih
3. Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19
4. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
6. Tuntutan Publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
7. Pelestarian Lingkungan Hidup dan pengendalian Perubahan Iklim

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian global mempengaruhi perekonomian Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Amerika Serikat dan China adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian terlebih negara berkembang. Apapun yang terjadi di kedua negara tersebut pasti akan mempengaruhi dunia.

Diberlakukan lockdown di Shanghai dan Beijing akibat meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron dan kebijakan zero Covid di China akan mengganggu rantai pasok, yang separuh dampaknya akan berimbas terhadap negara-negara lain di dunia. Dalam hal ini, akan berdampak langsung terhadap permintaan komoditas dan bahan baku, komoditas penting banyak dipasok dari China.

Disisi lain Ekonomi Amerika Serikat berkinerja sangat baik diawal tahun hingga maret 2022, bahkan menurut sebagian besar perkiraan, Amerika Serikat akan memiliki pertumbuhan yang kuat di tahun 2022 ini. Pasar tenaga kerja tumbuh secara luar biasa secara historis dan ke titik di mana demand dan supply pekerja berada pada titik yang seimbang. Sedangkan efek langsung tensi geopolitik Rusia-Ukraina terhadap ekonomi AS sangat minim, namun berimbas terhadap naiknya inflasi di negara tersebut. Pada situasi terakhir Perekonomian Amerika Serikat masih menunjukkan ketahanan walaupun sejumlah kalangan memproyeksikan AS akan mengalami ancaman pelemahan ekonomi bahkan resesi akibat perang Rusia dan Ukraina yang hingga kini belum ada tanda-tanda penyelesaian dan ekonomi yang tertekan akibat suku bunga tinggi.

Terhadap Ekonomi Global Perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Jika perang di Ukraina berlangsung berkepanjangan hingga tahun 2023, beberapa negara mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi bahkan resesi. Meningkatnya situasi ketegangan politik dan perekonomian global mengakibatkan meningkatnya gejolak sektor keuangan dan terganggunya *global supply chain*, mempengaruhi peningkatan harga komoditas antara lain Minyak dunia (ICP), CPO, Minerba,Gas, Komoditas Pangan,Harga bahan pokok dan harga komoditas lainnya. Ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat lebih tinggi dan

tingkat keyakinan konsumen yang turun akan memperburuk tekanan inflasi yang sudah tinggi.

Dampak negatifnya terhadap Indonesia Subsidi energy meningkat sebagai dampak peningkatan harga listrik,BBM dan LPG. Belanja pembayaran utang meningkat akibat depresiasi Kurs. Inflasi meningkat, daya beli menurun. Disisi lain dampak positif terhadap fiscal Indonesia meningkatnya penerimaan Negara yang berasal dari PPh Migas dan PNBP SDA.

Memasuki tahun 2022, Ekonomi Indonesia mulai pulih dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif prospek ekonomi di 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Kondisi ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat imbas dilonggarkannya pembatasan sosial. Pemerintah tetap menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik pada tahun ini walaupun ditengah gejolak ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia bisa naik dalam kisaran 5,0%-5,5% sepanjang 2022. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran yang tak jauh berbeda, yakni 4,5%-5,3% pada 2022.

Ada berbagai indikator awal yang menunjukkan pada kuartal I/2022, pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut, terutama didukung baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2022 berada pada kisaran 4,5 – 5,2 persen (yoy). Berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak baik bagi kinerja APBN di awal 2022. Kinerja positif APBN diharapkan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya.

Aktivitas perekonomian pada bulan Januari hingga April kuat, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Indeks PMI (*Purchasing Manager's Index*) Indonesia tercatat 51,9, meningkat dibanding Maret 2022 (51,3) dan tetap melanjutkan tren ekspansif. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan dalam negeri dan ekspor.

Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terlihat menurun di Maret 2022. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Keyakinan

Konsumen (IKK) pada Maret 2022 sebesar 111,0, yang turun dari 113,1 pada Februari 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan, IKK Maret 2022 masih berada pada zona optimis, yakni di atas 100. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2022 meningkat tercatat sebesar 113,1 lebih tinggi dari 111,0 pada Maret 2022. Angka ini berada di level optimis, dan turut mendorong aktivitas ekonomi.

Inflasi IHK April 2022 tercatat 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan Maret yang sebesar 2,64% (yoy). Peningkatan inflasi bulan April utamanya didorong oleh peningkatan harga energi dan peningkatan mobilitas masyarakat. Meskipun peningkatan tergolong moderat, tantangan terkait kenaikan tekanan inflasi yang berlanjut ke depan juga memiliki risiko pada perekonomian Indonesia.

Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di awal Tahun 2022 dan diharapkan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berdampak signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting. Momentum pemulihan ke depan perlu di jaga dengan tetap waspada terhadap berbagai risiko.

Berdasarkan kondisi perekonomian diatas Pemerintah merumuskan arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(a) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur

ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

(b) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

(c) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

Sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir Tahun 2023, antara lain:

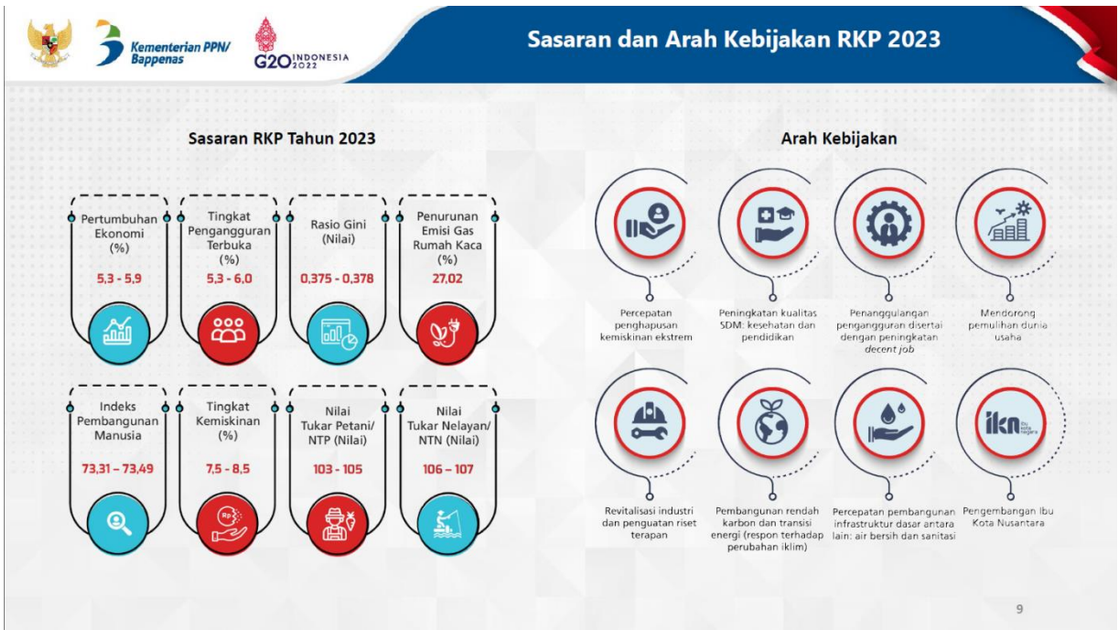

Gambar 3.1
Sasaran dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023

Untuk lebih jelas sasaran dan target pembangunan nasional pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator Makro	Target 2021	Capaian 2021	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	3,69	5,3-5,9
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,2-9,7	9,71	7,0-8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,7-9,1	6,49	5,3-6,0
Ideks Pembangunan Manusia (nilai)	72,78-72,95	72,29	73,29-73,35
Ginie Ratio (nilai)	0,377-0,379	0,381	0,375-0,378

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2023, Bappenas, 2022

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara

Kondisi perekonomian yang mendasari perumusan arah kebijakan ekonomi Kalimantan Utara dapat digambarkan dengan beberapa indikator makro diantaranya: Laju pertumbuhan ekonomi,tingkat inflasi, Persentase Penduduk Miskin, Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia.

Perekonomian Kaltara pada triwulan IV 2021 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan IV 2021 tercatat 7,08% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 5,24% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kaltara lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat tumbuh 5,02% (yoy). Tren positif pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara terjadi sepanjang tahun 2021. Meski dalam kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi masih bisa tumbuh positif dan mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen (c-to-c) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Peran Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) atau Kawasan Industrial Park Indonesia yang dibangun di Bulungan diprediksi bakal berdampak. KIPI bakal memiliki *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara.

Indeks keyakinan konsumen masyarakat pada triwulan-IV 2021 meningkat 19,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukan adanya pemulihan ekonomi yang membaik dimana daya beli masyarakat juga semakin tinggi sehingga mendorong tumbuhnya kategori perdagangan.

Pada tahun 2022 Perekonomian Kaltara diperkirakan tumbuh dalam range 4,43%-5,43% (yoy). Peningkatan kinerja pada lapangan usaha utama terutama pertambangan dan perdagangan diperkirakan dapat memacu akselerasi kinerja investasi, ekspor dan konsumsi RT. Lapangan usaha pertambangan diperkirakan masih akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi Kaltara sepanjang tahun 2022 seiring dengan cerahnya prospek harga komoditas batubara menurut konsensus dari World Bank.

Tingginya tekanan inflasi Kaltara pada triwulan IV 2021 sejalan dengan adanya peningkatan *demand* masyarakat pada *festive moment* Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta adanya pembatalan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah pada akhir tahun 2021. Inflasi Kaltara tercatat sebesar 2,73% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,37% (yoy).

Inflasi Kaltara tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, tetapi tetap terkendali dalam sasaran inflasi 3±1%. Meningkatnya tekanan inflasi Kaltara pada tahun 2022 diperkirakan akibat mulai meningkatnya *domestic demand* seiring dengan penurunan level PPKM pada pada awal tahun 2022. Selain itu, adanya momen besar ataupun HBKN Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta perayaan-perayaan seperti HUT Kaltara, festival budaya Iraw, serta Nataru menjadi faktor penyebab meningkatnya tekanan inflasi pada 2022.

Untuk lebih lengkapnya kondisi perekonomian Kalimantan Utara dapat digambarkan dengan beberapa indikator makro dibawah ini disertai target tahun 2023, masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 2023

Indikator Makro	Target 2021	Capaian 2021	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7 - 7,04	3,98	5,36-6,26
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,51	6,83	6,70-6,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26	4,58	4,45
Ideks Pembangunan Manusia (nilai)	71,4	71,91	71,41
Ginie Ratio (nilai)	0,280	0,285	0,283

Sumber: Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltara Tahun 2023

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Malinau

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Malinau dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro capaian tahun 2021, proyeksi Tahun 2023 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2023. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan

agar arah pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

A. Kondisi Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan bagian yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Untuk itu perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Beberapa indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Inflasi dan Indeks Gini. Berikut penjelasan kondisi masing-masing indikator tersebut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Semakin meningkatnya PDRB setiap tahunnya mencerminkan semakin pesat pula arus perekonomian di suatu wilayah tersebut. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017–2021 dapat dilihat pada 3.3. dibawah ini :

Tabel 3.3
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau tahun 2017-2021 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019r	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.033,60	1.076,08	1.168,90	1.278,36	1.420,13
B	Pertambangan dan Penggalian	4.151,55	4.618,15	5.294,14	5.358,41	6.021,15
C	Industri Pengolahan	243,40	259,02	275,86	288,05	312,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	3,26	3,86	4,47	4,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	6,33	7,17	8,54	9,75
F	Konstruksi	1.317,27	1.462,40	1.715,32	1.919,64	2.002,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	342,06	386,47	444.,15	491,93	575,97
H	Transportasi dan Pergudangan	260,62	300,68	337,51	346,15	366,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,04	171,92	195,04	204,40	246,62
J	Informasi dan Komunikasi	26,91	30,49	34,98	40,46	48,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,21	21,07	22,55	24,53	29,13
L	Real Estat	19,86	22,19	26,67	26,19	29,47
M,N	Jasa Perusahaan	13,38	14,31	15,94	17,35	19,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	606,31	649,10	696,92	713,20	760,18
P	Jasa Pendidikan	196,43	216,00	238,13	257,41	282,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,40	120,63	135,65	159,24	184,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,90	6,70	7,55	8,98	10,73
PDRB		**8.497,62**	**9.364,80**	**10.618,38**	**11.147,29**	**12.323,48**

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau 2021
Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

b. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2017 – 2021) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian;

lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Malinau. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Malinau pada tahun 2021 dihasilkan yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapat 48,29 persen.

Berikut lebih jelas dapat dilihat pada gambar Grafik dibawah ini :

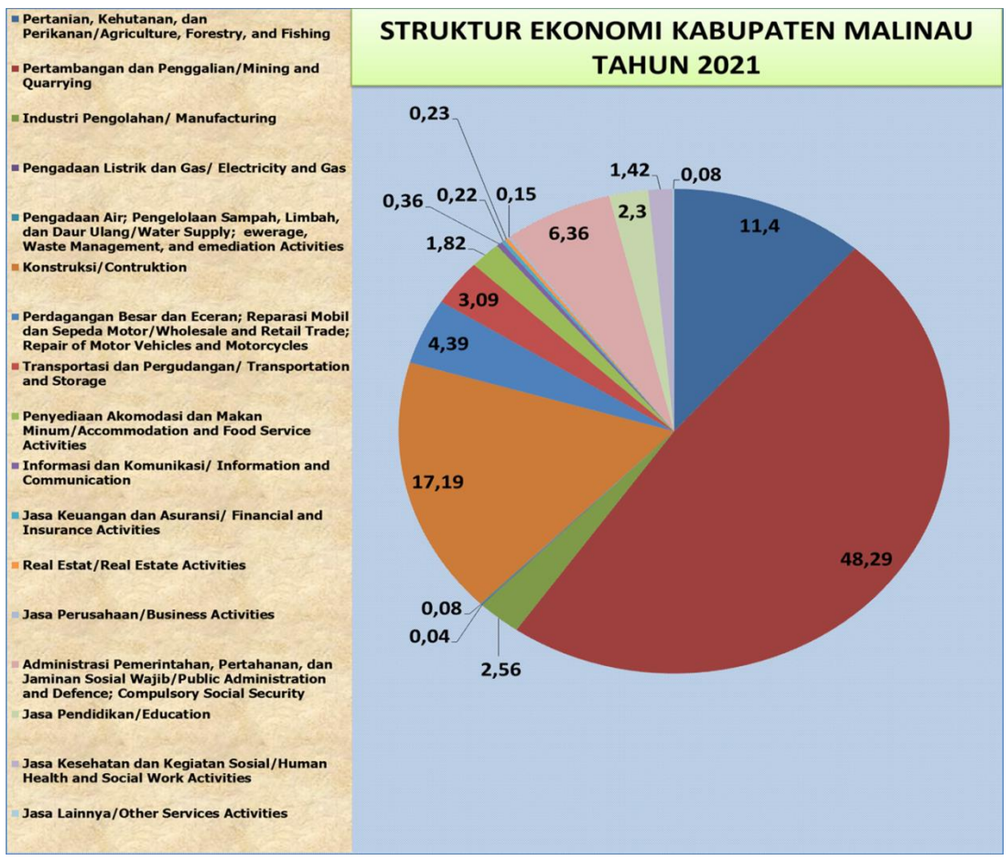

Gambar 3.2
Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2021
Sumber: *BPS Kabupaten Malinau 2022*

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Adanya pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 sangat memengaruhi kondisi perekonomian global,Nasional termasuk Kabupaten Malinau. Perekonomian Kabupaten Malinau pada tahun 2020 berada pada nilai yang negatif. Namun tahun 2021 kembali membaik hingga dapat mencapai 4,7 %. Berikut disajikan Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau tahun 2018-2021:

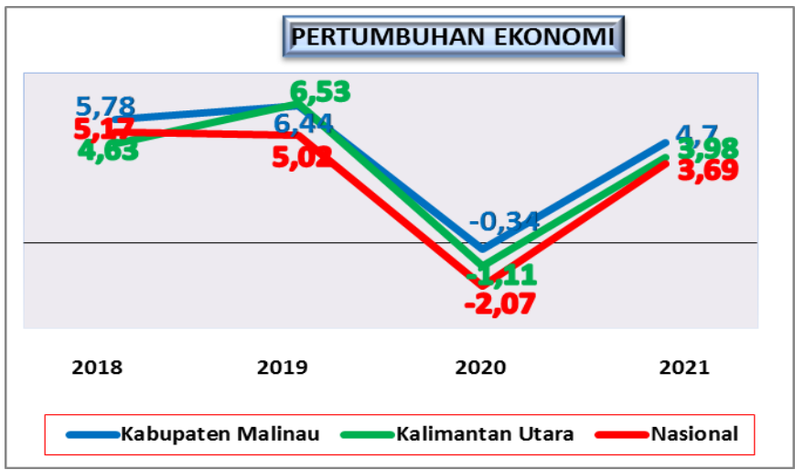

Gambar 3.3
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2021
Sumber: *BPS Kabupaten Malinau 2022*

c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, akan tetapi alibat pandemi dimana secara umum di seluruh Indonesia mengalami peningkatan penduduk miskin akibat pandemi Covid 19, Kabupaten Malinaupun terkena dampaknya di Tahun 2021, penduduk miskin meningkat sebesar 0,5 persen dari tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Malinau masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara dimana penduduk miskin Malinau kedua tertinggi persentasenya di Kalimantan Utara. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut :

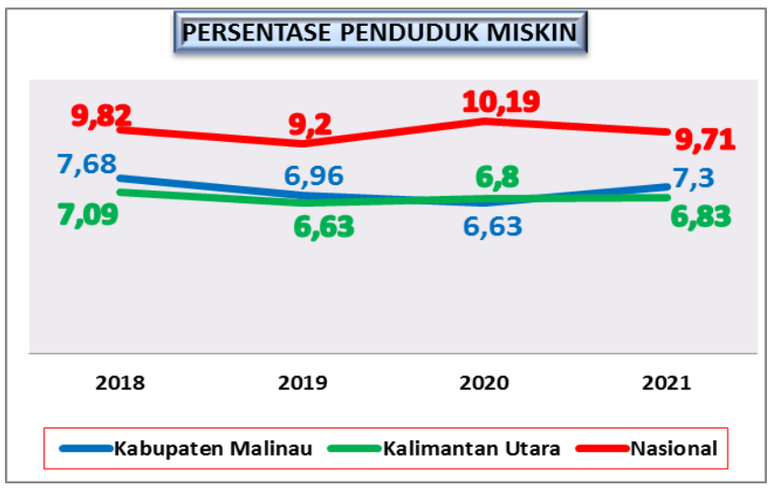

Gambar 3.4
Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021
Sumber: *BPS Provinsi Kaltara 2022*

d. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk atau dengan kata lain adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruh penduduk.

Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Malinau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:

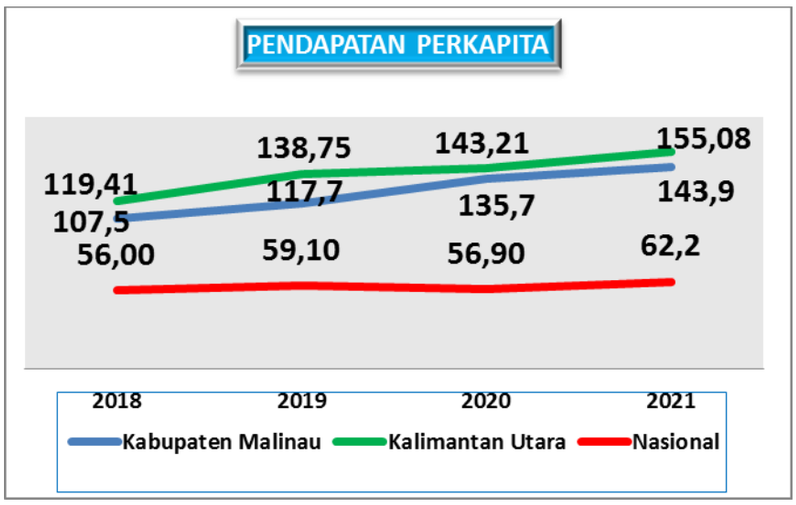

Gambar 3.5
Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021
Sumber: *BPS Provinsi Kaltara 2022*

e.Tingkat Penganganggguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,13 persen pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meluasnya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Malinau sejalan dengan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Malinau. Akan tetapi semenjak pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan terkena imbas yang cukup berat di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Malinau. Pandemi Covid-19 berdampak pada kenaikan pengangguran menjadi 5,08 persen pada tahun 2020 di Kabupaten Malinau. Pemerintah Pusat melakukan banyak kebijakan untuk mengatasi peningkatan pengangguran akibat pandemi COVID-19 ini. Terutama penyebab yang ditimbulkan dari akar masalahnya yakni kesehatan, dengan telah dimulainya vaksinasi diharapkan perlahan aktivitas ekonomi mejadi normal kembali , disamping program-program lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga permasalahan tingkat pengangguran juga dapat diatasi.

Lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar Grafik berikut :

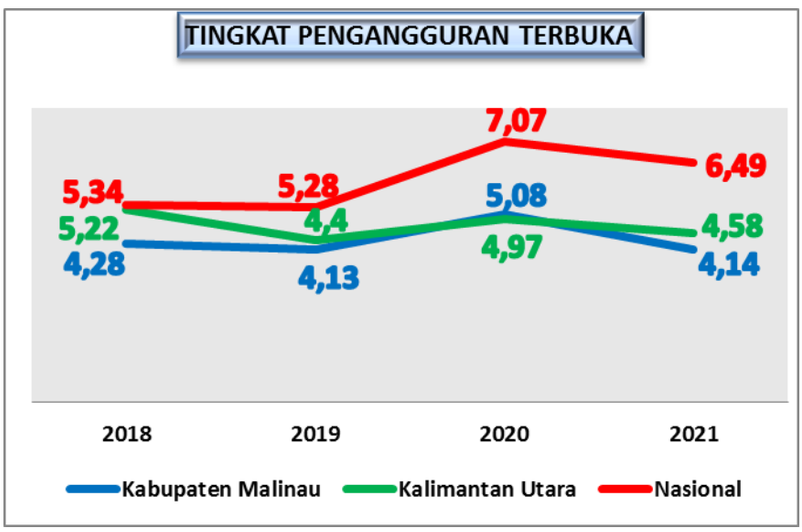

Gambar 3.6
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021
Sumber: *BPS Kabupaten Malinau 2022*

f. Inflasi

a. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus.

b. Salah satu bahan dasar dalam penghitungan inflasi adalah IHK/ Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan di daerah perkotaan. Oleh karena itu, BPS Kab. Malinau tidak melakukan perhitungan inflasi. Inflasi di Kabupaten Malinau merujuk pada inflasi kota Tarakan dan Tanjung Selor, kedua daerah ini sebagai daerah pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan titik distribusi barang di provinsi Kaltara yang mewakili pergerakan harga barang di level provinsi. Sehingga dari kedua kota tersebut indikator pergerakan harga sudah bisa dilihat, bila harga barang naik di tarakan dan Tanjung Selor atau ada pergerakan harga, maka hampir dapat dipastikan daerah sekitar yang mendapat distribusi barang dari kedua kota tersebut dipastikan juga naik.

g. Indek Gini

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

0,00 < G < 0,35 → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah

0,35 < G < 0,50 → pemerataan / ketimpangan sedang

G > 0,50 → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Berdasarkan data BPS Malinau indeks Gini Kabupaten Malinau tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Lebih lengkap sebagai berikut:

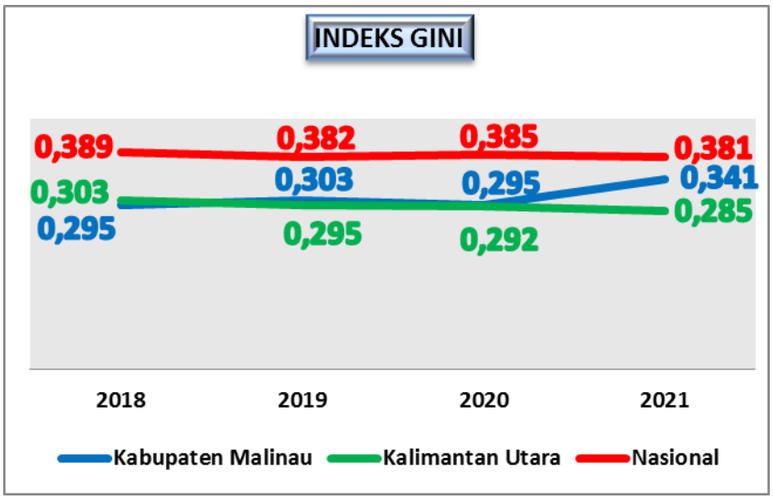

Gambar 3.7
Grafik Indeks Gini Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2021
Sumber: *BPS Kabupaten Malinau 2022*

h. Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Malinau dari waktu kewaktu mengalami kenaikan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

c.

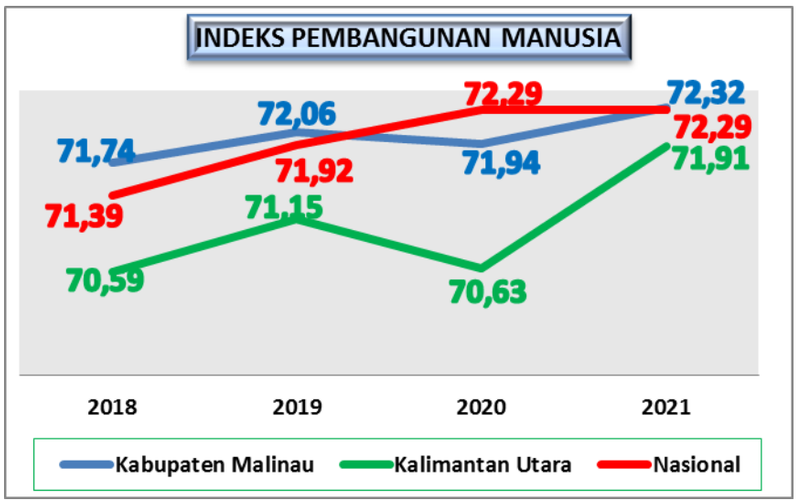

Gambar 3.8
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau
Tahun 2018-2021
Sumber: *BPS Kabupaten Malinau 2022*

B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2022-2023

Perekonomian nasional sudah pasti akan mempengaruhi tantangan dan prospek perekonomian daerah. Harga komoditas dunia melonjak tajam tahun ini akibat perang Rusia vs Ukraina. Hal ini menyebabkan inflasi meninggi dan suku bunga bergerak naik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional kemungkinan dapat melambat. Harga komoditas akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat industri. Saat harga bahan baku meningkat, harga jual ke konsumen akan ikut naik mengakibatkan inflasi meningkat.

Untuk merespons tekanan inflasi yang semakin kuat, bank sentral di berbagai negara sudah menaikkan suku bunga acuan. Hal ini dilakukan untuk meredam jumlah uang beredar dan menjangkar ekspektasi inflasi. Saat suku bunga makin tinggi, maka biaya ekspansi rumah tangga dan dunia usaha menjadi lebih mahal. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi sangat mungkin melambat. karena itu, Indonesia dihadapkan kepada tiga tantangan sekaligus yang harus diwaspadai yaitu inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang melemah.

Berbagai faktor eksternal tersebut diatas akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik tahun ini dan 2023 serta berimplikasi pada desain APBN ke depan dan pada akhirnya berimplikasi pada APBD. Oleh karena itu, harus tetap terus

mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di global dan nasional.

Selain tantangan diatas yang juga pasti berdampak sampai ke daerah, Pemulihan ekonomi Kabupaten Malinau di tahun ini masih dibayangi dengan berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah masih rentannya situasi Covid-19. Saat ini pandemi sudah mulai memasuki masa endemik, tetapi sifatnya masih riskan dan rentan. semakin menurunnya antusiasme penduduk Indonesia mendapatkan vaksin, padahal vaksin merupakan hal utama dalam menangani pandemi. Penurunan ini bisa jadi salah satu sumber untuk tetap rentan dalam situasi pandemi.

Transformasi digital terjadi sangat pesat dalam dua tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri dan daerah harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, masih banyak kondisi yang masih belum mendukung untuk melakukan transformasi digital secara optimal seperti infrastruktur, Sumber daya manusia (SDM) terkait skills dan talents, serta literasi pengguna.

Tantangan selanjutnya adalah akselerasi dan perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim di tingkat global dan nasional. Kondisi ini juga mendorong Kabupaten Malinau untuk bisa ikut beradaptasi, kesadaran akan lingkungan hidup menjadi sorotan saat ini. Kenyataannya masih rendah kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui program RT Bersih perlu mendorong kesadaran masyarakat akan isu lingkungan.

Tantangan Kabupaten Malinau tidak saja pemulihan ekonomi namun juga transpormasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang, jika dilihat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Malinau masih dihadapkan oleh permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil (fluktuatif) dan PDRB yang bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih, yaitu sektor pertambangan, khususnya tambang batu bara. Kabupaten Malinau harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi untuk dapat meningkatkan perekonomian sangat besar. Saat ini, Kabupaten malinau hampir mencapai

puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif yaitu sebesar 69,01 %. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar, jika kita mampu membangun SDM yang unggul dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif.

Secara sektoral Kabupaten Malinau mempunyai prospek yang menjanjikan di sektor pertanian. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan masih dominannya sektor pertanian selain pertambangan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malinau dan masih tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Upaya untuk meningkatkan peran sektor ini antara lain dengan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana, pembenahan sistim manajemen pada jalur distribusi produk, penyediaan informasi pasar yang berkesinambungan.

Selain itu prospek Kabupaten malinau yang memiliki desa-desa dengan sejumlah keunikannya, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa-desa wisata khususnya wisata budaya. Pengembangan industri kerajinan dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata. Industri kerajinan dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Dengan pengembangan desa wisata berbasis komoditas lokal diharapkan dapat melahirkan berbagai kegiatan produksi sebagai alternatif sumber pendapatan yang memadai bagi masyarakat perdesaan tanpa harus meninggalkan mata pencaharian utama di sektor pertanian.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan ekonomi daerah harus mengarah pada kebijakan ekonomi nasional, untuk itu Kabupaten Malinau merumuskan arah kebijakan ekonomi sebagai berikut :

(a) Peningkatan Produktivitas

Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi untuk Pemulihan Ekonomi, mendorong pemulihan dunia usaha, Perbaikan/penyediaan

sarana prasarana dengan peningkatan infrastruktur dan konektivitas.

(b) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan dengan menurunkan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran melalui program inovasi milenial mandiri, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

(c) Pembangunan yang Berkelanjutan

Mendukung pembangunan rendah karbon dan pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menjaga kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah, mempertahankan ruang terbuka hijau, mengurangi deforestasi, mengurangi pencemaran air, udara dan pengelolaan sampah.

Melihat perkembangan kondisi ekonomi sebagaimana tersebut diatas serta tantangan,prospek maupun arah kebijakan yang akan ditempuh, maka pada tahun 2023 rencana target ekonomi makro Kabupaten Malinau adalah :

Tabel 3.4
Target Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023

Indikator Makro	2021	Target 2022	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi	4,7	3,0-5,0	5,28
Persentase Penduduk Miskin	7,3	6,5-6,75	6 - 6,5
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,14	4,13	4,12
Ideks Pembangunan Manusia	72,32	72,85	73,18
Ginie Ratio	0,341	0,287	0,285

Dalam menentukan target makro diatas selain melihat perkembangan kondisi ekonomi saat ini dan masa lalu serta berbagai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh, Kabupaten Malinau juga memperhatikan target makro ekonomi nasional dan

provinsi untuk memperkuat dan mendukung pencapaian target pembangunan secara keseluruhan, serta harus berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan sudah seharusnya memperhatikan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus dilakukan agar secara bersama dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah melalui APBD harus turut berpartisipasi dalam mendorong pemulihan ekonomi dan sinkron dengan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena jika tidak melakukan penyelarasan maka pemerintah daerah dapat melaksanakan arah kebijakan yang berbeda dan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di daerah dan transfer ke daerah merupakan sepertiga dari APBN, dan jumlah APBN ditambah dengan APBD jumlahnya cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia.

3.2.1. Analisis Kinerja Keuangan Periode Tahun 2019 - 2021

a. Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019-2021 disajikan pada tabel Tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2019-2021

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	**1.471.740.961.276**	**1.462.640.670.309**	**1.419.812.373.811**	-1,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**70.361.080.273**	**65.311.671.387**	**74.809.719.848**	3,11
PAJAK DAERAH	13.572.119.158	10.103.027.404	13.890.821.831	1,17
RETRIBUSI DAERAH	1.693.507.434	1.445.260.069	2.408.229.534	19,25
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAH	5.549.995.354	3.250.680.717	3.503.009.671	-20,55
LAIN - LAIN PAD YANG SAH	49.545.458.328	50.512.703.198	55.007.658.812	5,37
PENDAPATAN TRANSFER	**1.386.043.958.923**	**1.379.898.688.921**	**1.324.456.399.963**	-2,25
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.335.395.519.144**	**1.327.036.156.413**	**1.263.641.709.113**	-2,72
Dana Perimbangan	**1.187.322.644.144**	**1.147.461.770.413**	**1.072.870.874.113**	-4,94
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	225.228.166.666	223.453.301.690	184.538.596.041	-9,48
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	814.152.557.000	784.353.307.000	779.926.601.361	-2,12
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.886.691.067	97.978.950.122	64.578.624.516	-18,78
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	50.055.229.411	41.676.211.601	43.827.052.195	-6,43
Dana Insentif Daerah (DID)		21.601.351.000	19.625.186.000	
Dana Desa	148.072.875.000	157.973.035.000	171.145.649.000	7,51
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**50.648.439.779**	**52.862.532.508**	**60.814.690.850**	9,58
Pendapatan Bagi Hasil	42.620.939.779	43.149.023.138	48.631.549.940	6,82
Bantuan Keuangan	8.027.500.000	9.713.509.370	12.183.140.910	23,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**15.335.922.080**	**17.430.310.000**	**20.546.254.000**	15,75
PENDAPATAN HIBAH	2.528.000.000	2.935.000.000	2.511.000.000	-0,34
DANA DARURAT				
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.807.922.080	14.495.310.000	18.035.254.000	18,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN	12.807.922.080	14.495.310.000	18.035.254.000	18,66

Sumber: BPKD Kab. Malinau, data diolah 2022

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan. Komposisi belanja daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan komposisi belanja daerah pada tahun 2021 sudah mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2018 sampai tahun 2020 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah

terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah mengalami penurunan sebesar 2,36 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6 tentang Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019-2021 dibawah ini .

Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2019-2021

URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
BELANJA	**1.419.845.578.738,00**	**1.444.378.218.085,00**	**1.353.551.185.811,19**	-2,36
BELANJA OPERASI	**936.938.745.462,00**	**940.227.025.204,00**	**900.121.416.079,19**	-1,98
Belanja Pegawai	475.652.043.194,00	481.304.058.967,00	505.155.869.372,00	3,05
Belanja Barang dan Jasa	396.782.006.547,00	369.937.443.643,00	368.895.538.503,19	-3,58
Belanja Subsidi	2.401.130.200,00	1.881.918.000,00	2.393.507.500,00	-0,16
Belanja Hibah	56.626.115.521,00	83.194.061.169,00	20.982.118.202,00	-39,13
Belanja Bantuan Sosial	5.477.450.000,00	3.909.543.425,00	2.694.382.502,00	-29,86
BELANJA MODAL	**175.583.458.276,00**	**151.652.094.147,00**	**101.357.607.237,00**	-24,02
Belanja Modal Tanah	2.692.520.411,00	78.305.181,00		-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.751.331.482,00	25.507.715.860,00	54.902.417.219,00	25,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.293.802.288,00	50.360.093.912,00	14.725.005.950,00	-50,58
Belanja Modal Jalan, Iriqasi dan Jaringan	76.664.016.846,00	74.974.715.067,00	30.695.745.068,00	-36,72
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	-	1.034.439.000,00	691,79
Belanja Modal Aset Lainnya	1.165.287.249,00	731.264.127,00		-100,00
BELANJA TAK TERDUGA	**-**	**38.892.325.734,00**	**25.292.777.495,00**	
Belanja Tak Terduga	-	38.892.325.734,00	25.292.777.495,00	
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**307.323.375.000,00**	**313.606.773.000,00**	**326.779.385.000,00**	3,12
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	8.027.500.000,00	-		-100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	299.295.875.000,00	313.606.773.000,00	326.779.385.000,00	4,49

Sumber: BPKD Kab. Malinau, data diolah 2022

c. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Malinau menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset , kewajiban dan ekuitas per akhir periode tahun anggaran. Kinerja keuangan Kabupaten Malinau dapat digambarkan dengan analisa posisi keuangan, posisi keuangan tersebut di sajikan dalam Laporan Keuangan Neraca. Kinerja posisi keuangan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018-2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Neraca Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2018-2020

URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	19.244.893.255,85	70.760.651.001,84	92.914.312.006,69	119,73
Kas di Bendahara Penerimaan	80.144.300,00	103.839.456,00	97.229.350,00	10,14
Kas di Bendahara Pengeluaran	22.593.313,00	10.172.100,00	366.037.939,00	302,51
Kas di BLUD	17.693.670.431,00	14.399.892.064,00	6.367.029.845,00	-40,01
Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	
Kas di Bendahara BOS	-	-	-	
Kas Lainnya	3.835.108.703,32	5.815.752.427,00	2.139.552.756,67	-25,31
Setara Kas	-	-	-	
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	
Piutang Pendapatan	77.005.777.193,00	128.371.011.824,23	88.612.150.212,80	7,27
Piutang Lainnya	12.460.126.287,00	16.324.997.271,83	6.584.357.788,00	-27,31
Penyisihan Piutang	(2.869.592.834,34)	(3.998.012.220,55)	(5.732.239.456,12)	41,34
Beban Dibayar Dimuka	126.917.621,77	-	-	
Persediaan	71.137.304.795,60	46.732.869.894,21	52.979.051.819,22	-13,70
JUMLAH ASET LANCAR	198.736.943.066,20	278.521.173.818,56	244.327.482.261,26	10,88
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	
Dana Bergulir	2.712.523.087,00	2.712.523.087,00	2.712.523.087,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	
Investasi Dana Bergulir	-	-	-	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1.439.005.286,22)	(1.434.949.191,22)	(1.769.286.197,34)	10,88
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.273.517.800,78	1.277.573.895,78	943.236.889,66	-13,94
Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	112.888.874.898,00	113.049.391.480,00	116.049.391.480,00	1,39
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	112.888.874.898,00	113.049.391.480,00	116.049.391.480,00	1,39
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	114.162.392.698,78	114.326.965.375,78	116.992.628.369,66	1,23
ASET TETAP				
Tanah	1.405.060.954.740,66	1.409.366.020.290,66	1.406.125.600.660,67	0,04
Peralatan dan Mesin	465.582.422.128,95	450.960.237.838,04	478.905.670.917,44	1,42
Gedung dan Bangunan	1.646.343.602.774,08	1.721.092.572.062,08	1.764.653.239.504,08	3,53
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.584.495.718.951,74	2.665.517.122.369,11	2.750.590.871.978,60	3,16
Aset Tetap Lainnya	22.906.520.463,00	21.422.085.223,00	21.225.842.975,00	-3,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	72.358.879.233,00	40.993.682.203,00	38.344.681.833,00	-27,20
Akumulasi Penyusutan	(1.815.090.552.300,25)	(1.962.806.655.362,23)	(2.166.052.171.454,35)	9,24
JUMLAH ASET TETAP	4.381.657.545.991,18	4.346.545.064.623,66	4.293.793.736.414,44	-1,01
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	-	-	-	
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang	62.850.000,00	50.850.000,00	50.850.000,00	-10,05
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	
Aset Tidak Berwujud	6.132.985.713,88	4.561.537.353,25	4.356.993.908,03	-15,71
Aset Lain-lain	139.174.098.181,24	168.969.971.186,08	168.598.963.185,80	10,06
Ternak Bergulir	168.962.500,00	-	-	-100,00
JUMLAH ASET LAINNYA	145.538.896.395,12	173.582.358.539,33	173.006.807.093,83	9,03
JUMLAH ASET	**4.840.095.778.151,28**	**4.912.975.562.357,33**	**4.828.120.654.139,19**	-0,12
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	415.130,39	-	-	
Utang Bunga	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	17.038.882,80	108.255.265,64	92.793.566,29	133,37
Utang Beban	4.005.359.882,30	8.761.568.729,70	5.083.307.647,39	12,66
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.667.437.681,02	10.013.901.905,02	22.389.869.684,00	266,44
Utang Pajak	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.690.251.576,51	18.883.725.900,36	27.565.970.897,68	120,10
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	5.690.251.576,51	18.883.725.900,36	27.565.970.897,68	120,10
EKUITAS				
EKUITAS	4.834.405.526.574,77	4.894.091.836.456,97	4.800.554.683.241,51	-0,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**4.834.405.526.574,77**	**4.912.975.562.357,33**	**4.828.120.654.139,19**	-0,07

Sumber: BPKD Kab. Malinau, 2021

Berdasarkan perkembangan Neraca periode tahun 2018-2020 aset Kabupaten Malinau mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,70 persen dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Aset**

   Aset Lancar pemerintah kabupaten Malinau mengalami tren kenaikan pada tahun 2018 hingga 2020 dengan rata-rata 10,88 persen, kenaikan terbesar pada pos Kas terutama kas pada bendahara pengeluaran, disusul Piutang sedangkan persediaan menurun persentase pertumbuhannya antara periode tahun 2018 sampai dengan 2020.

   Jumlah investasi jangka panjang Kabupaten malinau juga meningkat rata-rata sebesar 1,23 persen. Sedangkan aset tetap pada tahun 2020 secara umum menurun sebesar 1,01 persen, penurunan terbesar pada pos Konstruksi dalam pengerjaan sebesar 27,20 persen. Aset lainnya meningkat jika dilihat pertumbuhannya sejak tahun 2018 dengan rata-rata sebesar 9.03 persen.

2. **Kewajiban**

   Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Malinau mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 120,10 persen dan menjadi sebesar Rp. 27.565.970.897,68,- pada tahun 2020. Kabupaten Malinau tidak memiliki kewajiban jangka panjang sejak tahun 2018 hingga tahun 2020.

3. **Ekuitas Dana**

   Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemeritah yaitu selisih antara aset dan kewajiban, Rata –rata pertumbuhan Ekuitas Kabupaten malinau sedikit menurun sebesar 0,07 persen.

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Arah Kebijakan

a. PENDAPATAN

Pada Tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   PAD terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer AntarDaerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari daerah provinsi)

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 :

(1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:

a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau.
f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;

g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
h. Optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
i. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

(2) Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
   a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
   b. Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
   c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
   d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.

(3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;

(4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian, analisis kinerja pelaksanaan APBD dan arah kebijakan pendapatan Kabupaten Malinau sebagaimana telah diuraikan pada sub bab diatas, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2023

URAIAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	APBD TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023 (Sumber RPJMD)
PENDAPATAN	**1.462.640.670.309**	**1.419.812.373.811**	**1.273.572.034.913**	**1.403.025.230.700**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**65.311.671.387**	**74.809.719.848**	**44.571.317.927**	**67.621.601.190**
PAJAK DAERAH	10.103.027.404	13.890.821.831	12.537.909.100	11.250.207.612
RETRIBUSI DAERAH	1.445.260.069	2.408.229.534	1.801.946.500	1.816.913.179
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAH	3.250.680.717	3.503.009.671	3.325.430.716	3.467.426.608
LAIN - LAIN PAD YANG SAH	50.512.703.198	55.007.658.812	26.906.031.611	51.087.053.791
PENDAPATAN TRANSFER	**1.379.898.688.921**	**1.324.456.399.963**	**1.225.000.716.986**	**1.321.948.229.510**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.327.036.156.413**	**1.263.641.709.113**	**1.184.288.518.000**	**1.250.607.938.340**
Dana Perimbangan	**1.147.461.770.413**	**1.072.870.874.113**	**-**	**1.072.171.484.693**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	223.453.301.690	184.538.596.041		155.973.547.653
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	784.353.307.000	779.926.601.361		799.994.850.480
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.978.950.122	64.578.624.516		64.964.367.051
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	41.676.211.601	43.827.052.195		51.238.719.509
Dana Insentif Daerah (DID)	21.601.351.000	19.625.186.000		
Dana Desa	157.973.035.000	171.145.649.000		178.436.453.647
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**52.862.532.508**	**60.814.690.850**	**40.712.198.986**	**71.340.291.170**
Pendapatan Bagi Hasil	43.149.023.138	48.631.549.940		51.842.204.870
Bantuan Keuangan	9.713.509.370	12.183.140.910		19.498.086.300
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**17.430.310.000**	**20.546.254.000**	**4.000.000.000**	**13.455.400.000**
PENDAPATAN HIBAH	2.935.000.000	2.511.000.000		
DANA DARURAT				
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.495.310.000	18.035.254.000	4.000.000.000	13.455.400.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN	14.495.310.000	18.035.254.000	4.000.000.000	13.455.400.000

Sumber: BPKD Kab. Malinau,data diolah 2022

d. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujdkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(1) Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten. Pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau harus mampu menghasilkan keluaran, hasil dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;

(2) Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RKPD Kabupaten Malinau 2023. Strategi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

(3) Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata;

(4) Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa

dengan mengalokasikan dana Gerdema dan RT bersih serta memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan covid 19 dan mendukung sektor prioritas.

(5) Mengalokasikan 20 % dari total belanja untuk bidang pendidikan yang difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program WM (Wajib belajar Malinau maju) yaitu pengembangan dari program Wajib Belajar 16 tahun.

(6) Mengalokasikan 10 % dari total belanja untuk bidang Kesehatan untuk menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal

(7) Penguatan jaring pengaman sosial untuk stabilitas ekonomi

(8) Infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas,konektivitas dan produktivitas

(9) Subsidi Beras Daerah Rasda

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, diperlukan kebijakan alokasi anggaran dengan menganalisis keuangan daerah. Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan kebutuhan.

e. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada dasarnya meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja atau memanfaatkan surplus.

Pada tahun 2023, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) estimasi perkiraan tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2023, didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah, untuk Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Apa' Mening Kabupaten

Malinau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Selengkapnya gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Malinau tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Malinau 2019-2023

URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	APBD 2022	Proyeksi 2023
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**237.983.447.540,64**	**236.622.534.645,51**	**100.581.169.024,69**	**-**	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.978.980.540,64	86.622.534.645,51	100.581.169.024,69	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	4.467.000,00	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	200.000.000.000,00	150.000.000.000,00	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**200.000.000.000,00**	**153.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**-**	**1.500.000.000,00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	1.500.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	200.000.000.000,00	150.000.000.000,00			
PEMBIAYAAN NETTO	**37.983.447.540,6**	**83.622.534.645,5**	**97.581.169.024,7**	**-**	(1.500.000.000,00)

Sumber: BPKD Kab. Malinau, data diolah 2022

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan proses melakukan perubahan yang berencana, terkoordinir menuju modernitas sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya melalui kebijakan dan strategi ke arah yang diinginkan.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Tahun 2023 adalah tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026, merupakan tahap pengembangan. Tahap pengembangan merupakan proses menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, baik program utama maupun program pendukung untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah.

Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama, dan sebagainya.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tersebut berisi program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Tidak semua program prioritas yang ada pada Perangkat Daerah dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Perumusan prioritas pembangunan tahun 2023 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan

daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Dan Jika suatu prioritas pembangunan daerah telah berhasil dicapai, maka tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya. Jadi, suatu program prioritas bisa menjadi prioritas pembangunan daerah jika bisa menjadi daya ungkit yang bernilai strategik pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam cakupan pembangunannya.

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Malinau

Tujuan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing, hal ini juga sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.** Nilai-nilai atau pokok-pokok Visi dan Penjabarannya sebagai berikut.

Kabupaten Malinau yang Mandiri bermakna:

1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.
2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Kabupaten Malinau yang Damai bermakna terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum

Kabupaten Malinau yang Sejahtera bermakna Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapandapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pemerintahan yang Profesional bermakna terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga

diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (*Rule of law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelembagaannya) yang mewakili kepetingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Visi Kabupaten Malinau tersebut dicapai dengan 4 misi, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

(1) Program Desa Sarjana;
(2) Program Milenial Mandiri;
(3) Program Rasda Plus;
(4) Program RT-Bersih; dan
(5) Program Wajib Belajar Malinau Maju.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Visi Misi Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tingkat pencapaian visi dan misi Kabupaten Malinau dijabarkan kedalam Tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,18
	1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	persen	72,05
	2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	9,67
	3 Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,35-5,25
	4 Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	poin	75,09
2 Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia		Indeks Ketahanan Nasional	poin	2,78
	5 Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	persen	100
		Indeks Resiko Bencana	poin	124,4
	6 Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	poin	84,36
	7 Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	poin	80,6
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat	poin	79,5
3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan PDRB	persen	5,28
		Indeks Gini	poin	0,283

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023
Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah			Angka Kemiskinan	persen	6-6,5
			Laju Inflasi	persen	0,33
	8	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (TNP, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB	persen	4,9
			Nilai Tukar Petani	poin	103,7
			Nilai Tukar Peternak	poin	103,25
			Nilai Tukar Nelayan	poin	102,95
	9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	persen	2,70%
			Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	persen	1.84%
	10	Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Koperasi Berkualitas	persen	72%
			Pesentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	persen	73,30%
	11	Meningkatnya Investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	rupiah	91.100.000.000
4 Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	poin	3,8
	12	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	persen	52,10%

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023
		Berwawasan Lingkungan	Persentase Daerah/Wilayah Banjir	persen	2%
			Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	persen	70%
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	72%
			Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	persen	30,34
	13	Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman	Pesentase Pemukiman Yang Layak	persen	79
			Rasio Rumah Layak Huni	rasio	7:09
	14	Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani TIK	persen	100
	15	Berkembangnya Dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	persen	78,18
5 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	rasio	79,11
	16	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	poin	100
			Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	poin	53,75

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	poin	91,36
6 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)		Indeks RB	poin	B
	17 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP	poin	B
		Nilai LPPD	poin	Tinggi
	18 Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	poin	WTP
	19 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	04-Jun
	20 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	BB
	21 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (Desa)	persen	15,59

Rumusan tujuan dan sasaran diatas merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan instrumen bagaimana cara melaksanakan visi misi ,tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Penjabaran misi kedalam tujuan sasaran serta strategi dan arah kebijakan dijelaskan sebagaimana berikut :

Tabel 4.2
Penjabaran Misi ke Satu ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul				
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Memantapkan UKP, UKM dan ketersediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan
					Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
		1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal
					Mengembangkan kurikulum muatan lokal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
					Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
		1.3	Meningkatnya profesionalitas tenaga kerja	Peningkatan produkvifitas tenaga kerja	Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja
					Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
				Pemantapan hubungan kerja dan pengendalian ketenagakerjaan	Menguatkan hubungan industrial bidang ketenagakerjaan
		1.4	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan
					Meningkatkan diversifikasi pangan
					Meningkatkan penangulangan kerawanan pangan
2	Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan Sumber daya Manusia	2.1	Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis serta bebas bencana	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan perlindungan masyarakat
				Penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan	Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana
		2.2	Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan
					Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan
		2.3	Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya	Menguatkan ideologi pancasila
					Menguatkan kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik

Tabel 4.3
Penjabaran Misi ke Dua ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal					
3	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah	3.1	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
					Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan
		3.2	Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah	Pengembangan keaneragaman dan kualitas produk industri lokal	Memberdayakan pelaku industri dan Mengembangkan sarana prasarana industri
				Penguatan industri perdagangan dan jasa daerah	Mengendalikan perizinan dan menstabilkan harga
					Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor
					Memantapkan perlindungan terhadap konsumen
					Menguatkan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan
				Peningkatan kunjungan wisata	Meningkat daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan
					Mengembangkan desa wisata budaya
					Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif
					Mengembangkan desa kreatif
		3.3	Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat	Penguatan kemandirian masyarakat serta koperasi dan UMKM	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
					Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM
		3.4	Meningkatnya Investasi Daerah	Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang kondusif	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan investasi

Tabel 4.4
Penjabaran Misi ke Tiga ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan					
4	1.	4.1	Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase
					Meningkatkan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut
				Peningkatan infrastruktur air bersih	Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik
				Peningkatan infrastruktur	Mengembangan fasilitas perdagangan pasar tradisional
				Peningkatan jaringan pengairan/irigasi	Meningkatkan pelayanan irigasi
		4.2	Meningkatnya kualitas perumahan/ permukiman	Pembangunan sarana prasarana perumahan/ permukiman	Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman
					Membangun sarana prasarana sanitasi perumahan/ permukiman
					Membangun rumah layak huni
		4.3	Berkembangnya sistem teknologi informasi yang membuka keterisoliran daerah	Peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital
		4.4	Berkembangnya dukungan sistem informasi pelayanan publik	Pengembangan dukungan sistem informasi pelayanan publik	Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik
5	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	5.1	Meningkatnya kualitas lahan, air dan udara	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan
					Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah

Tabel 4.5
Penjabaran Misi ke Empat ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan					
6	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance)	6.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Penguatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan	Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja
				Peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan
					Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		6.2	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Penyelengaran pemerintahan yang bersih	Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar
				Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi	Meningkatkan WBK dan WBBM
		6.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Intensifikasi peningkatan Pendapatan Pajak, Retribusi,dan Sumber - sumber lainnya	Meningkatkan Pendapatan Pajak, Retribusi,dan Sumber - sumber lainnya
		6.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan cakupan layanan pengukuran IKM
				Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	Peningkatan akses informasi publik
					Meningkatkan cakupan layanan publik
					Menyediakan informasi publik yg akurat dan up to date
		6.5	Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa	Peningkatan penyelenggaraaan pemerintahan desa	Meningkatkan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan desa

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2023

RKPD Kabupaten Malinau merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan provinsi Kalimantan Utara, karena itu RKPD yang disusun juga mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, sehingga tercipta sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional,provinsi dan kabupaten sebagai satu kesatuan NKRI.

a. Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020 – 2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemerintah perlu menyusun RKP yang memuat arah kebijakan nasional secara tahunan. RKP 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja K/L dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

Sasaran Pembangunan yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 adalah :

1. Mengembalikan Momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini dan penurunan emisi gas kaca.
2. Peningkatan Kualitas daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator indek pembangunan manusia, tingkat kemiskinan.

Selain itu aksentuasi indikator pembangunan 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan Nilai tukar nelayan. Lebih lanjut target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukan oleh infografis sebagai berikut.

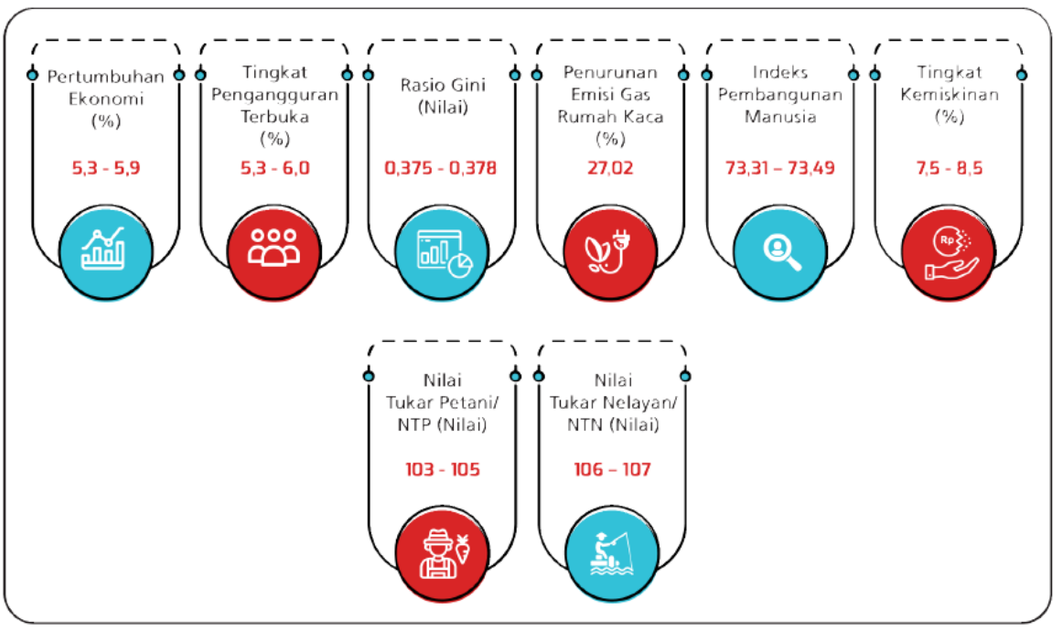

Gambar 4.1
Arah Kebijakan Pembangunan RKP Tahun 2023

Sumber: Paparan RKP oleh Bappenas, Februari 2022

Untuk mencapai sasaran makro pembangunan tersebut maka tema dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 4.2
Arah Kebijakan Pembangunan RKP Tahun 2023
Sumber: Paparan RKP 2023 oleh Bappenas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan

yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project–MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023 tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 juga telah menetapkan MP sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, dengan demikian maka beberapa MP direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP 2023.

Dalam kurun waktu periode RPJMN, pembangunan Wilayah Kalimantan Utara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai tujuh (7) agenda Nasional Untuk lebih jelasnya Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan Utara khususnya Kab. Malinau yang termuat dalam Lampiran IV RPJMN 2020-2024 disajikan pada table 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Malinau Pada RPJMN 2020-2024

PP/KP/PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET	TOTAL INDIKASI PENDANAAN 2020-2024 (MILIAR)	LOKASI	PROGRAM K/L	INSTANSI PELAKSANA
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha	112,55	7,33	Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	102,01	7,94	Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1309,94	28,45	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Utara, a.l Kota Tarakan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Kalimantan Utara (kecamatan)	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar,**	**20**	**84,51**			

PP/KP/PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET	TOTAL INDIKASI PENDANAAN 2020-2024 (MILIAR)	LOKASI	PROGRAM K/L	INSTANSI PELAKSANA
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)			Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah

PP/KP/PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET	TOTAL INDIKASI PENDANAAN 2020-2024 (MILIAR)	LOKASI	PROGRAM K/L	INSTANSI PELAKSANA
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/ direhabilitasi (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah

PP/KP/PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET	TOTAL INDIKASI PENDANAAN 2020-2024 (MILIAR)	LOKASI	PROGRAM K/L	INSTANSI PELAKSANA
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMKnya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	20	1.44	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Pemerintah Daerah
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6.60	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM

PP/KP/PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET	TOTAL INDIKASI PENDANAAN 2020-2024 (MILIAR)	LOKASI	PROGRAM K/L	INSTANSI PELAKSANA
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0.20	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, , Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang**	**0.69**	**18**	**Kab. Malinau**		
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang di ting-katkan produksinya (Ha)	80	7.43	Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		2	Kab. Malinau	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4.00	Kab. Malinau	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1.44	Kab. Malinau	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0.80	Kab. Malinau	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	8	2.68	Kab. Malinau	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PP/KP/PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET	TOTAL INDIKASI PENDANAAN 2020-2024 (MILIAR)	LOKASI	PROGRAM K/L	INSTANSI PELAKSANA
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**51.88**	**75.92**	**Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		7.69	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0.51	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0.27	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4.08	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1.26	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa		17.54	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang	147	40.95	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET	TOTAL INDIKASI PENDANAAN 2020-2024 (MILIAR)	LOKASI	PROGRAM K/L	INSTANSI PELAKSANA
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa	4	0.59	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1.18	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1.28	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Malinau, Nunukan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

Sumber: RPJMN Tahun 2000-2024

b. Telaahan Terhadap Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

Sebagai bagian dari provinsi, kabupaten Malinau harus ikut andil dalam upaya mewujudkan visi misi Kaltara yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan. Penelaahan terhadap tujuan dan sasaran Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan mengamati tujuan dan sasaran Provinsi yang berdampak, mandatori dan yang harus dipedomani oleh daerah. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dan sasaran Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tujuan, dan Sasaran RPJMD
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

,		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
VISI: TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA						
Misi 1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik						
Terjaganya kondusifitas wilayah			**1**	**Indeks Ketahanan Nasional**	**Poin**	**2,78 (cukup tangguh)**
			2	**Indeks Demokrasi Indonesia**	**Poin**	**83,60 (Baik)**
	1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah		Angka kriminalitas tertangani	Persen	82
	2	Meningkatnya kualitas penanganan bencana		Indeks Risiko Bencana	Poin	153,62 (Tinggi)
Misi 2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**BB**
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja	1	Predikat SAKIP	Predikat	BB
			2	Nilai LPPD	Poin	73,20 (BB)
			3	Opini BPK	Predikat	3,41-4,20 (Tinggi)

,		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
			4	Indeks Maturitas SPBE	Poin	2,9
			5	Maturitas SPIP	Poin	3,2
Misi 3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan Kebangsaan						
Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**71,45**
	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	72,68
	2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,28
			2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,4
	3	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat	1	Angka Kemiskinan	Persen	6,70-6,00
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,45
Misi 4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi						
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**78,46 (Baik)**
	1	Terwujudnya pembangunan rendah karbon		Tingkat penurunan emisi GRK	Ton CO2-eq	6.523.255
	2	Meningkatnya kualitas air, udara dan	1	Indeks Kualitas Air	Poin	55,02

,		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
		lahan	2	Indeks Kualitas Udara	Poin	91,43
			3	Indeks Tutupan Lahan	Poin	99,89
			4	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	74,12
Misi 5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan						
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar				**Indeks Layanan Infrastruktur**	**Poin**	**3,7**
	1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan	1	Jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	14,73
			2	Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan	Persen	65
	2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	1	Cakupan layanan air bersih	Persen	64,92
			2	Cakupan akses dan layanan telekomunikasi	Persen	88
Misi 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota						
Mewujudkan ekonomi			**1**	**Pertumbuhan PDRB**	**Persen**	**5,36-6,26**

,		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
daerah yang berdaya saing			**2**	**Nilai PDRB (ADHK)**	**Miliar Rp**	71,152.52
			3	**Nilai PDRB (ADHB)**	**Miliar Rp**	126,247.17
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata	1	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	17
			2	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,5
			3	Nilai Tukar Petani	Poin	103,57
			4	Nilai Tukar Nelayan	Poin	104,71
			5	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	6,73
			6	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	1,8
			7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	626,411
			8	Pengeluaran per kapita	Ribu Rp	8,234
Misi 7. Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinnekaan di Provinsi Kalimantan Utara						
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis				**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**Poin**	**80,60 (Sangat Tinggi)**
		Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1	Skor Dimensi Toleransi	Poin	79,25
			2	Skor Dimensi Kesetaraan	Poin	79,25
			3	Skor Dimensi Kerjasama	Poin	79,24

,		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
Misi 8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah						
Mewujudkan ketahanan energi daerah				**Nilai intensitas energi**	**TOE/ Miliar Rupiah**	**0,19**
		Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan listrik dan Energi Baru Terbarukan	1	Cakupan rumah tangga teraliri listrik	KK	187,639
			2	Rasio elektrifikasi	Persen	90,08
			3	Nilai Bauran EBT	Persen	4,68
Misi 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan						
Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan				**Indeks Pembangunan Gender**	**Poin**	**89,1**
	1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	68,12
	2	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	57,4
Misi 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM						
Mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan				**Laju pertumbuhan koperasi dan UMKM**	**Persen**	**7,14**
		Meningkatnya produktivitas dan daya	1	Pertumbuhan Koperasi Sehat	Persen	5

,		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
		saing koperasi dan UMKM	2	Persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM	Persen	6,19
Misi 11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional						
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif				**Rata-rata Pertumbuhan realisasi investasi (PMA + PMDN)**	**Persen**	**28**
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)	Persen	95
Misi 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota						
Mewujudkan pemerataan pendapatan antar wilayah yang berkeadilan				**Indeks Williamson**	**Poin**	**0,17**
		Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,283
Misi 13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun						
Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas				**Proporsi desa tertinggal dan sangat tertinggal**	**Persen**	36,24
		Meningkatnya kemandirian desa	1	Jumlah desa mandiri	Desa	37

,		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
			2	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	Desa	162
Misi 14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan						
Mewujudkan Percepatan pembentukan DOB				**Tahapan pembentukan DOB yang dipenuhi**	**Persen**	**100**
		Meningkatnya pengembangan wilayah administrasi kecamatan untuk pemenuhan syarat pembentukan DOB yang diusulkan		Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	kecamatan	1

c. Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta memenuhi kriteria SMART-C.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Sasaran RKPD Tahun 2023 digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Rencana Kerja Pemerintah 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Pencapaian sasaran tersebut diindikasikan dengan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
1	Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Koperasi Berkualitas	72%
		Pesentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	73,30%
2	Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	29,79%
3	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (TNP, Holti, Ternak, Perikanan)	4,9
		Nilai Tukar Petani	103,7
		Nilai Tukar Peternak	103,25
		Nilai Tukar Nelayan	102,95
4	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	2,70%
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.84%
5	Meningkatnya Investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	91.100.000.000
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,67
7	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72
8	Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,35-6,25
9	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	52,10%
		Persentase Daerah/Wilayah Banjir	2%
		Persentase Daerah Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	70%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	72%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	30,34
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP	B
		Nilai LPPD	Tinggi
11	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP
12	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4-6
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB
14	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri (Desa)	15,59
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,75
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,36

4.1.3 Sinergi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

a. **Sinergi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Pemerintah pusat dan daerah saling membutuhkan dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Demi kesuksesan program pembangunan, pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi sekaligus menghapus ego sektoral. Potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah sehingga keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan sinkronisasi dan sinergi dalam kebijakan pembangunan.

Sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023 ditetapkan bersinergi dengan Sasaran dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.9
Keterkaitan Sasaran dan Arah Kebijakan dan Sasaran Kabupaten Malinau Tahun 2023

Sasaran RKP		Arah Kebijakan RKP		No	Sasaran Kab. Malinau
1	Mengembalikan Momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini dan penurunan emisi gas kaca	3	Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan decent job	S8	Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja
		4	Mendorong Pemulihan dunia usaha	S3	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal
				S5	Meningkatnya Investasi daerah
		5	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset terapan	S4	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah
		6	Pembangunan Rencah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubaahan iklim)	S15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara
		7	Perdepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi	S9	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan
		8	Pembangunan Ibu Kota Nusantara		
2	Peningkatan Kualitas daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator indek pembangunan manusia, tingkat kemiskinan	1	Percepatan Penghapusan Kemisikinan Eksrim	S1	Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat
				S2	Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman
		2	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan	S6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
				S7	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
				S10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
				S11	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN
				S12	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
				S13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
				S14	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa

b. Sinergi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Sinergi sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Sinergi dapat berupa *top down* maupun *bottom up*, artinya Sinergi dalam hal ini dapat berasal dari pemerintah pusat/provinsi ke pemerintah daerah maupun sebaliknya. Tujuan dan sasaran Kabupaten harus bersinergi dengan provinsi agar terlaksana pembangunan berkelanjutan. Selain itu dengan adanya sinergitas keduanya maka pembangunan akan lebih tepat sasaran, Pembangunan yang dilaksanakan tetap harus sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Malinau. Namun, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut harus selaras dengan provinsi hingga ke pemerintah pusat.

Keberhasilan daerah merupakan keberhasilan provinsi Karena pada tingkat provinsi merupakan akumulasi hasil dari capaian kabupaten. Dan sekaligus juga hasil dari sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Malinau.

Sinergi tujuan dan sasaran pembangunan antara kabupaten Malinau dengan Provinsi Kalimantan Utara disajukan dalam tabel berikut.

Tabel 4.10
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Sasaran Provinsi Kaltara		Sasaran Kabupaten Malinau	
S1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah		
S2.	Meningkatnya kualitas penanganan bencana		
S3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.	S11.	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN
		S10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		S13.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
S4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S7.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
S5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	S6.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
S6.	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat	S1.	Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat
S7.	Terwujudnya pembangunan rendah karbon	S15.	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara
S8.	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	S15.	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara
S9.	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan	S9.	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan
S10.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	S9.	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan
S11.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata	S4.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah
		S3.	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal
S12.	Meningkatnya toleransi antar umat beragama		
S13.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan listrik dan EBT		
S14.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		

Sasaran Provinsi Kaltara		Sasaran Kabupaten Malinau	
S15.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	S8.	Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja
S16.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM		
S17.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	S5.	Meningkatnya Investasi daerah
S18.	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat		
S19.	Meningkatnya kemandirian desa	S14.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa
S20.	Meningkatnya pengembangan wilayah administrasi kecamatan untuk pemenuhan syarat pembentukan DOB yang diusulkan		

4. 2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2023

a. Tema dan Prioritas RKP Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023 adalah ***Peningkatan Produktivitas untuk Transpormasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.***

Tahun 2023 pemerintah akan melanjutkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang juga merupakan Prioritas Nasional yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam RKP tahun 2023 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik

Pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa *major project* yang diperkuat dengan mekanisme *clearing house*, agar manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas.

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing provinsi. Dan menyusun prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan isu serta permasalahan yang dianggap prioritas karena Kapasitas fiskal terbatas.

b. Tema dan Prioritas Provinsi Kaltara Tahun 2023

Sejalan dengan tema pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu :

4.2.2 Isu Strategis Kabupaten Malinau Tahun 2023

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu

hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan dan analisis lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal, maka Isu Strategis Kabupaten Malinau 2023 adalah :

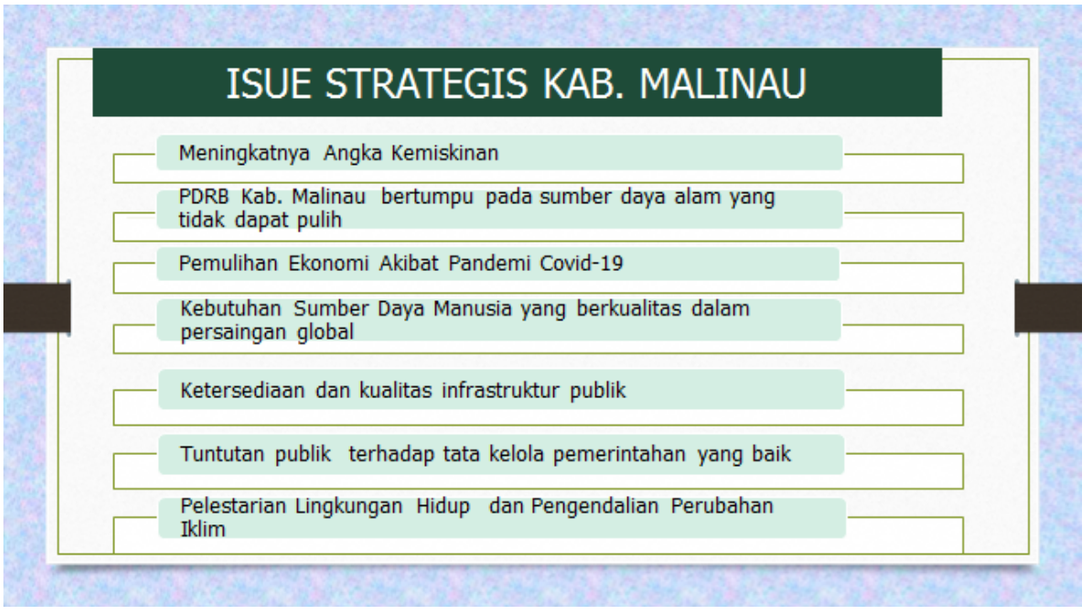

8. Meningkatnya Angka Kemiskinan

Pandemi telah berjalan selama dua tahun lebih di Indonesia dan berpengaruh terhadap berbagai aspek yaitu, aspek kesehatan, sosial, hingga pada aspek perekonomian. Pandemi mengguncang hebat perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaannya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal disaat

pandemi. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Pemberdayaan penduduk miskin di perdesaan harus menjadi fokus perhatian pemerintah, peran desa dalam menahan laju peningkatan kemiskinan juga demikian besar. Menjaga daya beli masyarakat desa dan meningkatkan kinerja serta potensi desa perlu terus didorong dengan tetap menganggarkan dana Gerdema dan Dana RT.

Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Kalimantan Utara maupun RKP, masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malinau yang sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan.

9. PDRB Kab. Malinau bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih

Peran sektor primer pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan masih sangat dominan memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau, oleh karenanya perlambatan pertumbuhan pada dua sektor tersebut berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau. Selain itu Kabupaten Malinau masih dihadapkan oleh permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil (fluktuatif) dan PDRB yang bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih, yaitu sektor pertambangan, khususnya tambang batu bara. Sedangkan Fakta empiris menunjukkan bahwa seluruh negara maupun beberapa daerah di Indonesia yang maju dan makmur, adalah mereka yang sukses melaksanakan transformasi struktural ekonominya dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Sektor sekunder adalah industri manufakturing yang meliputi industri pengolahan SDA, bioteknologi, elektronik, otomotif, mesin dan peralatan mesin, kimia, teknologi informasi (hardwares dan softwares), nanoteknologi, dan lainnya. Sementara itu, sektor tersier mencakup semua sektor jasa (seperti kesehatan, pendidikan, riset dan pengembangan, perdagangan, keuangan, transprotasi, konstruksi, perumahan, dan konsultansi), pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan modal dasar pembangunan yang besar dan bonus demografi yang kita miliki menjadi peluang untuk pemerintah daerah agar mampu melaksanakan transformasi struktural ekonomi.

Hal utama yang harus dilakukan adalah dengan merevitalisasi seluruh sektor ekonomi yang ada saat ini supaya lebih produktif, efisien, berdaya saing, berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable) dengan cara memastikan bahwa seluruh unit usaha, khususnya UMKM, harus memenuhi skala ekonomi, menerapkan teknologi mutakhir yang tepat, manajemen sistem rantai suplai secara terpadu dari hulu (produksi) sampai hilir (pasar), dan ramah lingkungan. Selanjutnya, mengembangkan sektor sekunder dan tersier yang lebih produktif, berdaya saing, menyerap banyak tenaga kerja, adil, dan ramah lingkungan.

Industri manufaktur, makanan dan minuman, industri manufakturing (pengolahan) berbasis SDA. Pengolahan SDA, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, dapat menghasilkan banyak jenis produk setengah jadi maupun produk akhir (final products) dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi, menyerap banyak tenaga kerja, dan multiplier effects yang sangat luas.

Sektor tersier yang harus mendapat perhatian khusus dalam jangka pendek–menengah adalah pariwisata. Kabupaten Malinau memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam yang luar biasa, harus cerdas memanfaatkan peluang industri pariwisata. Hasilnya jumlah kunjungan wisatawan dapat mengalami peningkatan. Ekonomi kreatif

juga merupakan sektor tersier yang sangat potensial menjadi keunggulan kompetitif.

Kesemuanya itu harus didukung dengan infrastruktur, logistik, konektivitas antar wilayah, yang harus terus diperbaiki dan dibangun sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan industrialisasi seperti diuraikan di atas. iklim investasi dan kemudahan berusaha mesti terus diperbaiki dan ditingkatkan

Akhirnya, kita harus terus menerus meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi seluruh rakyat secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian, kapasitas SDM akan mampu menjalankan pembangunan ekonomi menuju Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera.

10. Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merebak di seluruh wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Malinau. Aspek ekonomi merupakan dampak yang paling mendapat perhatian setelah aspek kesehatan. Perekonomian Malinau mengalami perlambatan pada tahun 2020 namun sudah mulai pulih dan meningkat ditahun 2021. Pandemi telah memicu resesi ekonomi dan mengakibatkan kerusakan besar pada sektor kesehatan, pekerjaan dan kesejahteraan. Harus bertindak cepat untuk menghadapi dampak pandemi dan menghindari terjadinya krisis yang lebih parah.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 perlu mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Pembangunan dan pemulihan berkelanjutan dapat mengurangi dampak bagi lingkungan di masa yang akan datang, serta mewujudkan ekonomi yang lebih tangguh, setara dan berkeadilan, serta memperluas lapangan kerja baru.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertama, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dalam sektor-sektor potensial seperti sektor digital melalui pembangunan

kapasitas dan keterampilan yang relevan. Kedua, adalah mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, menciptakan ekosistem untuk bumi yang layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan dan transisi energi yang adil dan terjangkau. Masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran strategis juga dalam mempercepat pemulihan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, agar dapat menggerakkan usaha secara baik.

11. **Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global**

Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan suatu daerah. Terlebih dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan perdagangan bebas, Kita harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan. SDM harus unggul dalam segala bidang sehingga dapat bersaing secara global. Untuk itu Peningkatan kualitas SDM merupakan hal yang krusial saat ini. Upaya peningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui program pelatihan kerja, program pemagangan serta program sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terlatih, terampil dan terserap di industri-industri yang ada.

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Malinau masih didominasi oleh lulusan SD dan SMA. Masih tingginya jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja belum diimbangi dengan ketersediaan jumlah tenaga kerja terampil di Kabupaten Malinau. Kualitas pendidikan penduduk yang rendah, tidak memungkinkan penduduk untuk dapat menangkap pengetahuan, informasi maupun teknologi baru. Tanpa diimbangi oleh kemampuan untuk menyerap informasi baru yang berkembang dengan cepat maka kemampuan untuk melakukan inovasi dalam memanfaatkan potensi yang

tersedia akan menjadi lambat. Sementara untuk mengembangkan sebuah daerah dalam diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk menggerakkan pembangunan dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.

12. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk mendorong pembangunan perekonomian. Keberhasilan pemerintah identik dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh daerah sehingga kemajuan sosial ekonomi dapat dirasakan seutuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang terbatas, tidak memadai dan berkualitas rendah menjadi hambatan utama dalam mendorong peningkatan laju investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan. Keadaan infrastruktur Kabupaten Malinau saat ini masih belum memuaskan karena membangun infrastruktur membutuhkan biaya yang besar sedangkan kapasitas anggaran terbatas. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik hanya 10,7 persen dari total panjang jalan atau sepanjang 111,36 KM sedangkan jalan dengan kondisi rusak berat 33,7 persen atau sepanjang 351,06 Km.

Dengan memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata, diharapkan dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi.

13. Tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan Koordinasi atau ketanggapan (responsiveness) sebagai unsur utama. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Ada Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Area Manajemen Perubahan ,Penataan Peraturan Perundang-undangan , Penataan dan Penguatan Organisasi ,Penataan Tatalaksana , Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Pelayanan Publik

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) tahun 2021 terhadap pemerintah Kabupaten Malinau, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau sangat perlu meningkatkan nilai SAKIP dan kualitas pelayanan public karena SAKIP menjadi salah satu pengungkit terciptanya manajemen kinerja instansi pemerintah, yang didalamnya mencakup perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Meskipun aparat pemerintah telah cukup memahami perubahan yang dikehendaki dari sistem ini, namun yang menjadi persoalan besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman tersebut dengan kemauan untuk berubah. Untuk itu diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan nilai SAKIP dan kualitas pelayanan publik Kabupaten Malinau.

14. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim

World Meteorological Organization (WMO) mengungkap fakta bahwa suhu bumi dari tahun 2015 hingga 2021 berada dalam tren menuju tujuh tahun dengan rekor terpanas dalam sejarah. sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, 2016 merupakan tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0,8 derajat celsius sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2020. Tahun 2020 sendiri menempati urutan kedua tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0,7 derajat celsius, lalu 2019 berada di peringkat ketiga dengan nilai anomali sebesar 0,6 derajat celsius. Bahkan, analisis proyeksi perubahan iklim oleh BMKG juga menunjukkan bahwa apabila tidak dilakukan mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca, kenaikan suhu di Indonesia dapat mencapai 3 derajat celsius di akhir abad ini. Perubahan iklim tidak hanya membawa dampak bagi sistem lingkungan namun juga berdampak pada sosial ekonomi,kesehatan, pertahanan dan keamanan dan lain-lain.

Aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil (seperti batu bara, minyak, dan gas) yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Suhu yang lebih hangat lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Ini menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lain di Bumi.

Kabupaten Malinau termasuk salah satu kabupaten yang besar dari sisi geografi, jumlah penduduk, size ekonomi, memiliki peran yang cukup penting dalam partisipasinya untuk menangani risiko perubahan iklim ini, termasuk emisi karbon. Meski terhitung terlambat, masih ada kesempatan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Mulai dari penataan ruang secara lestari, penghematan listrik dan air, pengelolaan sampah, pengurangan energi fosil dan menggantinya dengan teknologi rendah karbon atau memanfaatkan energi baru/terbarukan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, penghijauan secara masif dengan menanam pohon dan restorasi mangrove, dan sebagainya. Cara ini walaupun terlihat kecil namun punya

arti yang besar bagi kelangsungan planet dan makhluk di Bumi.

4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023

Tema pembangunan daerah tahun 2023 yakni "**Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan,** Berdasarkan tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023. Selain itu Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau juga diselaraskan dengan arahan dan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang relevan dengan kondisi daerah dan bersifat mandatori.

Mengingat keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan maka penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan cermat dan harus memperhatikan banyak hal. Yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut **:**

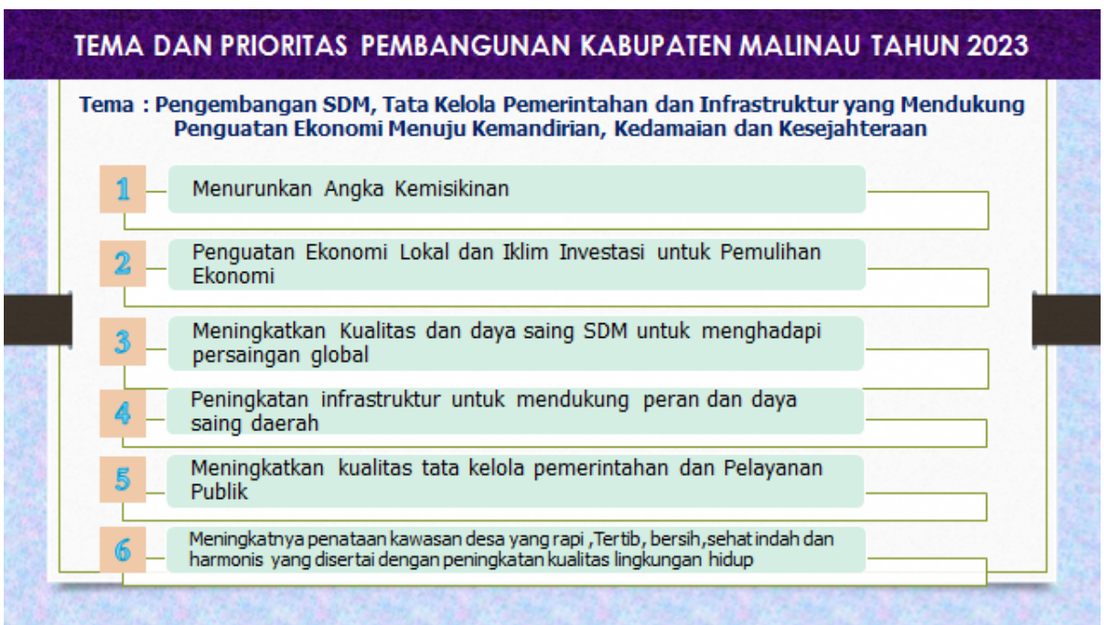

Gambar 4.5
Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023

Prioritas pembangunan di atas juga disusun dengan berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2021, hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah serta mempertimbangkan Visi misi Kabupaten Malinau sebagaimana yang sampaikan dalam sub bab diatas maupun bab-bab terdahulu. Prioritas Pembangunan dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 disajikan pada table 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11
Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2023

DATA	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	SASARAN
Kemiskinan naik 6,63 jadi 7,3 sedangkan target 2021 6,43	Meningkatnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Angka Kemiskinan	1. Menurunkan Angka Kemisikinan	Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat
				Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman
Struktur perekonomian Malinau didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 48,29 %	PDRB Kab. Malinau bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih	PDRB Kab. Malinau bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih	2. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal
		Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19		Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah
				Meningkatnya Investasi daerah
Belum tercapai target IPM 2021. Target 2021 7,52 capaian 7,32	Daya saing kualitas SDM yang relatif masih kurang	Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global	3. Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
				Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja
Panjang jalan dalam kondisi baik 10,7 %, Rusak berat 33,7 %	Belum optimal infrastruktur Daerah	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan
Sakip,RB, LPPD belum mencapai target	Nilai Sakip,RB ,LPPD masih rendah	Tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik	5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
				Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN
				Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa
Tahun 2021 Kualitas air kategori Sedang,	Masih rendah kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup dan pengendalian perubahan iklim	6. Meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi ,Tertib, bersih,sehat indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara
Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan				
Kabupaten Malinau belum memenuhi kategori Kabupaten /Kota sehat (Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes)				

Untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Malinau guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara, perlu sinergi perencanaan prioritas program kerja tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi Prioritas Nasional, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Malinau disajikan pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malinau dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kaltara

Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau 2023	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 2023
P1. Menurunkan Angka Kemisikinan	P2. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan	P1 Pengembangan dan Penguatan industri primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan , kehutanan dan pertambangan
P2. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi	P1. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan	P2 Pengembangan dan penguatan industri pengolahan
		P5 Pengembangan dan Penguatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		P6 Pengembangan dan Penguatan industri kecil dan menengah dan industri lainnya
P3. Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global	P3. SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing	
P4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah	P5. Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	P4 Pengembangan dan Penguatan industri Perdagangan dan Jasa
P5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik	P7. Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik	
P6. Meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi ,Tertib, bersih,sehat indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup	P6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	
	P4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	
		P3 Pengembangan dan Penguatan industri ketenagalistrikan

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2023. Prioritas pembangunan tersebut diturunkan kedalam program prioritas sebagai berikut **:**

1. Menurunkan Angka Kemisikinan dengan Program Prioritas :
    1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
    2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
    3) Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian
    4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
    5) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
    6) Program Penyelenggaraan Jalan
    7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
    8) Program Kawasan Permukiman
    9) Program Pengembangan Perumahan
    10) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum
    11) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
    12) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
    13) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    14) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    15) Program Perizinan Usaha Pertanian
    16) Program Penyuluh Lapangan
    17) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
    18) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
    19) Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
    20) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
    21) Program Pengelolaan Pendidikan
    22) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    23) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
    24) Program Perencanaan Tenaga Kerja
    25) Program Pengelolaan Keuangan (Dana Desa)

26) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi dengan Program Prioritas :
   1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   5) Program Perizinan Usaha Pertanian
   6) Program Penyuluh Lapangan
   7) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   9) Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   10) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   11) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
   12) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   13) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   14) Program Pemasaran Pariwisata
   15) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   16) ***Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tabel TC-33***
   17) Program Pelayanan Penanaman Modal
   18) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   19) Program Promosi Penanaman Modal
   20) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   21) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global dengan Program Prioritas :
   1) Program Pengelolaan Pendidikan
   2) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
   3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   5) Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   7) Program Perencanaan Tenaga Kerja

8) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
9) Program Penempatan Tenaga Kerja
10) Program Hubungan Industrial

4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah dengan Program Prioritas :
   1) Program Penyelenggaraan Jalan
   2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum
   5) Program Pengelolaan Pelayaran
   6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Program Prioritas :
   1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
   4) Program Penyelenggaraan Pengawasan
   5) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   6) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   8) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   9) Program Penataan Desa
   10) Program Peningkatan Kerja Sama Desa
   11) Program Administrasi Pemerintah Desa
6. Meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi ,Tertib, bersih,sehat indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan Program Prioritas :
   1) Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   2) Program Pengelolaan Persampahan
   3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   4) Program Pengelolaan Keuangan (Dana RT)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan dokumen rencana tahunan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program prioritas dikelompokkan atas program penunjang urusan Pemerintah Daerah, program urusan pemerintahan wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, program prioritas pada urusan pemerintahan pilihan serta program prioritas pada unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Yang dimaksud dengan program-program prioritas urusan wajib adalah program-program prioritas yang dilaksanakan pada Urusan Pemerintahan Wajib, dimana sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari Urusan : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum danpenataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari Urusan : tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari Urusan : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi; Ayat (2) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; Ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat; serta Ayat (4) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas maka RKPD Tahun 2023 ini hanya akan mengatur perencanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan/atau yang urusannya dilaksanakan oleh kabupaten. Adapun rencana kerja beserta dengan pendanaan disetiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah disajikan dalam tabel pada lampiran akhir buku RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Kerangka Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari serangkaian strategi yang telah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada.

Walaupun penetapan indikator kinerja, penetapan target kinerja, dan pengukuran kinerja merupakan suatu hal tidak mudah namum hal itu harus tetap dilakukan dalam kaitan penerapan manajemen pemerintah berbasis kinerja. Ukuran atau Indikator kinerja adalah unsur utama yang membedakan manajemen pemerintah masa lalu dengan praktik-praktik terbaik manajemen pemerintah masa kini.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

6.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki oleh suatu organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Malinau yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
	INDIKATOR TUJUAN		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	73,18
2	Indeks Ketahanan Nasional	poin	2,78
3	Pertumbuhan PDRB	persen	5,28
4	Indeks Gini	poin	0,283
5	Angka Kemiskinan	persen	6-6,5
6	Laju Inflasi	persen	0,33
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	poin	3,8
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	79,11
9	Indeks RB	poin	B
	INDIKATOR SASARAN		
1	Angka Usia Harapan Hidup	persen	72,05
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	poin	9,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,35-6,25
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	poin	75,09
5	Angka kriminalitas yang tertangani	persen	100
6	Indeks Resiko Bencana	poin	124,4
7	Indeks Pembangunan Gender	poin	84,36
8	Indeks Kerukunan Beragama	poin	80,6
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat	poin	79,5
10	Kontribusi Pertanian dalam arti luas (Tnp, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB (%)	persen	4,9
11	Nilai Tukar Petani	poin	103,7
12	Nilai Tukar Peternak	poin	103,25
13	Nilai Tukar Nelayan	poin	102,95
14	Kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB	persen	2,70%
15	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1.84%
16	Persentase Koperasi berkualitas	persen	72%
17	Pesentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	persen	73,30%
18	Nilai Investasi daerah	rupiah	91.100.000.000
19	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	persen	52,10%
20	Persentase daerah/wilayah banjir	persen	2%
21	Persentase daerah yang terhubung dengan moda transportasi	persen	70%

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
22	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	72%
23	Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi	persen	30,34
24	Pesentase Pemukiman Yang Layak	persen	79
25	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	7:09
26	persentase wilayah yang terlayani TIK	persen	100
27	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	78,18
28	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	poin	100
29	Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	poin	53,75
30	Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	poin	91,36
31	Predikat SAKIP	poin	B
32	Nilai LPPD	poin	Tinggi
33	Opini BPK	poin	WTP
34	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	4-6
35	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	BB
36	Persentase Peningkatan Desa Mandiri (desa)	persen	15,59

6.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Mengukur level kinerja organisasi pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menetapkan serangkaian indikator kinerja yang dianggap relevan dan penting. Indikator kinerja kunci yang selanjutnya disingkat IKK atau key performance indicators adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Indikator kinerja kunci Pemerintah Kabupaten Malinau meliputi aspek Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Malinau sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, di disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Kunci

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
1	2	3	4
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
I	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1	Pertumbuhan PDRB	5,28	Bappeda
2	Laju inflasi	0,33	Bappeda
3	PDRB per kapita	166.542.198	Bappeda
4	Indeks Gini	0,283	Bappeda
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	94 - 93,5	Bappeda
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,18	Bappeda
II	**Fokus Kesejahteraan Sosial**		
1	Angka melek huruf	98,34	Diknas
2	Angka rata-rata lama sekolah	9,67	Diknas
3	Angka usia harapan hidup	72,05	Dinkes
4	Persentase balita gizi buruk	< 15%	Dinkes
5	Prevalensi balita gizi kurang	< 5%	Dinkes
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60,38	Disnaker
7	Tingkat pengangguran terbuka	4,35-6,25	Disnaker
8	Rasio penduduk yang bekerja	96,90%	Disnaker
9	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	0,32	Disnaker
10	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	58,38%	Disnaker
11	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	70%	Disnaker
12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	n/a	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	4-6%	BPKD
15	Opini BPK	WTP	BPKD
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)		DKP
	PPH Ketersediaan	80,40%	DKP
	PPH Konsumsi	96,40%	DKP
17	Penguatan cadangan pangan	2	DKP
18	Penanganan daerah rawan pangan	6	DKP
19	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/terhadap PDRB	11,98	Dinas Pertanian
20	Produksi sektor pertanian /Perkebunan		Dinas Pertanian
	Padi	3,7	Dinas Pertanian
	Jagung	3,6	Dinas Pertanian
	Ubi Kayu	40,9	Dinas Pertanian
	Ubi Jalar	8	Dinas

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
			Pertanian
21	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	48,88	Bappeda
22	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	9,80%	Disbudpar
23	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	3%	Dinas Perikanan
24	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,19	Disperindag
25	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	2,70%	Disperindag
26	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	n/a	Disperindag
27	Pertumbuhan Industri	5%	Disperindag
III	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**		
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	20%	Disbudpar
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Disbudpar
3	Persentase Klub olah raga yang aktif	85	Dispora
4	Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	8 Cabor	Dispora
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
I	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**		
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	3098,05	Bappeda
2	Nilai Tukar Petani	103,7	Dinas Pertanian
3	Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)	143,75	Bappeda
4	Angka kriminalitas yang tertangani	100	Kesbangpol
5	Rasio ketergantungan	39,48%	Bappeda
II	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**		
1	Rasio panjang jalan		DPUPR. PERKIM
	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	20%	DPUPR. PERKIM
	Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang	32,10%	DPUPR. PERKIM
	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak	47,90%	DPUPR. PERKIM

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun		Dinas Perhubungan
	Melalui Dermaga	53995	Dinas Perhubungan
	Melalui Bandara	17880	Dinas Perhubungan
3	Jenis dan jumlah bank dan cabang		BPKD
	Kantor Cabang (KC)	1	BPKD
	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	9	BPKD
	Kantor Kas (KK)	12	BPKD
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran		BPKD
	Restoran/Rumah Makan	18	BPKD
	Warung / Kedai Makan	478	BPKD
4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel		BPKD
	Hotel Bintang	0	BPKD
	Hotel Non Bintang	17	BPKD
5	Persentase Penduduk yang yang menggunakan air bersih	80	DPUPR. PERKIM
6	Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan listrik	77	DPUPR. PERKIM
7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	93	Diskominfo
III	**Fokus Iklim Berinvestasi**		
1	Angka kriminalitas	0,00072	Kesbangpol
2	Jumlah demonstrasi	1	Kesbangpol
3	Lama proses perijinan	1 - 20	DPMPTSP
4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah		BPKD
	Jenis Pajak Daerah	10	BPKD
	Jumlah Pajak Daerah	29	BPKD
	Jenis Restribusi Daerah	4	BPKD
	Jumlah Restribusi Daerah	18	BPKD
5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	n/a	DPMPTSP
6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	1	DKP
IV	**Fokus Sumber Daya Manusia**		
1	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)		Disnaker
	Strata 1 (S1)	7263	Disnaker
	Strata 1 (S2)	447	Disnaker
	Strata 1 (S3)	16	Disnaker
2	Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)	39,48%	Disnaker
C	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
I	**Layanan Urusan Wajib Dasar**		
	Pendidikan		
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3778	Diknas

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Angka partisipasi kasar	23551	Diknas
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	4775	Diknas
4	Angka Partisipasi Murni	907	Diknas
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	10150	Diknas
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	5800	Diknas
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	4000	Diknas
	Angka Partisipasi Sekolah:	18125	Diknas
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	9530	Diknas
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	800	Diknas
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	400	Diknas
11	Angka Putus Sekolah:	0.30%	Diknas
12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.22%	Diknas
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1.01%	Diknas
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0%	Diknas
	Angka Kelulusan:	100%	Diknas
18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	Diknas
19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	Diknas
	Angka Melanjutkan (AM):		Diknas
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	1350	Diknas
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	1700	Diknas
	Fasilitas Pendidikan:		Diknas
23	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	1012	Diknas
24	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	41	Diknas
25	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0,75	Diknas
26	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	n/a	Diknas
27	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	78	Diknas
28	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	n/a	Diknas
29	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	70	Diknas
30	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	n/a	Diknas
31	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	1685	Diknas

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
32	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	8350	Diknas
33	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	n/a	Diknas
34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1525	Diknas
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1650	Diknas
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	94	Diknas
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3460	Diknas
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100	Diknas
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	160	Diknas
5	Jumlah pendidik pada PAUD	626	Diknas
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	202	Diknas
7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	90	Diknas
B	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	10200	Diknas
C	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	4275	Diknas
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	35	Diknas
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	10326	Diknas
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3512	Diknas

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10325	Diknas
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3517	Diknas
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	826	Diknas
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	582	Diknas
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	180	Diknas
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	40	Diknas
10	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	41	Diknas
11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	12	Diknas
12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	82	Diknas
13	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	66	Diknas
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	35	Diknas
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	30	Diknas
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	94	Diknas
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	6	Diknas
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	64	Diknas
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah	5	Diknas

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	SMA/sederajat		
D	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8550	Diknas
1	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	7	Diknas
2	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	760	Diknas
3	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	760	Diknas
4	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	15	Diknas
5	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	72	Diknas
6	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	70	Diknas
7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah	35	Diknas
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	Diknas
Urusan Kesehatan			DKPP&KB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	n/a	DKPP&KB
2	Angka kelangsungan hidup bayi	n/a	DKPP&KB
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	n/a	DKPP&KB
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	n/a	DKPP&KB
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	n/a	DKPP&KB
6	Rasio posyandu per satuan balita	1:1000	DKPP&KB
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:1000	DKPP&KB
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:10000	DKPP&KB
9	Rasio dokter per satuan penduduk	1:1000	DKPP&KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:1000	DKPP&KB
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	DKPP&KB
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97%	DKPP&KB
13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	95%	DKPP&KB
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	DKPP&KB
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	n/a	DKPP&KB
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	95%	DKPP&KB
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	DKPP&KB
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100%	DKPP&KB
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	DKPP&KB
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	245	DKPP&KB
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	40%	DKPP&KB
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%	DKPP&KB
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%	DKPP&KB
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	DKPP&KB
25	Penderita diare yang ditangani	100%	DKPP&KB
26	Angka kejadian Malaria	2	DKPP&KB
27	Tingkat kematian akibat malaria	0%	DKPP&KB
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	80%	DKPP&KB
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100%	DKPP&KB
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,5%	DKPP&KB
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	100%	DKPP&KB
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	80%	DKPP&KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	DKPP&KB
34	Cakupan kunjungan bayi	95%	DKPP&KB
35	Cakupan puskesmas	n/a	DKPP&KB
36	Cakupan pembantu puskesmas	n/a	DKPP&KB
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	97%	DKPP&KB
38	Cakupan pelayanan nifas	97%	DKPP&KB
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	DKPP&KB
40	Cakupan pelayanan anak balita	90%	DKPP&KB
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	n/a	DKPP&KB
42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	DKPP&KB
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	DKPP&KB
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	DKPP&KB
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	DKPP&KB
46	Persentase balita gizi buruk	< 15%	DKPP&KB
47	Prevalensi balita gizi kurang	< 5%	DKPP&KB
48	Cakupan Desa Siaga Aktif	n/a	DKPP&KB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk**	**1:1000**	DKPP&KB
1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	DKPP&KB
B	**Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	DKPP&KB
C	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku Kia: 3058 Kohort ibu : 143 PPtest: 3058 pcs Stik GDS : 3058 pcs Strip Hb : 3058pcs stik protein : 3058 TTD :	DKPP&KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	DKPP&KB
D	**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Partograf : 2720 lembar Kartu ibu : 2720 oksitosin Inject : 2720	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	DKPP&KB
E	**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kohort bayi : 110 Vaksin Hb0 : - Salep mata : 200 tube Vit K1 : 2780 amp form MTBM : 2139 lembar	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	DKPP&KB
F	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kohort : 110 ex KPSP : 34 pcs DDTK : 150 ex Vit A merah: 22599 Vit A Biru : 1033	DKPP&KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 -Gizi : 22 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	DKPP&KB
G	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	n/a	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 -Gizi : 22 -Kesmas : 21 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	DKPP&KB
H	**Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	119	DKPP&KB
		119	DKPP&KB
		119	DKPP&KB
		119	DKPP&KB
		51,88	DKPP&KB
		119	DKPP&KB
		51,88	DKPP&KB
		14780	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
I	**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Rapor: 5545 AU : 28,834 Chol : 28,834 GDS: 28,834 Format: 5545	DKPP&KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 -Gizi : 22 -Kesmas : 21 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	DKPP&KB
J	**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DKPP&KB
		109%	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
K	**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	110	DKPP&KB
		47.164 Pcs	DKPP&KB
		110	DKPP&KB
		47.164 Pcs	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
L	**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
M	**Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DKPP&KB
		161	DKPP&KB
		2403	DKPP&KB
		26438	DKPP&KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
		2	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		2	DKPP&KB
		17	DKPP&KB
		218	DKPP&KB
N	**Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**	**100%**	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	20	DKPP&KB
		2058	DKPP&KB
		2058	DKPP&KB
		2058	DKPP&KB
		1801	DKPP&KB
		1801	DKPP&KB
		1801	DKPP&KB
		2508	DKPP&KB
		2508	DKPP&KB
		2508	DKPP&KB
		2508	DKPP&KB
		2508	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	20	DKPP&KB
		20	DKPP&KB
		20	DKPP&KB
		20	DKPP&KB
		20	DKPP&KB
		20	DKPP&KB
		20	DKPP&KB
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DKPP&KB
A	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,86	DKPP&KB
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	100%	DKPP&KB
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	n/a	DKPP&KB
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	n/a	DKPP&KB
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%	DKPP&KB
5	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	100%	DKPP&KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
B	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	n/a	DKPP&KB
1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	DKPP&KB
2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP	26%	DKPP&KB
3	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	n/a	DKPP&KB
4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	n/a	DKPP&KB
C	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,43%	DKPP&KB
1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	n/a	DKPP&KB
2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	n/a	DKPP&KB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1:1000	DKPP&KB
2	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/ kota yang terakreditasi	100%	DKPP&KB
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	100%	DKPP&KB
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.	100%	DKPP&KB
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	DKPP&KB
6	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	DKPP&KB
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	DKPP&KB
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	DKPP&KB
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100%	DKPP&KB
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	DKPP&KB
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	DKPP&KB
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	DKPP&KB
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	DKPP&KB
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus	100%	DKPP&KB
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	195	DKPP&KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
16	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	DTT	DKPP&KB
17	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	95%	DKPP&KB
18	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	< 20%	DKPP&KB
19	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	< 15%	DKPP&KB
20	Insidensi TB per 100.000 penduduk	400	DKPP&KB
21	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeki HIV	50%	DKPP&KB
22	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	30%	DKPP&KB
23	Treatment coverage pada pasien TB	85%	DKPP&KB
24	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	95%	DKPP&KB
25	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai stand	95%	DKPP&KB
26	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	25%	DKPP&KB
27	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	17	DKPP&KB
28	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	35%	DKPP&KB
29	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	100%	DKPP&KB
30	Persentase Sarana Produksi UMOT	100%	DKPP&KB
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DKPP&KB
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		DKPP&KB
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	53%	DKPP&KB
3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	53%	DKPP&KB
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	37%	DKPP&KB
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan			DPUPR. PERKIM
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
	Pekerjaan Umum		DPUPR. PERKIM
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,143815916	DPUPR. PERKIM
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,012	DPUPR. PERKIM

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	7,34%	DPUPR. PERKIM
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	20%	DPUPR. PERKIM
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	2%	DPUPR. PERKIM
13	Rasio Jaringan Irigasi	56,15	DPUPR. PERKIM
14	Persentase penduduk berakses air minum	n/a	DPUPR. PERKIM
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	n/a	DPUPR. PERKIM
16	Persentase areal kawasan kumuh	n/a	DPUPR. PERKIM
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	n/a	DPUPR. PERKIM
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	660	DPUPR. PERKIM
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	n/a	DPUPR. PERKIM
	Penataan Ruang:		DPUPR. PERKIM
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,18	DPUPR. PERKIM
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	7,45%	DPUPR. PERKIM
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,042	DPUPR. PERKIM
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	DPUPR. PERKIM
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,9	DPUPR. PERKIM
6	Ketaatan terhadap RTRW	65%	DPUPR. PERKIM
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,156	DPUPR. PERKIM
B	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	n/a	DPUPR. PERKIM
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan	137.491,78 Ha	DPUPR. PERKIM

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	kabupaten/kota (ha)		
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	14.550	DPUPR. PERKIM
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	9,5 KM	DPUPR. PERKIM
C	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,56	DPUPR. PERKIM
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0,519	DPUPR. PERKIM
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0,701	DPUPR. PERKIM
3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0,786	DPUPR. PERKIM
D	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	40	DPUPR. PERKIM
1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	1 dokumen	DPUPR. PERKIM
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	1 dokumen	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	n/a	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	20	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	HIBAH	DPUPR. PERKIM
E	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	40	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	40	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	45	DPUPR. PERKIM

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	30	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	40	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	40	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	45	DPUPR. PERKIM
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	50	DPUPR. PERKIM
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	60	DPUPR. PERKIM
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	50	DPUPR. PERKIM
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	55	DPUPR. PERKIM
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	40	DPUPR. PERKIM
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	30	DPUPR. PERKIM
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	40	DPUPR. PERKIM
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	45	DPUPR. PERKIM
F	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	41%	DPUPR. PERKIM
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	60%	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	n/a	DPUPR. PERKIM
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DPUPR. PERKIM
4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DPUPR. PERKIM
G	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota	0,54	DPUPR. PERKIM
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.043,20	DPUPR. PERKIM
2	Panjang jalan yang dibangun	14,00	DPUPR.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
			PERKIM
3	Panjang jembatan yang dibangun	0,795	DPUPR. PERKIM
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/ fungsi)	58,09	DPUPR. PERKIM
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	n/a	DPUPR. PERKIM
6	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	58,09	DPUPR. PERKIM
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0,30	DPUPR. PERKIM
8	Panjang jalan yang dipelihara	9,60	DPUPR. PERKIM
9	Panjang jembatan yang dipelihara	0,30	DPUPR. PERKIM
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT			DPUPR. PERKIM
A	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	40	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	50	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	4.979 Unit	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	4.975 KK	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1.679 Unit	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1.100 Unit	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	1.100 Unit	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1.100 Unit	DPUPR. PERKIM
B	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	222	DPUPR. PERKIM

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	n/a	DPUPR. PERKIM
C	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	0,88 Ha	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	8,31 Ha	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	146 Unit	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,39 Ha	DPUPR. PERKIM
D	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,25%	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah di kab/kota	17.997 Unit	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah unit PK RTLH	146 Unit	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah rumah tidak layak huni	1.191 Unit	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	n/a	DPUPR. PERKIM
5	Rasio rumah dan KK	1 / 1,09	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah rumah pembangunan baru	135 Unit	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	250 Unit	DPUPR. PERKIM
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Persentase luas sawah beririgasi	40%	DPUPR. PERKIM
2	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	1.957 Ha	DPUPR. PERKIM
3	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	315 Ha	DPUPR. PERKIM
4	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	16 Km	DPUPR. PERKIM
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	470 Orang	Satpol-PP

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	51 Pelanggaran	Satpol-PP
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	14,71%	Satpol-PP
4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	Satpol-PP
5	Persentase Penegakan PERDA	100%	Satpol-PP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol-PP
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/ Kota yang ditangani	59	Satpol-PP
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	160 Orang	Satpol-PP
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9 Perda	Satpol-PP
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 Orang	Satpol-PP
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	9 SOP	Satpol-PP
6	Tersedianya sarana prasarana minimal	6 Jenis	Satpol-PP
B	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol-PP
F	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satpol-PP
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	100%	Satpol-PP
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4 Pos	Satpol-PP
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	72 Orang	Satpol-PP
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	3 Pos	Satpol-PP
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	14 Jenis	Satpol-PP

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	58 orang	Satpol-PP
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	40 Orang	Satpol-PP
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	72 orang	Satpol-PP
G	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	Satpol-PP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol-PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100%	Satpol-PP
3	Persentase penanganan pra bencana		Satpol-PP
4	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	Satpol-PP
5	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	100%	Satpol-PP
6	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	100%	Satpol-PP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	n/a	BPBD
2	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	75%	BPBD
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	n/a	BPBD
1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	42.000 Jiwa	BPBD
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	42.000 Jiwa	BPBD
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Unit	BPBD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	11.000 Jiwa	BPBD
5	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	n/a	BPBD
6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	20 Orang	BPBD
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	42.000 Jiwa	BPBD
2	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	2.000 Orang	BPBD
3	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	n/a	BPBD
4	Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	1 Pokmas	BPBD
5	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	n/a	BPBD
6	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	n/a	BPBD
URUSAN SOSIAL			
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
	SOSIAL		DP3AS
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	60%	DP3AS
2	Persentase PMKS yang tertangani	60%	DP3AS
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60%	DP3AS
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	60%	DP3AS
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	60%	DP3AS
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	DP3AS
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima	60%	DP3AS

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	jaminan sosial		
	Pemberdayaan Perempuan		DP3AS
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60%	DP3AS
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20%	DP3AS
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	60%	DP3AS
4	Rasio KDRT	10%	DP3AS
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	10%	DP3AS
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	n/a	DP3AS
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	DP3AS
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	DP3AS
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	DP3AS
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	25	DP3AS
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	25	DP3AS
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2	DP3AS
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DP3AS
1	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	1	DP3AS

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	100 orang	DP3AS
3	JumlahTim Reaksi Cepat yang dibentuk	3 Tim	DP3AS
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	50 orang	DP3AS
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 Kendaraan	DP3AS
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	200 orang	DP3AS
7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DP3AS
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	200 orang	DP3AS
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	50 orang	DP3AS
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	10 bh	DP3AS
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	20 paket	DP3AS
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	15 Orang	DP3AS
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2 Orang	DP3AS
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	60 Orang	DP3AS
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	200 orang	DP3AS
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan	15 kali	DP3AS

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	masyarakat		
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	200 orang	DP3AS
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	200 orang	DP3AS
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	200 orang	DP3AS
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	200 orang	DP3AS
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	50 orang	DP3AS
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK			DP3AS
A	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	n/a	DP3AS
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	25	DP3AS
2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	20	DP3AS
B	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	DP3AS
1	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/ kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	DP3AS
2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	DP3AS
3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DP3AS
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	7	DP3AS

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	3	DP3AS
C	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	n/a	DP3AS
1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan pelatihan	25	DP3AS
2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/ kota yang sudah dilatih	40	DP3AS
3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	10	DP3AS
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota	5	DP3AS
5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	DP3AS
6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	DP3AS
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DP3AS
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	DP3AS
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80	DP3AS
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	5	DP3AS
11	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	3	DP3AS
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Ketersediaan pangan utama	9870	Dinas Ketahan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi : 2.401 kal/kap/hari	Dinas Ketahan Pangan
		Protein : 62,50 gr/kap/hari	Dinas Ketahan Pangan
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	52 Sampel	Dinas Ketahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
			Pangan
4	Penguatan cadangan pangan	2 Kegiatan	Dinas Ketahan Pangan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100%	Dinas Ketahan Pangan
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	2 Lumbung (1 Kecamatan untuk 2 Desa)	Dinas Ketahan Pangan
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	Dinas Ketahan Pangan
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1 Regulasi	Dinas Ketahan Pangan
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	7 KWT	Dinas Ketahan Pangan
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	6 Dokumen	Dinas Ketahan Pangan
6	Tertanganinya kerawanan pangan	6 Dokumen	Dinas Ketahan Pangan
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	30 Ton	Dinas Ketahan Pangan
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	30 Sampel	Dinas Ketahan Pangan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	6%	Dinas Ketahan Pangan
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	7%	Dinas Ketahan Pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan	PPH Ketersediaan = 80,40% PPH Konsumsi = 96,4%	Dinas Ketahan Pangan
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	57,70%	Dinas Ketahan Pangan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	1	DLH
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	n/a	DLH
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	n/a	DLH
4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	n/a	DLH
5	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	n/a	DLH
6	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	n/a	DLH
7	Terfasilitasi penyediaan sarana/ prasarana	n/a	DLH
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	n/a	DLH
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	DLH
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	77,00	DLH
1	Indeks kualitas air (IKA)	52,00	DLH
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,00	DLH
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	103,00	DLH
B	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	87,00	DLH
1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	2	DLH
C	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	80,00	DLH
1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	5,00	DLH
2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,20	DLH
3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	1,00	DLH
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	1,00	DLH

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
5	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	100%	DLH
6	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	20,00	DLH
8	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/ kota	n/a	DLH
9	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	DLH
10	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan	n/a	DLH
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	67%	Dukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	77%	Dukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah	82%	Dukcapil
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Dukcapil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Dukcapil
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	Dukcapil
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	8,30%	Dukcapil
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Perekaman KTP elektronik	96%	Dukcapil
B	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	47%	Dukcapil
C	Kepemilikan akta kelahiran	92%	Dukcapil
D	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	7,69%	Dukcapil
1	Penerbitan akta perkawinan	100%	Dukcapil
2	Penerbitan akta perceraian	100%	Dukcapil
3	Penerbitan akta kematian	100%	Dukcapil
4	Penyajian data kependudukan	100%	Dukcapil
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	Dukcapil
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	92%	Dukcapil
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	Dukcapil

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	Dukcapil
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100%	Dukcapil
6	Pemanfaatan data kependudukan	7,69%	Dukcapil
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase pengentasan Desa tertinggal	10 Desa	DPMD
B	Persentase peningkatan status desa mandiri	1 Desa	DPMD
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	21 Desa	DPMD
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	19 Desa	DPMD
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	450 lembaga	DPMD
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	385 Lembaga	DPMD
5	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	386 Lembaga	DPMD
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	DPMD
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	68 Lembaga	DPMD
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	80 KEL0MPOK BINAAN PKK	DPMD
4	Persentase LSM aktif	4 JUMLAH LSM AKTIF	DPMD
5	Persentase LPM Berprestasi	40 JUMLAH KELOMPOK BINAAN LPM	DPMD
6	Persentase PKK aktif	115 JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK	DPMD
7	Persentase Posyandu aktif	68 JUMLAH POSYANDU AKTIF	DPMD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	19077 JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT	DPMD
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	560 JUMLAH PROGRAMSWADAYA MASYARAKAT	DPMD
			DPMD
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	2197ORANG	DPMD
2	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	808 LEMBAGA	DPMD
3	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	654 SISTEM PELAYANAN	DPMD
4	Jumlah Desa Mandiri	3 DESA	DPMD
5	Jumlah Desa Berkembang	6 DESA	DPMD
6	Jumlah Desa Tertinggal	10 DESA	DPMD
7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	15 BUMDes	DPMD
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	120	DISHUB
2	Rasio ijin trayek	1	DISHUB
3	Jumlah uji kir angkutan umum	300	DISHUB
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	20	DISHUB
5	Persentase layanan angkutan darat	1	DISHUB
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	50	DISHUB
7	Pemasangan Rambu- rambu	150	DISHUB
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1	DISHUB
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	190	DISHUB
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	450	DISHUB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Rasio konektivitas kabupaten/kota	72	DISHUB
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100	DISHUB
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	500	DISHUB
3	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	DISHUB
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	26,67	Diskominfo
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	97,25	Diskominfo
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	90	Diskominfo
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	60	Diskominfo
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	5,00	Diskominfo
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Diskominfo
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	78,18	Diskominfo
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	85,45	Diskominfo
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tersedia	Diskominfo
B	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	33,33	Diskominfo
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	50	Diskominfo
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	10,91	Diskominfo
3	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	10,91	Diskominfo

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	10,91	Diskominfo
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4,76	Diskominfo
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	42,00	Diskominfo
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	2,38	Diskominfo
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	9,09	Diskominfo
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	9,09	Diskominfo
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	33,33	Diskominfo
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	2,38	Diskominfo
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	2,38	Diskominfo
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0,14	Diskominfo
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedia	Diskominfo
C	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	Diskominfo
1	Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	Diskominfo
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Diskominfo

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Diskominfo
URUSAN STATISTIK			
A	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Diskominfo
1	Tersedianya buku profil daerah	Tersedia	Diskominfo
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	Diskominfo
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	Diskominfo
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	Diskominfo
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	Diskominfo
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	Diskominfo
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100	Diskominfo
URUSAN PERSANDIAN			
A	Tingkat keamanan informasi pemerintah	90	Diskominfo
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	90	Diskominfo
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	4,76	Diskominfo
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Diskominfo
4	Persentase titik yang daiamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100	Diskominfo
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	78,18	Diskominfo

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	2,38	Diskominfo
3	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	2,38	Diskominfo
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	2,00	Diskominfo
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	78,18	Diskominfo
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	10	Diskominfo
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	30	Diskominfo
8	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin,stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100	Diskominfo
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	100	Diskominfo
10	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	100	Diskominfo
11	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll)termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	100,00	Diskominfo
Urusan Statistik			Diskominfo
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Diskominfo

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Diskominfo
Urusan Persandian			Diskominfo
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	1	Diskominfo
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1	Diskominfo
3	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE))	1	Diskominfo
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	2	DPMPTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	91.100.000.000	DPMPTSP
3	Rasio daya serap tenaga kerja	4,6	DPMPTSP
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	91.100.000.000	DPMPTSP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1,1	DPMPTSP
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas /intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	n/a	DPMPTSP
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	DPMPTSP
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	DPMPTSP
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2	DPMPTSP
5	Kegiatan pameran penanaman modal	2	DPMPTSP
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2	DPMPTSP
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal oran realisasi penanaman modal	5 org (5 kali pertemuan)	DPMPTSP DPMPTSP
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	415	DPMPTSP
9	Laporan realisasi penanaman modal	4	DPMPTSP
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	24 org	DPMPTSP

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	2	DPMPTSP
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	6 pengaduan	DPMPTSP
		22 konsultasi	DPMPTSP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	91.100.000.000	DPMPTSP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	90%	Dispora
2	Persentase wirausaha muda	0,84%	Dispora
3	Cakupan pembinaan olahraga	30%	Dispora
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	50%	Dispora
5	Cakupan pembinaan atlet muda	0	Dispora
6	Jumlah atlet berprestasi	5 Cabor	Dispora
7	Jumlah prestasi olahraga	8 Cabor	Dispora
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,84%	Dispora
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	90 Orang	Dispora
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dispora
B	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,78%	Dispora
1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	54 Orang	Dispora
2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dispora
C	Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	8 Cabor	Dispora
1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0	Dispora
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	8 Cabor	Dispora
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
	Kebudayaan		Disbudpar
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	Disbudpar
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	Disbudpar
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	Disbudpar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	n/a	Disbudpar
	Pariwisata		Disbudpar
1	Kunjungan wisata	1.570 Orang	Disbudpar
2	Lama kunjungan Wisata	n/a	Disbudpar
3	PAD sektor pariwisata	n/a	Disbudpar
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	n/a	Disbudpar
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	8	Disbudpar
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	6	Disbudpar
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	20%	Disbudpar
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	3	Disbudpar
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,84%	Disbudpar
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	9,80%	Disbudpar
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	55 Orang	Disbudpar
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2	Disbudpar
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	n/a	Disbudpar
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	n/a	Disbudpar
8	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	6	Disbudpar
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	40%	Disbudpar
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6	Disbudpar
KEBUDAYAAN			Dusbudpar
A	Terlestarikannya Cagar Budaya		Dusbudpar
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, Penyelamatan dan publikasi)	2	Dusbudpar
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan,pengkajian,	1	Dusbudpar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	penayaan keberagaman)		
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Dusbudpar
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi,serta peningkatan kapasitas tata kelola)	10	Dusbudpar
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1	Dusbudpar
6	Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	1	Dusbudpar
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	n/a	Dusbudpar
8	Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1	Dusbudpar
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	Dusbudpar
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	n/a	Dusbudpar
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	n/a	Dusbudpar
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	n/a	Dusbudpar
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	n/a	Dusbudpar
14	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	5	Dusbudpar
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	n/a	Dusbudpar
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	n/a	Dusbudpar
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	n/a	Dusbudpar
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	n/a	Dusbudpar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	n/a	Dusbudpar
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	20%	Dusbudpar
2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	2	Dusbudpar
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	20%	Dusbudpar
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	2	Dusbudpar
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	20%	Dusbudpar
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	n/a	Dusbudpar
7	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	2	Dusbudpar
8	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	7	Dusbudpar
9	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	40%	Dusbudpar
10	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten	n/a	Dusbudpar
11	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	20%	Dusbudpar
12	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	n/a	Dusbudpar
13	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	n/a	Dusbudpar
14	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	20%	Dusbudpar
15	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	n/a	Dusbudpar
Urusan Pariwisata			Dusbudpar
1	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	n/a	Dusbudpar
2	Jumlah Pergerakan Wisatawan	1.547 Orang	Dusbudpar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	Nusantara		
3	Kontribusi PDB Pariwisata	n/a	Dusbudpar
INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017			
Perpustakaan :			
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan :			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Produksi perikanan	265	Perikanan
2	Konsumsi ikan	33,8	Perikanan
3	Cakupan bina kelompok nelayan	11,76	Perikanan
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	27,17	Perikanan
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	90	Perikanan
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0%	Perikanan
7	Nilai tukar nelayan	n/a	Perikanan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ Kota (sumber data: one data KKP)	265	Perikanan
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	22 RTP	Perikanan
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	25%	Perikanan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	1 IUP	Perikanan
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	220 Orang	Perikanan
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	900.000	Perikanan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
1	Produksi Perikanan Tangkap	72	Perikanan
2	Produksi Perikanan Budidaya	193	Perikanan
	Jumlah	265	Perikanan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	3.596,96	Pertanian
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	n/a	Pertanian
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	3.596,96	Pertanian
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	n/a	Pertanian
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	3,7	Pertanian
		3,6	Pertanian
		40,9	Pertanian
		8	Pertanian
6	Cakupan bina kelompok petani	400	Pertanian
7	Produksi sektor Perkebunan (TON)	9204,26	Pertanian
		38,2	Pertanian
		177,11	Pertanian
		174,33	Pertanian
		8,1	Pertanian
8	Nilai tukar petani	103,7	Pertanian
9	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	n/a	Pertanian
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,7	Pertanian
		3,6	Pertanian
		40,9	Pertanian
		8	Pertanian
1	Sarana pertanian yang diberikan	70	Pertanian
2	Prasarana pertanian yang digunakan	35	Pertanian
3	Penerbitan izin usaha pertanian	n/a	Pertanian
4	Persentase prasarana yang digunakan	35	Pertanian
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	n/a	Pertanian

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
B	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	3%	Pertanian
1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	n/a	Pertanian
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2022			
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)		Pertanian
	Padi	1,1	Pertanian
	Jagung	1,0	Pertanian
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,05	Pertanian
3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan		Pertanian
	Sawit	1,05	Pertanian
	Kopi	1,05	Pertanian
	Kakao	1,05	Pertanian
	Karet	1,05	Pertanian
	Lada	1,05	Pertanian
4	persentase peningkatan produktivitas peternakan		Pertanian
	Sapi Potong	0,43	Pertanian
	Ayam Broiler	0,046	Pertanian
	Telur Ayam Ras	0,051	Pertanian
5	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	70%	Pertanian
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		Pertanian
	Kec. Malinau Kota	72,11%	Pertanian
	Kec. Malinau Utara	4,56%	Pertanian
	Kec. Malinau Barat	3,96%	Pertanian
	Kec. Mentarang	2,35%	Pertanian
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		Perindag
1	Persentase koperasi aktif	72%	Perindag
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	n/a	Perindag
3	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	Perindag
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99%	Perindag
	Perdagangan		Perindag
1	Ekspor Bersih Perdagangan	n/a	Perindag
2	Cakupan bina kelompok pedagang /usaha informal	5%	Perindag
	Perindustrian		Perindag
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	5%	Perindag
2	Pertumbuhan Industri	5%	Perindag
Urusan Koprasi Usaha Kecil dan Menengah			Perindag
A	Meningkatnya Koperasi yang	16%	Perindag

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	berkualitas		
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6%	Perindag
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2%	Perindag
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	27%	Perindag
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9%	Perindag
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	16%	Perindag
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	16,16%	Perindag
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2%	Perindag
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%	Perindag
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16%	Perindag
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Perindag
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1%	Perindag

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18%	Perindag
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18%	Perindag
B	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	3,99%	Perindag
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	23,19%	Perindag
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0%	Perindag
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0%	Perindag
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	19,95%	Perindag
5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3,24%	Perindag
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	19,95%	Perindag
7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0%	Perindag
Urusan Perdagangan			Perindag
A	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS /SIUP Toko Swalayan)	n/a	Perindag
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	n/a	Perindag
2	Persentase penerbitan TDG	100%	Perindag
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	30%	Perindag
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	50%	Perindag
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	n/a	Perindag

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	50%	Perindag
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	50%	Perindag
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	n/a	Perindag
B	Persentase kinerja realisasi pupuk		Perindag
1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	n/a	Perindag
C	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP)bertanda tera sah yang berlaku	50%	Perindag
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	50%	Perindag
2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	n/a	Perindag
Perindustrian			Perindag
A	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	n/a	Perindag
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	n/a	Perindag
B	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	n/a	Perindag
1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	n/a	Perindag
C	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Perindag
1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	Perindag
2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	100%	Perindag
D	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	100%	Perindag

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
	oleh instansi terkait		
E	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0%	Perindag
F	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Perindag
1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	20%	Perindag
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021			
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			Perindag
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	n/a	Perindag
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	n/a	Perindag
Urusan Perdagangan			Perindag
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	n/a	Perindag
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0%	Perindag
4	Persentase kinerja realisasi pupuk		Perindag
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	10%	Perindag
6	Persentase penanganan pengaduan konsumen	50%	Perindag
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	100%	Perindag
8	Inflasi Pangan bergejolak	0%	Perindag
Urusan Perindustrian			Perindag
1	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	1,2%	Perindag
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	2,70%	Perindag
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	n/a	Perindag
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	2714 org	Perindag
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	196.679.100.000	Perindag

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	80%	BPBJ
B	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	90%	BPBJ
C	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60%	BPBJ
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	23,00%	BPKD
B	Rasio PAD	1,00%	BPKD
C	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,08%	BPKD
D	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,08%	BPKD
E	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	64,00%	BPKD
F	Opini Laporan Keuangan	WTP	BPKD
Manajemen Keuangan			BPKD
A	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	85,00%	BPKD
B	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	95,00%	BPKD
C	Manajemen Aset	Ya	BPKD
D	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	73,00%	BPKD
Transparansi dan Partisipasi Publik			BPKD
A	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	BPKD
B	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	BPKD
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020			
A	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,20%	BKPP
B	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,0250%	BKPP
C	Rasion Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1%	BKPP
Indikator Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017			
1	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Tahun	BKPP

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,83%	BKPP
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	30%	BKPP
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	BKPP
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	155	BKPP
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	340	BKPP

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Malinau merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau 2021–2026 tahun kedua. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2023 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2023. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2023, mengacu pada analisis permasalahan dan isu - isu strategis.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Malinau, dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah serta tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efesiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Dokumen RKPD Tahun 2023 secara umum mempunyai nilai strategis dan penting karena menjadi pedoman pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Untuk memastikan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka perlu diperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023, secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 tahun ke 2 (dua) yang selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.
2. RKPD Tahun 2023 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023 agar menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2023.
3. RKPD Tahun 2023 menjadi dasar dan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023.
4. RKPD merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap

pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui capaian kinerja RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Subtansi RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik ditingkat Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi. Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA, SE. M.H